



MODUL PELATIHAN FASILITATOR Perencanaan dan Penganggaran Daerah yang Responsif Gender (PPRG)





MODUL PELATIHAN FASILITATOR

**Perencanaan dan Penganggaran
Daerah yang Responsif Gender
(PPRG)**



Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jl. Medan Merdeka Barat No. 15
Jakarta 10110

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Decentralisation as Contribution to Good Governance (DeCGG)

Kementerian Dalam Negeri RI
Gd. Sasana Bhakti Praja Lt. 5
Jl. Medan Merdeka Utara No. 7
Jakarta 10110, Indonesia
T: +62-21-351 1584
F: +62-21-386 8167

Strengthening Women's Rights (SWR)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Jl. Medan Merdeka Barat No. 15 Lt. 6
Jakarta 10110, Indonesia
T: + 62 21 3850281
F: + 62 21 3850280

Dibiayai oleh:

German Federal Ministry for Economic Development and Cooperation (BMZ)

Diterbitkan pada:

Januari 2011 (edisi pertama)

Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Upaya mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan di Indonesia telah dilakukan lebih dari satu dasawarsa. Terbitnya INPRES No. 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional menjadi satu titik tolak kebijakan yang sangat penting dalam mendorong upaya tersebut. Kebijakan ini kemudian dipertegas juga dalam Peraturan Presiden No. 5 tahun 2011 tentang RPJMN 2010-2014 yang menetapkan gender sebagai salah satu isu lintas bidang yang harus diintegrasikan dalam semua bidang pembangunan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP & PA) menjadi satu lembaga yang diharapkan berperan penting dalam mendukung keberhasilan upaya tersebut melalui fungsi koordinasi, advokasi dan fasilitasi yang dimilikinya.

Integrasi gender dalam proses perencanaan dan penganggaran merupakan suatu langkah yang relatif baru karena pada awalnya proses pengintegrasian gender dalam pembangunan lebih terfokus pada upaya untuk memperkuat prasyarat implementasi PUG seperti membangun komitmen pengambil kebijakan, penyediaan alat analisa gender, serta kelembagaan PUG. Dengan dukungan dari berbagai pihak, termasuk dari NGO dan lembaga internasional, muncul inisiatif untuk mengintegrasikan isu gender dalam salah satu aspek pembangunan yang sangat penting, yakni aspek penganggaran.

Sejak beberapa tahun terakhir ini kita menyaksikan banyak upaya mendorong implementasi Anggaran yang Responsif Gender (ARG), yang dimulai dengan dikeluarkan PMK 109/2009 dengan tujuh kementerian negara/lembaga sebagai pilot di dalam melaksanakan ARG di tahun 2010. PMK 109/2009 diperbarui dengan keluarnya Peraturan Menteri Keuangan No.104/PMK 02/2010 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga untuk pelaksanaan anggaran di tahun 2011 dengan fokus pelaksanaan ARG di sektor-sektor ekonomi, politik dan sosial.

Berdasarkan pengalaman KPP & PA dalam memfasilitasi PUG dan ARG di kementerian negara dan lembaga dan di daerah, ada sejumlah pembelajaran yang ditemui, yakni: 1) diperlukannya suatu pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara proses penganggaran dan perencanaan untuk memastikan adanya konsistensi antara hasil yang direncanakan dengan kegiatan dan anggaran yang dialokasikan untuk mencapai hasil tersebut, atau memastikan bahwa manajemen berbasis kinerja yang menjadi dasar dari Sistem Perencanaan dan Penganggaran di Indonesia juga diperhatikan dalam upaya menjadikan gender sebagai suatu isu lintas bidang; 2) masih terbatasnya pengetahuan bagaimana isu gender diterapkan dalam konteks desentralisasi mengingat pemerintah daerah terikat pada peraturan-peraturan khusus, termasuk peraturan mengenai perencanaan dan penganggaran, kewenangan daerah, dan organisasi pemerintah daerah. Sementara di sisi lain, ada Permendagri No.15/2008 tentang Pengarusutamaan Gender di Daerah yang menjadi kebijakan pendukung yang sangat penting bagi implementasi Perencanaan dan Penganggaran Daerah yang Responsif Gender (PPRG); 3) masih dibutuhkannya banyak fasilitator di daerah yang memiliki pengetahuan dan keterampilan teknis yang dapat mendukung pemerintah daerah dalam proses integrasi gender dalam perencanaan dan penganggaran di daerah.

Berdasarkan pengalaman dan pembelajaran tersebut, KPP & PA bekerjasama dengan lembaga kerjasama pemerintah Jerman, GTZ, menyusun Modul Pelatihan Fasilitator untuk Perencanaan dan Penganggaran Daerah yang Responsif Gender (PPRG). GTZ melalui program Tata Pemerintahan yang Baik memiliki cukup banyak pengalaman dalam pendampingan dan pengembangan kapasitas pemerintah daerah untuk perbaikan proses dan konsistensi perencanaan dan penganggaran daerah di mana isu gender menjadi salah satu isu lintas bidang yang diterapkan dalam proses ini. Modul ini diharapkan menjadi rujukan khususnya bagi pemerintah dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya dalam proses penguatan kapasitas untuk mengimplementasikan PPRG melalui peningkatan keterampilan fasilitator

pendamping. Fasilitator tersebut dapat berasal dari Badan Diklat Provinsi, PSW, serta NGO yang memiliki minat pada isu perencanaan dan penganggaran daerah. Modul ini juga akan menjadi rujukan bagi penerbitan Panduan Perencanaan dan Penganggaran Daerah.

Modul pelatihan disusun mengacu pada peraturan dan format perencanaan dan penganggaran di daerah, antara lain Permendagri No. 54/2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8/2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Permendagri No. 59/2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan pendekatan instrumen manajemen berbasis kinerja yang menjadi dasar dalam system perencanaan dan penganggaran di Indonesia. Modul pelatihan fasilitator ini diikuti juga dengan panduan PPRG untuk para perencana dan penyusun anggaran di daerah, yang disusun oleh KPP&PA. Secara substansi, modul pelatihan fasilitator dan panduan adalah sejalan dan saling melengkapi sehingga keduanya hendaknya diperlakukan sebagai dua bagian yang tidak terpisahkan.

Kami berharap Modul Pelatihan untuk Fasilitator PPRG ini benar-benar dapat memberikan kontribusi pada proses penguatan kapasitas di daerah sehingga pemerintah daerah benar-benar dapat mengimplementasikan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender seperti yang diamanatkan dalam berbagai kebijakan yang disebutkan di atas, yang selanjutnya dapat memberikan dampak dan manfaat yang positif bagi pemerintah daerah sendiri, dan terutama kepada masyarakat laki-laki dan perempuan yang menjadi pemangku kepentingan utama dari pelayanan publik. Fasilitator-fasilitator PPRG kemudian dapat mendorong terlaksananya pelatihan untuk para fasilitator di tingkat daerahnya masing-masing sehingga terbangung "*critical mass of gender expertise*" di daerah sebagai pendamping pemerintah daerah di dalam menyusun perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, dengan harapan mengurangi kesenjangan gender dan meningkatkan efektivitas perencanaan daerah yang selama ini dilakukan.

Terima kasih kami sampaikan kepada pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi pikiran dan waktu sehingga modul pelatihan fasilitator PPRG dapat dihasilkan dan siap dipergunakan.

Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Dra. Sri Danti, MA.

Kata Pengantar GIZ

Sejak awal masa desentralisasi perencanaan dan penganggaran yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat menjadi tantangan semua pemerintah provinsi, kabupaten dan kota. Dalam rangka kerjasama Indonesia-Jerman, GTZ — melalui proyek “*Good Local Governance*” (GLG) dan “*Decentralization for Good Governance*” (DecGG) selama tahun 2006-2010 — melakukan penguatan kapasitas dalam perencanaan dan penganggaran bagi pemerintah daerah di lima provinsi, yaitu di Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Timur.

Perencanaan dan Penganggaran Daerah yang Responsif Gender (PPRG) menjadi satu bagian yang terintegrasi dalam proses penguatan kapasitas tersebut. Bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan, antara lain: pelatihan dan *Training of Facilitators* mengenai PPRG untuk SKPD di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, PSW dan LSM, pendampingan menyusun RPJMD yang responsif gender kepada Bappeda dan SKPD, pendampingan kepada BPP dalam menyusun Renstra BPP, dan lokakarya dengan berbagai pemangku kepentingan mengenai strategi integrasi gender dalam perencanaan dan penganggaran di daerah.

Dalam prakteknya, pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender menghadapi beberapa tantangan. Pendekatan anggaran yang responsif gender (ARG) yang dipraktekkan sampai sekarang ini lebih terfokus pada langkah integrasi gender pada penyusunan kegiatan dan penganggaran di tingkat SKPD; sehingga belum banyak terjadi integrasi aspek gender dalam perencanaan. Sebagai konsekwensi Rencana Kerja Anggaran kerap tidak berkorelasi dengan dokumen perencanaan daerah. Hal ini dapat mempersulitkan advokasi untuk alokasi anggaran yang responsif gender. Maka modul ini memilih pendekatan pemaduan gender yang mulai dari perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD dan Renstra SKPD), perencanaan tahunan sampai ke proses penganggaran.

Selanjutnya, jumlah dan kapasitas fasilitator yang benar-benar dapat memberikan pelatihan dan pendampingan PPRG kepada pemerintah daerah masih sangat terbatas. Seringkali fasilitator gender kurang memahami proses perencanaan dan penganggaran di daerah maupun manajemen berbasis kinerja yang menjadi prinsip dasar pekerjaan pelayanan publik. Sebaliknya, aparat pemerintah seringkali kurang memiliki kapasitas analitis untuk mengintegrasikan suatu aspek pengarusutamaan dalam proses rutin perencanaan dan penganggaran.

Modul ini dikembangkan berdasarkan pengalaman pelatihan dan pendampingan kepada pemerintah daerah selama lima tahun dan dimaksudkan untuk mengurangi celah kapasitas tersebut. Pertama, pelatihan ini menekankan pentingnya pendekatan manajemen berbasis kinerja yang dilengkapi dengan banyak pelatihan penyusunan kerangka kinerja serta indikator. Kedua, modul ini berisi beberapa macam praktikum dengan tujuan meningkatkan kapasitas peserta untuk menggali data, mengidentifikasi isu strategis gender dan mengembangkan solusi yang tepat.

Modul ini dikembangkan dalam kerjasama yang erat antara proyek GIZ Decentralization as Contribution for Good Governance (DeCGG), Strengthening of Women's Rights (SWR) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak (KPP&PA). KPP&PA secara signifikan telah melakukan upaya untuk peningkatan kapasitas perencanaan dan penganggaran responsif gender baik di tingkat pusat maupun di daerah. Kami berharap bahwa modul ini dapat menjadi buku pegangan yang bermanfaat untuk para praktisi dimanapun dalam mengembangkan kapasitas yang memadai untuk memastikan bahwa pemerintah daerah dapat memperhatikan keperluan lelaki dan perempuan sesuai dengan kebutuhan masing-masing dalam kebijakan dan program pembangunan di daerah.

Principal Advisor DeCGG dan SWR



Jörg Haas

Ucapan Terima Kasih

Banyak pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan modul ini. Konsep modul ini dikembangkan oleh tim *Decentralization as a Contribution for Good Governance (Sub-national Implementation)* yang dipimpin oleh Sascha Rusgiarto dan tim *Strengthening Women's Rights* yang dipimpin oleh Georgia Wimhöfer.

Struktur modul serta isinya disusun pada suatu lokakarya yang dilaksanakan pada tanggal 14-16 Oktober 2010. Tanpa partisipasi dengan semangat tinggi dari peserta dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP&PA), dari Kantor Pemberdayaan Perempuan Provinsi yang mempunyai pengalaman langsung dengan proses PPRG, serta masukan dari mitra kerja dari kalangan lembaga swadaya masyarakat dan teman kerja se-GTZ dari DI Yogyakarta dan Kalimantan Timur, modul ini tidak dapat bersifat praktis dan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

Selain kepada para penyusun, kami mengucapkan terima kasih pada Hartian Silawati, Georgia Wimhöfer dan Dati Fatimah yang telah melakukan penyuntingan dan penyesuaian akhir terhadap isi modul. Terima kasih kepada Syahroni, Provincial Coordinator, DeCGG Project Office Jawa Tengah, dan Astia Dendi, Senior Advisor, DeCGG untuk masukan teknis. Terima kasih pula kepada Veven Sp Wardhana yang membantu merapikan bahasa, serta Myrna Butar-Butar yang melakukan berbagai pekerjaan teknis yang mendukung terbitnya modul ini.

Penyusun adalah:

Hertomo Heroe, Deputy I PUG Bidang Ekonomi, KPP & PA, **Heru P. Kasidi**, Asdep IV/I Gender Ilmu Pengetahuan & Teknologi, KPP & PA, **Sunarti**, Asdep V / I Gender Infrastruktur, KPP & PA, **Siti Khadijah Nasution**, PLH Kep. Roren/Kepala Biro Umum, KPP & PA, **Endah Prihartiningtyas**, Staf Deputy I, KPP & PA, **Agustina Erni**, Staf Deputy II, KPP & PA, **Rohika Kurniadi**, Staf Deputy II, KPP & PA, **Valentina Ginting**, Staf Deputy V, KPP & PA, **Carolina Pudyastuti**, Kasubid PUG Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) D. I. Jogjakarta, **Emma Rachmawati**, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Jawa Tengah, **Nurwi Mayasri F**, BAPPEDA Prov. Jawa Tengah, **Mahrta**, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kalimantan Timur, **Dati Fatimah**, Aksara, **Rinusu**, Primacon Cipta Mandiri (PCM)/Konsultan ARG, **Indra Kertati**, Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Sumberdaya Pembangunan (LPPSP) Jawa Tengah, **Kartika Hermawati**, Provincial Coordinator, DecGG Project Office DI Yogyakarta, **Roto Priyono**, Provincial Coordinator, DeCGG Project Office Samarinda, **Hartian Silawati**, Senior Advisor SWR, **Georgia Wimhöfer**, Team Leader SWR.

Daftar Isi

Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3
Kata Pengantar GTZ	5
Ucapan Terima Kasih	7
Daftar Isi	8
Daftar Peristilahan dan Singkatan	12
Daftar Perundang-undangan	16
Persiapan Pelatihan	17
Kurikulum Modul Pelatihan	19
BAGIAN 1 Pengantar Analisis Gender	25
SESI 1 Perkenalan	26
A. Proses	26
Langkah 1: Perkenalan (30 menit)	26
B. Alat Bantu	27
I. Lembar Profil Diri	27
SESI 2 Pengantar Pelatihan	28
A. Proses	28
Langkah 1: Presentasi: Tujuan, Alur, Agenda, dan Pendekatan Pelatihan (10 menit)	28
Langkah 2: Pre tes (10 menit)	28
Langkah 3: Prinsip, Pendekatan, dan Teknik Memfasilitasi (15 menit)	28
Langkah 4: Pelaporan Pelajaran Hari Sebelumnya (10 menit)	29
B. Alat Bantu	30
I. Presentasi	30
II. Bahan Bacaan	32
III. Blanko Tugas Kelompok untuk Pelaporan Pelajaran	34
SESI 3 Manajemen Berbasis Kinerja	35
A. Proses	35
Langkah 1: Presentasi: Manajemen Berbasis Kinerja (45 menit)	35
Langkah 2: Praktikum: Penyusunan Tujuan Strategis, Outcome, Output, dan Kegiatan (60 menit)	36
Langkah 3: Presentasi Hasil Kelompok dalam Marketplace (30 menit)	36
B. Alat Bantu	37
I. Presentasi	37
II. Panduan Praktikum	38
III. Bahan Bacaan	39
SESI 4 Gender dan Pembangunan	42
A. Proses	42
Langkah 1: Presentasi: Gender, Kesetaraan Gender, dan Indikator (15 menit)	42
Langkah 2: Praktikum (30 menit)	42
B. Alat Bantu	43
I. Presentasi	43
II. Panduan Praktikum	44
SESI 5 Konsep Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	46
A. Proses	46
Langkah 1: Curah Gagasan (45 menit)	46
Langkah 2: Presentasi tentang PUG dan Pemberdayaan Perempuan (45 menit)	47
Langkah 3: Diskusi Fish Bowl (45 menit)	47

B. Alat Bantu	48
I. Lembar Kerja	48
II. Presentasi	48
III. Bahan Bacaan	51
SESI 6 Data Pembuka Wawasan dan Analisis Gender	52
A. Proses	52
Langkah 1: Presentasi: Data Pembuka Wawasan (30 menit)	52
Langkah 2: Alat analisis metode Harvard (15 menit)	53
Langkah 3: Pratikum: Memaknai Data untuk Analisis Gender dengan Metode Harvard (30 menit)	53
Langkah 4: Presentasi: Alat Analisis Gender Analysis Pathway (GAP) (30 menit)	53
Langkah 5: Pratikum: Melaksanakan GAP untuk Suatu Kegiatan (60 menit)	53
B. Alat Bantu	54
I. Presentasi	54
II. Panduan Pratikum	57
III. CONTOH APLIKASI GAP	59
BAGIAN 2 Perencanaan Daerah yang Responsif Gender	61
SESI 7 Mekanisme Perencanaan di Daerah	62
A. Proses	62
Langkah 1: Curah Gagasan (20 menit)	62
Langkah 2: Presentasi: Pendekatan Perencanaan dan Sinkronisasi antara Perencanaan dan Penganggaran (40 menit)	63
Langkah 3: Pratikum: Mengembangkan Isu Strategis dalam Perencanaan (30 menit)	63
B. Alat Bantu	64
I. Presentasi	64
II. Panduan Pratikum	68
III. Bahan Bacaan untuk Peserta	69
SESI 8 Perencanaan yang Responsif Gender	72
A. Proses	72
Langkah 1: Presentasi tentang Perencanaan yang Responsif Gender (20 menit)	72
Langkah 2: Pratikum: Perumusan Isu Strategis dan Perencanaan Berbasis Kinerja Responsif Gender (50 menit)	73
Langkah 3: Presentasi dengan Marketplace (20 menit)	73
B. Alat Bantu	74
I. Presentasi	74
II. Panduan Pratikum	75
III. Bahan Bacaan Peserta	76
SESI 9 Integrasi Gender dalam Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah	78
A. Proses	78
Langkah 1: Presentasi: Integrasi Gender dalam Dokument Perencanaan Jangka Menengah (30 menit)	78
Langkah 2: Pratikum: Memasukkan Hasil GAP dalam Format Dokumen Jangka Menengah (45 menit)	79
Langkah 3: <i>Marketplace</i> (45 menit)	79
B. Alat Bantu	80
I. Presentasi	80
II. Panduan Pratikum	83
SESI 10 Gender dalam Penyusunan Perencanaan Tahunan	84
A. Proses	84
Langkah 1: Presentasi (30 menit)	84
Langkah 2: Pratikum Penyusunan RKPD dan Renja SKPD (60 menit)	85
Langkah 3: <i>Marketplace</i> (45 menit)	85

B. Alat Bantu	86
I. Presentasi	86
II. Panduan Praktikum	87
SESI 11 Integrasi Gender dalam Proses Musrenbang	88
A. Proses	88
Langkah 1: <i>Roleplay</i> Musrenbang (30 menit)	88
Langkah 2: Presentasi Proses Musrenbang dan Integrasi Gender (30 menit)	89
Langkah 3: Praktikum: Integrasi Gender dalam Proses Musrenbang (30 menit)	89
B. Alat Bantu	90
I. Presentasi	90
II. Panduan Praktikum	92
BAGIAN 3 Penganggaran Daerah yang Responsif Gender	93
SESI 12 Konsep dan Mekanisme Penganggaran Daerah	94
A. Proses	94
Langkah 1: Presentasi: Konsep, Proses dan Dokumen Kunci Penganggaran (30 menit)	94
Langkah 2: Praktikum: Identifikasi Aktor Kunci dalam Penganggaran Daerah (30 menit)	95
Langkah 3: Pameran Dokumen-dokumen Kunci Penganggaran Daerah (30 menit)	95
B. Alat Bantu	96
I. Presentasi	96
II. Panduan Praktikum	99
III. Bahan Bacaan	100
SESI 13 Konsep Anggaran Responsif Gender	102
A. Proses	102
Langkah 1: Permainan: <i>Choose Your Spot</i> (15 menit)	102
Langkah 2: Presentasi: Anggaran Kinerja, Anggaran Responsif Gender (ARG) dan Kategori ARG (15 menit)	102
Langkah 3: Pratikum: Identifikasi Kegiatan Responsif Gender (30 menit)	103
Langkah 4: Presentasi dengan Metode <i>Cross-Check</i> Antarkelompok (15 menit)	103
B. Alat Bantu	104
I. Presentasi	104
II. Panduan Praktikum	106
III. Bahan Bacaan	107
SESI 14 Instrumen Anggaran Responsif Gender	109
A. Proses	109
Langkah 1: Presentasi: Fungsi Pernyataan Anggaran Gender (PAG) dan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) (25 menit)	109
Langkah 2: Pameran Format PAG dan KAK (20 menit)	109
Langkah 3: Praktikum: Penyusunan PAG dan KAK (60 menit)	110
Langkah 4: Presentasi Melalui <i>Marketplace</i> (30 menit)	110
B. Alat Bantu	111
I. Presentasi	111
II. Panduan Praktikum	114
III. Bahan Bacaan	115
SESI 15 Integrasi Gender Dalam Dokumen KUA-PPAS	118
A. Proses	118
Langkah 1: Identifikasi Aktor Kunci: <i>Roleplay</i> tentang Penyusunan KUA-PPAS (30 menit)	118
Langkah 2: Presentasi: Integrasi Gender dalam Dokumen KUA-PPAS (30 menit)	119
Langkah 3: Curah Gagasan: Integrasi Gender dalam KUA-PPAS (30 menit)	119
B. Alat Bantu	120
I. Panduan	120
II. Presentasi	121

SESI 16	Integrasi Gender dalam Dokumen RKA-SKPD	122
A.	Proses	122
	Langkah 1: Presentasi: RKA-SKPD dan Langkah Integrasi Gender (30 menit)	122
	Langkah 2: Praktikum: Penyusunan RKA-SKPD (40 menit)	123
	Langkah 3: Presentasi: Hasil Kerja Kelompok (20 menit)	123
B.	Alat Bantu	124
	I. Presentasi	124
	II. Panduan Praktikum	125
	III. Bahan Bacaan	126
BAGIAN 4	Pemantauan dan Evaluasi, Advokasi PPRG, Kurikulum dan Evaluasi Pelatihan	127
SESI 17	Fungsi Pemantauan, Evaluasi dan Indikator	128
A.	Proses	128
	Langkah 1: Curah gagasan: Pemantauan dan Evaluasi di Daerah (15 menit)	128
	Langkah 2: Presentasi: Fungsi Pemantauan, Evaluasi dan Indikator (60 menit)	128
B.	Alat Bantu	129
	I. Presentasi	129
SESI 18	Sistem Pemantauan dan Evaluasi PPRG di Daerah	132
A.	Proses	132
	Langkah 1: Presentasi: Pemantauan dan Evaluasi Keberhasilan PPRG (45 menit)	132
	Langkah 2: Praktikum: Persiapan Rencana Pemantauan PPRG (45 menit)	133
B.	Alat Bantu	134
	I. Presentasi	134
	II. Panduan Praktikum	137
	III. Bahan Bacaan	138
SESI 19	Strategi Advokasi dan Promosi PPRG	140
A.	Proses	140
	Langkah 1: Presentasi: Skema Strategi Advokasi (45 menit)	140
	Langkah 2: Identifikasi Langkah Promosi PPRG di dalam Pemerintahan Daerah (45 menit)	141
B.	Alat Bantu	142
	II. Panduan Pratikum	143
SESI 20	Penyusunan Kurikulum Pelatihan dan Evaluasi Pelatihan	144
A.	Proses	144
	Langkah 1: Penyusunan Kurikulum Pelatihan (60 menit)	144
	Langkah 2: Post Tes (15 menit)	144
	Langkah 3: Evaluasi terhadap Pelaksanaan Pelatihan (15 menit)	145
B.	Alat Bantu	146
	I. Panduan Praktikum	146
Daftar Pustaka		147

Daftar Peristilahan dan Singkatan

Istilah	Singkatan	Pengertian
Analisis Gender		Analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	APBD	Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah
Anggaran Responsif Gender	ARG	
Angka Partisipasi Kasar	APK	Rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu
Angka Partisipasi Murni	APM	Persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama, dan menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	DPRD	
Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD	DPA-SKPD	Dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku bendahara umum daerah
Forum SKPD		Merupakan forum yang berhubungan dengan fungsi/subfungsi, kegiatan/sektor dan lintas sektor, merupakan wadah bersama antarpelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD sebagai upaya mengisi Rencana Kerja SKPD yang tatacara penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD terkait
Gender		Konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women	CEDAW	Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan
Gender Analysis Pathway	GAP	Satu alat analisis gender yang dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia dan pemangku kepentingan lain pada tahun 2000 dan direkomendasikan penggunaannya dalam beberapa kebijakan
Gender Development Index	GDI	Indeks Pembangunan Gender
Gender Empowerment Index	GEM	Indeks Pemberdayaan Gender

Istilah	Singkatan	Pengertian
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH	GIZ	The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH dibentuk pada 1 January 2011. GIZ menyatukan keahlian panjang Deutscher Entwicklungsdienst (DED) GmbH (pelayanan pembangunan Jerman), Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH (kerjasama teknis Jerman), dan Inwent (peningkatan kapasitas internasional, Jerman).
Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH	GTZ	The Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH (kerjasama teknis Jerman) melaksanakan proyek-proyek pembangunan atas nama pemerintah federal Jerman dan pihak lain. Klien utamanya adalah Kementerian Federal Jerman untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ). Mulai 1 Januari 2011, GTZ telah menjadi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. GIZ menyatukan keahlian panjang Deutscher Entwicklungsdienst (DED) GmbH (pelayanan pembangunan Jerman), Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH (kerjasama teknis Jerman), dan Inwent (peningkatan kapasitas internasional, Jerman).
Indikator Kinerja		Alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan
Indikator Kinerja Utama	IKU	Ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi
Kegiatan		Bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personel (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (<i>input</i>) untuk menghasilkan keluaran (<i>output</i>) dalam bentuk barang/jasa
Kekerasan dalam Rumah Tangga	KDRT	
Kerangka Acuan Kegiatan (<i>Terms of Reference</i>)	KAK	Kerangka Acuan Kegiatan berfungsi sebagai pijakan atau kerangka acuan dalam sebuah program/ kegiatan.
Kerangka anggaran		Rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang perlu dibiayai oleh APBD untuk mencapai tujuan pembangunan kabupaten/kota
Kerangka kebijakan		Rencana kegiatan melalui pengaturan yang mendorong partisipasi masyarakat maupun lembaga terkait lainnya untuk mencapai tujuan pembangunan kabupaten/kota
Kinerja		Keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur
Kebijakan Umum APBD - Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	KUA-PPAS	Kebijakan Umum APBD adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati DPRD.

Istilah	Singkatan	Pengertian
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	LAKIP	Dokumen yang berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD	LKPJ	Laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah	LPPD	Laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh kepala daerah kepada Pemerintah
Manajemen Berbasis Kinerja	MBK	Suatu pendekatan dalam manajemen pembangunan yang tingkat keberhasilannya didasarkan pada ukuran kinerja berupa <i>ouput</i> , <i>outcome</i> dan <i>impact</i>
Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Musrenbang	Forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/ Kelurahan	Musrenbang Desa/ Kelurahan	Forum musyawarah tahunan antarpelaku desa/kelurahan (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa/kelurahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan tahunan anggaran berikutnya
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten/ Kota	Musrenbang Kabupaten/ Kota	Adalah musyawarah antarpelaku (<i>stakeholder</i>) kabupaten/kota untuk mematangkan rancangan SKPD kabupaten/kota berdasarkan Rencana-SKPD hasil Forum SKPD dengan cara meninjau keserasian antara rancangan Renja-SKPD yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran Rancangan SKPD
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Musrenbang Kecamatan	Forum musyawarah tahunan antarpelaku kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari desa/kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas desa/kelurahan di kecamatan tersebut sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota pada tahun berikutnya
Musyawarah Perencanaan Pembangunan RPJMD	Musrenbang RPJMD	Forum antarpelaku untuk membahas rancangan RPJM Daerah dan mendapatkan komitmen para pemangku kepentingan pembangunan yang menjadi masukan dalam penyempurnaan rancangan RPJM Daerah
Pernyataan Anggaran Gender (<i>Gender Budget Statement</i>)	PAG	Pernyataan Anggaran Gender adalah dokumen yang menginformasikan suatu kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang ada, dan apakah telah dialokasikan dana pada kegiatan bersangkutan untuk menangani permasalahan gender tersebut.
Pagu indikatif		Ancar-ancur pagu anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja SKPD
Pagu sementara		Pagu anggaran yang didasarkan atas kebijakan umum dan prioritas anggaran hasil pembahasan pemerintah daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD
Pengarusutamaan Gender	PUG	Strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah

Istilah	Singkatan	Pengertian
Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender	PPRG	Serangkaian cara dan pendekatan untuk mengintegrasikan gender di dalam proses perencanaan dan penganggaran. Perencanaan yang responsif gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki. Sementara anggaran yang responsif gender adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	PPAS	Rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati dengan DPRD
Program SKPD		Penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD
Rencana Kerja Pemerintah Daerah	RKPD	Dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu (1) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu kepada RKP Nasional, memuat kerangka ekonomi daerah, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah	RKA-SKPD	Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD yang merupakan penjabaran dari RKPD dan Renstra SKPD yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah	Renstra SKPD	Dokumen perencanaan SKPD untuk periode lima tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	RPJMD	Dokumen perencanaan pemerintah daerah untuk periode lima (5) tahun yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional	RPJMN	Dokumen perencanaan nasional untuk periode lima tahun
Rencana Pembangunan Jangka Panjang	RPJP	Dokumen perencanaan nasional untuk periode dua puluh tahun
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah	RPJPD	Dokumen perencanaan pemerintah daerah untuk periode dua puluh tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP Nasional
Satuan Kerja Perangkat Daerah	SKPD	Perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran
Tim Anggaran Pemerintah Daerah	TAPD	Tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan
Urusan Wajib Pemerintah Daerah		Fungsi-fungsi pemerintah yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat

Daftar Perundang-undangan

Nama Peraturan	Relevansi dengan PPRG
UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Pemberdayaan perempuan sebagai urusan wajib daerah
UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	<ul style="list-style-type: none"> Keterpaduan sistem perencanaan dan penganggaran nasional dan daerah
UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	<ul style="list-style-type: none"> Penerapan anggaran berbasis kinerja di daerah
UU No. 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan antara Pusat dan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Konsep dan formula bagi hasil antara pusat dan daerah
PP No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Konsep dan struktur pelaporan kinerja pemerintah daerah secara vertikal dan horisontal
PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	<ul style="list-style-type: none"> Pembagian kewenangan antara pusat dan daerah Isu lintas
PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Kelembagaan dan tugas pokok dan fungsinya Perumpunan untuk urusan pemberdayaan perempuan
PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pemantanan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Outline dokumen perencanaan daerah Penggunaan analisis gender dalam perencanaan pembangunan
Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional	<ul style="list-style-type: none"> PUG dalam semua tahapan perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan daerah
Perpres No. 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014	<ul style="list-style-type: none"> PUG sebagai salah satu dari tiga kebijakan pengarusutamaan dalam kebijakan pembangunan
Permendagri No. 13 Tahun 2006, direvisi melalui Permendagri No. 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Daftar kode rekening untuk urusan wajib dan pilihan di daerah Format dokumen keuangan (KUA-PPAS dan RKA-SKPD)
Permendagri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Instruksi implementasi PUG di daerah Konsep perencanaan dan penganggaran responsif gender Kelembagaan PUG

Persiapan Pelatihan

Sebagai pelatihan dengan pendekatan pendidikan orang dewasa, beberapa prasyarat berikut menjadi bagian yang menentukan efektivitas metode dan pendekatan pelatihan. *Check-list* berikut bisa menjadi alat untuk mengecek ketersediaan perangkat pendukung yang penting bagi pelatihan.

1. Peserta

- Pastikan bahwa peserta sudah melalui proses seleksi dan memenuhi kualifikasi minimal yang disyaratkan untuk mengikuti pelatihan ini. Proses ini akan sangat menentukan keberhasilan pelatihan, karena pelatihan ini bukanlah pelatihan bagi para pemula dan pengalaman partisipan menjadi bagian penting dari proses pembelajaran. Kriteria dasar untuk peserta adalah: 1) memiliki pemahaman yang cukup mengenai sistem perencanaan dan penganggaran daerah, 2) memiliki pemahaman yang memadai mengenai manajemen berbasis kinerja, 3) memiliki pemahaman tentang isu gender dan PUG serta alat analisis gender, 4) memiliki pengalaman dalam memberikan pelatihan atau pendampingan kepada pemerintah daerah dalam hal perencanaan dan penganggaran daerah, maupun dalam implementasi pengarusutamaan gender (PUG).
- Informasi tentang pendekatan, agenda dan aspek teknis pelatihan kepada peserta. Ini untuk menghindarkan harapan yang tidak tepat atau berlebihan terhadap pelatihan.
- Jumlah peserta maksimal adalah 25 orang, sehingga memungkinkan fasilitator mengelola proses pelatihan dengan baik. Jumlah peserta yang terlalu banyak perlu dihindari, karena bisa membuat proses pelatihan menjadi tidak efektif.
- Peserta akan dibagikan dalam kelompok kerja yang ditetapkan oleh fasilitator sebelum pelatihan berdasarkan kompetensi, pengalaman sebelumnya, dan instansi berasal para peserta. Komposisi kelompok tersebut tidak akan berubah selama pelatihan untuk memperkuat pengalaman belajar bersama.

2. Ruangan Pelatihan

- Penggunaan metode pembelajaran orang dewasa mensyaratkan kebutuhan akan ruang pelatihan yang cukup luas. Ini diperlukan sehingga penggunaan metode-metode pembelajaran seperti *role-play* dan *game* bisa dilakukan. Perhatikan bahwa ruangan yang terlalu sempit akan menyulitkan peserta untuk bergerak, walaupun ruangan yang terlampaui luas juga perlu dihindari karena bisa mengganggu efektivitas proses pembelajaran.
- Selain diperlukan satu ruangan yang besar untuk pleno, pelatihan juga memerlukan minimal dua ruang yang lebih kecil yang akan digunakan sebagai tempat untuk melakukan praktikum
- Aspek teknis dari ruangan seperti bentuk ruangan yang terlalu memanjang kalau bisa dihindari, atau disiasati dengan *layout* ruangan yang pas. Usahakan memilih ruangan yang tidak membatasi partisipasi dalam berbagai bentuk berikut ini: pilar yang menghalangi di tengah ruangan, atau ruangan yang terlampaui gelap atau pengap. Pastikan terdapat ruang yang leluasa bagi fasilitator, yang memungkinkannya bergerak.
- *Setting* ruangan seperti kursi dan meja juga perlu diperhatikan. *Setting* ruangan dengan format meja bundar memungkinkan peserta untuk bisa saling terlibat dan mengambil peran dalam metode-metode partisipatoris.

3. Perlengkapan yang Dibutuhkan

- Kebutuhan perlengkapan yang standar untuk pelaksanaan pelatihan ini antara lain:
 - a. *Laptop, LCD projector, printer*
 - b. Kamera
 - c. Papan *pinboard*, 8 buah

- d. Kertas kartu metaplan, minimal 4 warna dalam beragam bentuk, dengan jumlah minimal 600 lembar.
- e. Paku untuk menempelkan kertas kartu metaplan
- f. Spidol aneka warna,
- g. Gunting, 8 buah
- h. Selotip dan lem
- i. Media massa/koran harian berjumlah sekitar 40 eksemplar, kalau bisa beragam jenis media dan tanggalnya
- Bahan dan alat bantu pelatihan sudah digandakan dan diperoleh peserta sebelum pelatihan dilaksanakan.

4. Fasilitator

Pelatihan ini membutuhkan tiga orang fasilitator yang telah mengikuti pelatihan ini sebelumnya, dan mempunyai pemahaman yang kuat tentang materi modul ini.

5. Waktu untuk Persiapan

Dua minggu sebelum hari penyelenggaraan pelatihan, fasilitator maupun para peserta sudah ditetapkan secara pasti, termasuk tempat penyelenggaraan pelatihan. Berbagai macam perlengkapan yang dibutuhkan juga sudah harus siap tiga hari sebelum memulai pelatihan.

<i>Kegiatan Persiapan</i>	<i>Waktu Persiapan</i>
1. Penyusunan kerangka acuan kegiatan pelatihan	Tiga minggu sebelum pelaksanaan pelatihan
2. Identifikasi fasilitator pelatihan, termasuk penyusunan TOR dan aspek administrasinya	Tiga minggu sebelum pelatihan
3. Identifikasi awal peserta pelatihan dan pengiriman undangan kepada peserta	Tiga minggu sebelum pelatihan
4. Penetapan fasilitator dan peserta; tempat penyelenggaraan	Dua minggu sebelum pelatihan
5. Penyiapan kebutuhan pelatihan (materi/bahan fotokopi, bahan presentasi dan alat bantu lainnya, perlengkapan, dll)	Satu minggu hingga tiga hari sebelum pelatihan

Kurikulum Modul Pelatihan

A. Tujuan Umum

Menyediakan modul pelatihan yang dapat digunakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan lain dalam upaya pengembangan kapasitas untuk mengimplementasikan strategi PUG dalam Perencanaan dan Penganggaran di Daerah.

B. Output

Setelah menggunakan modul ini, para pengguna diharapkan memiliki:

1. Pemahaman mengenai manajemen berbasis kinerja, gender dalam pembangunan, pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, data dan alat analisis gender, serta mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah, pemantauan dan evaluasi PPRG, serta advokasi dan promosi PPRG,
2. Keterampilan teknis mengintegrasikan perspektif gender dalam proses dan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah serta kerangka pemantauan dan evaluasi PPRG,
3. Keterampilan menyusun strategi advokasi dan promosi PPRG,
4. Keterampilan sebagai fasilitator pendamping SKPD dalam mengimplementasikan PPRG.

C. Pengguna Modul

Modul ini dirancang untuk fasilitator yang akan memfasilitasi proses pelatihan PPRG. Fasilitator ini hendaknya memiliki kompetensi dasar sebagai berikut:

1. Memiliki pemahaman yang memadai mengenai konsep-konsep gender dan pengarusutamaan gender,
2. Memiliki pemahaman dasar mengenai konsep manajemen berbasis kinerja, metode dan alat analisis gender, termasuk Gender Analysis Pathway (GAP),
3. Memiliki pemahaman yang memadai mengenai peraturan dan mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah,
4. Memiliki pengalaman dan keterampilan sebagai fasilitator.

D. Pendekatan Modul

Modul Pelatihan ini dirancang dengan prinsip pembelajaran orang dewasa (POD) yang menekankan pada kreativitas dan interaksi peserta dalam membangun pengetahuan dan keterampilan bersama. Secara substansi, modul ini akan bertumpu pada tiga aspek pembelajaran yakni:

1. Presentasi yang bertujuan untuk memberikan pengantar/input terhadap satu tema tertentu,
2. Curah gagasan/diskusi interaktif antara fasilitator dan peserta yang bertujuan untuk memperdalam materi berdasarkan pengalaman,
3. Praktikum dalam kelompok, yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis atas materi-materi tertentu.

E. Durasi Pelaksanaan: Lima Hari Kerja

Agenda pelatihan selama lima hari dibagi sebagai berikut:

Hari I: menjadi pengantar dan pembuka untuk masuk ke dalam pelatihan, mengantarkan kepada konsep gender, pengarusutamaan gender, dan pemberdayaan perempuan. Pada hari ini, waktu

juga akan banyak dialokasikan untuk pembahasan manajemen berbasis kinerja (MBK) yang menjadi instrumen utama dalam keseluruhan proses PPRG. Pada akhirnya, juga akan masuk ke dalam konsep data dan analisis gender, utamanya *Gender Analysis Pathway* (GAP)

Hari II: melanjutkan analisis dengan GAP, mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah, konsep perencanaan responsif gender dan bagaimana langkah integrasi gender dalam perencanaan strategis di tingkat daerah.

Hari III: berisi langkah integrasi gender dalam perencanaan tahunan dan bagaimana integrasinya dalam proses Musrenbang. Pada paruh kedua hari ketiga, akan masuk ke dalam konsep dan mekanisme penganggaran daerah.

Hari IV: konsep anggaran responsif gender, instrumen anggaran responsif gender, dan bagaimana integrasinya dalam dokumen penganggaran daerah.

Hari V: konsep dan fungsi pemantauan dan evaluasi dan bagaimana posisinya dalam perencanaan dan penganggaran di daerah. Pada paruh kedua akan diisi dengan strategi advokasi dan promosi PPRG, evaluasi, dan perumusan rencana tindak lanjut.

F. Peserta Pelatihan

Maksimal 25 orang

G. Fasilitator Pelatihan

Tiga orang

H. Isi Modul

Bagian	Sesi	Tujuan	Metode	Waktu	Alat Bantu
I. Pengantar Analisis Gender	1. Perkenalan	Saling mengenal, mencairkan suasana, dasar pembentukan kelompok awal	Game, pengisian lembar profil diri dengan foto yang dilakukan di tempat pelatihan	30 menit	I. Lembar Profil Diri
	2. Pengantar Pelatihan	Memahami tujuan pelatihan, menyepakati alur dan agenda, mengukur pemahaman awal, mengetahui hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk pelatihan	Presentasi, Diskusi Interaktif	45 menit	I. Presentasi 1. Tujuan, Alur, Agenda dan Pendekatan Pelatihan II. Bahan Bacaan 1. Agenda Pelatihan 2. Prinsip dan Teknik Memfasilitasi III. Blangko Tugas Kelompok
	3. Manajemen Berbasis Kinerja dalam Pembangunan	Memahami konsep manajemen berbasis kinerja (MBK) sebagai dasar pendekatan dalam pengelolaan pembangunan di Indonesia dan dapat menyusun kerangka kinerja dari kegiatan, output sampai outcome dan dampak	Presentasi, media review, kerja kelompok, market-place	135 menit	I. Presentasi 1. Manajemen Berbasis Kinerja II. Panduan Praktikum 1. Lembar Pertanyaan Kunci untuk Praktikum Penyusunan Kerangka kinerja III. Bahan Bacaan 1. Manajemen Berbasis Kinerja: Informasi Tambahan
	4. Gender dan Pembangunan	Meningkatkan kepekaan peserta tentang dampak pembangunan terhadap perempuan dan laki-laki	Presentasi, Praktikum	45 menit	I. Presentasi 1. Gender, Kesetaraan Gender dan Indikator Kesetaraan Gender II. Panduan Praktikum 1. Lembar Tugas Kelompok Praktikum 1 2. Lembar Tugas Kelompok Praktikum 2
	5. Konsep Pengarus-utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Memahami PUG sebagai strategi lintas bidang Memahami pemberdayaan perempuan sebagai salah satu urusan wajib Memahami PUG sebagai bagian dari strategi pemenuhan HAM	Praktikum menggunakan kertas kartu metaplan, Fish bowl, Presentasi	135 menit	I. Lembar Kerja 1. Curah Gagasan PUG dan Pemberdayaan Perempuan II. Presentasi 1. Konsep Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan III. Bahan Bacaan 1. Kode Rekening Program dan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan

Bagian	Sesi	Tujuan	Metode	Waktu	Alat Bantu
	6. Data Pembuka Wawasan dan Analisis Gender	Memahami dan bisa mengidentifikasi data pembuka wawasan Peserta memahami analisis gender Menerapkan GAP sebagai alat analisis dalam perencanaan pembangunan Menghubungkan data gender dan aplikasi GAP dengan kerangka kinerja	Presentasi, Praktikum	165 menit	I. Presentasi 1. Data Pembuka Wawasan 2. Alat Analisis Harvard 3. Alat Analisis Gender Analysis Pathway (GAP) II. Panduan Praktikum 1. Memaknai Data 2. Memaknai Data untuk Analisis Gender Metode Harvard 3. Gender Analysis Pathway (GAP) III. Contoh Aplikasi GAP
II. Perencanaan yang Responsif Gender	7. Mekanisme Perencanaan di Daerah	Memperkuat pemahaman mengenai konsep dan mekanisme perencanaan di daerah, serta terampil menyusun indikator perencanaan berbasis kinerja	Curah Gagasan, Presentasi, Praktikum	90 menit	I. Presentasi 1. Pendekatan Perencanaan dan Sinkronisasi antara Perencanaan dan Penganggaran II. Panduan Praktikum 1. Mengembangkan Isu Strategis dalam Perencanaan III. Bahan Bacaan untuk Peserta 1. Muatan Dokumen Perencanaan Daerah 2. Skema Penyusunan Perencanaan Daerah 3. Tahapan Musrenbang di Daerah
	8. Perencanaan yang Responsif Gender	Memperkuat pemahaman mengenai konsep perencanaan responsif gender beserta kerangka regulasi serta membangun keterampilan dalam merumuskan isu strategis gender yang menjadi dasar dalam menyusun perencanaan responsif gender serta indikator kinerjanya	Presentasi, Praktikum	90 menit	I. Presentasi 1. Perencanaan yang Responsif Gender II. Panduan praktikum 1. Perumusan Isu Strategis Perencanaan Berbasis Kinerja Responsif Gender III. Bahan Bacaan untuk Peserta 1. Contoh Penyusunan Isu Strategis Gender 2. Contoh Kerangka Kinerja
	9. Integrasi Gender dalam Dokumen Perencanaan Jangka Menengah	Memperkuat keterampilan memasukkan perspektif gender dalam dokumen RPJMD dan Renstra SKPD dengan menggunakan hasil GAP, serta memahami kaitan RPJMD dengan Renstra SKPD	Presentasi, Fasilitator, Praktikum integrasi gender dalam dokumen perencanaan jangka menengah	120 menit	I. Presentasi 1. Integrasi Gender dalam dokumen Perencanaan Jangka Menengah 2. Integrasi Hasil GAP dalam Dokumen Perencanaan dalam dokumen II. Panduan Praktikum 1. Integrasi hasil GAP dalam Dokumen Renstra SKPD
	10. Integrasi Gender dalam Dokumen Perencanaan Tahunan	Memperkuat keterampilan memasukkan perspektif gender dalam dokumen perencanaan tahunan	Presentasi, Praktikum Penyusunan Renja	135 Menit	I. Presentasi 1. Pemaduan Hasil GAP dalam Perencanaan Tahunan Daerah II. Panduan praktikum 1. Integrasi Gender dalam Dokumen Renja SKPD

Bagian	Sesi	Tujuan	Metode	Waktu	Alat Bantu
	11. Integrasi Gender dalam Proses Musrenbang	Memahami proses Musrenbang dan mengidentifikasi peluang mengintegrasikan isu gender dalam proses Musrenbang	Role Play, Presentasi	90 menit	I. Presentasi 1. Integrasi Gender dalam Proses Musrenbang II. Panduan Praktikum 1. Panduan <i>roleplay</i> 2. Curah Gagasan Pengalaman Integrasi Gender dalam Musrenbang III. Bahan Bacaan 1. <i>Check List</i> Integrasi Gender dalam Musrenbang
III. Penganggaran yang Responsif Gender	12. Mekanisme Penganggaran Daerah	Memperkuat pemahaman mengenai konsep penganggaran di daerah	Presentasi dan diskusi interaktif	90 menit	I. Presentasi 1. Konsep, Proses dan Dokumen Kunci Penganggaran II. Panduan Praktikum 1. Identifikasi Aktor Kunci dalam Penganggaran Daerah III. Bahan Bacaan 1. Muatan Dokumen Penganggaran Daerah
	13. Konsep Anggaran Responsif Gender	Memberikan pemahaman mengenai konsep ARG	Permainan (choose your spot), presentasi, diskusi interaktif, praktikum	75 menit	I. Presentasi 1. Anggaran Kinerja, Anggaran Responsif Gender (ARG) dan Kategori ARG II. Panduan Praktikum 1. Choose <i>Your Spot</i> 2. Identifikasi Kegiatan Responsif Gender III. Bahan Bacaan 1. Kategori Anggaran Responsif Gender 2. Contoh Klasifikasi ARG dalam Beberapa Urusan Pemerintah Daerah
	14. Instrumen Anggaran Responsif Gender	Meningkatkan pemahaman dan kecakapan akan instrumen kunci anggaran responsif gender	Presentasi, Praktikum	135 menit	I. Presentasi tentang: 1. Fungsi Pernyataan Anggaran Gender (PAG) dan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) II. Lembar Kerja 1. Penyusunan PAG dan KAK III. Bahan Bacaan 1. Contoh Aplikasi PAG 2. Contoh Aplikasi KAK
	15. Integrasi Gender dalam Dokumen KUA-PPAS	Mengembangkan keterampilan untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam dokumen KUA-PPAS	Presentasi, Role Play dan diskusi interaktif	90 menit	I. Panduan Praktikum 1. <i>Roleplay</i> tentang Penyusunan KUA-PPAS II. Presentasi 2. Integrasi Gender dalam Dokumen KUA-PPAS

Bagian	Sesi	Tujuan	Metode	Waktu	Alat Bantu
	16. Integrasi Gender dalam Dokumen RKA-SKPD	Memperkuat keterampilan memasukkan perspektif gender dalam dokumen RKA-SKPD	Presentasi dan Praktikum	90 menit	I. Presentasi 1. RKA-SKPD dan Langkah Integrasi Gender II. Panduan Praktikum 1. Penyusunan RKA-SKPD III. Bahan Bacaan 1. Contoh Integrasi Gender dalam Dokumen RKA-SKPD
IV. Pemantauan dan Evaluasi; Advokasi PPRG; Kurikulum Pelatihan dan Evaluasi Pelatihan	17. Fungsi Pemantauan, Evaluasi dan Indikator	Memahami konsep pemantauan, evaluasi, dan indikator dalam rangka pelaksanaan program pembangunan	Presentasi dan Diskusi interaktif	75 menit	I. Presentasi 1. Fungsi Pemantauan, Evaluasi dan Indikator
	18. Sistem Pemantauan dan Evaluasi PPRG di Daerah	Memahami mengenai aspek/ fokus pemantauan dan evaluasi PPRG di daerah serta data yang diperlukan Mengidentifikasi peluang integrasi pemantauan PPRG dalam sistem pemantauan dan evaluasi dan pelaporan yang sudah ada Memahami pihak mana saja yang terlibat	Presentasi; Praktikum	90 menit	I. Presentasi 1. Pemantauan dan Evaluasi Keberhasilan PPRG II. Panduan Praktikum 1. Persiapan Rencana Pemantauan PPRG III. Bahan Bacaan 1. Dokumen Laporan Kinerja Daerah dan Relevansi dengan Pemantauan PPRG 2. Muatan Laporan: LKJP dan LAKIP
	19. Strategi Advokasi dan Promosi PPRG	Mengidentifikasi langkah strategis untuk memastikan implementasi PPRG secara efektif	Presentasi; Praktikum	90 menit	I. Presentasi 1. Skema Strategi Advokasi II. Panduan Praktikum 1. Identifikasi Langkah Promosi PPRG di dalam Pemerintahan Daerah
	20. Evaluasi Pelatihan dan RTL Pelatihan	Menyusun rencana tindak lanjut untuk upaya PPRG yang akan dilakukan di masing-masing daerah; mengukur peningkatan pengetahuan setelah mengikuti pelatihan; dan memberikan input terhadap kualitas pelatihan	Praktikum RTL individual, pengisian lembar post tes, input untuk evaluasi pelaksanaan pelatihan dalam kartu kartu metaplan	90 menit	I. Panduan Praktikum 1. Penyusunan Kurikulum Pelatihan

BAGIAN 1

Pengantar Analisis Gender

Cakupan:

- Sesi 1: Perkenalan
- Sesi 2: Pengantar Pelatihan
- Sesi 3: Manajemen Berbasis Kinerja dalam Pembangunan
- Sesi 4: Gender dan Pembangunan
- Sesi 5: Konsep Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
- Sesi 6: Data Pembuka Wawasan dan Analisis Gender

SESI 1

Perkenalan

Tujuan	Saling mengenal, mencairkan suasana, dasar pembentukan kelompok awal
Output	Terbentuknya kelompok awal, ada data diri peserta
Metode	Game, Pengisian Lembar Profil Diri dengan foto diri
Waktu	30 menit
Alat Bantu	I. Lembar Profil Diri
Perlengkapan	Kamera, kertas kartu metaplan beberapa warna
Urgensi sesi	Sesi ini sangat penting dalam membangun kekompakan maupun dinamika di kalangan semua yang terlibat dalam pelatihan

A. Proses

Langkah 1: Perkenalan (30 menit)

1. Fasilitator memperkenalkan diri dan tim.
2. Fasilitator meminta peserta untuk mengambil satu kertas berwarna yang tersedia di meja.
3. Kemudian peserta menuliskan nama mereka di bagian atas kertas, dan satu hal/pernyataan singkat tentang "*bila karakter diri saya ibarat buah, maka saya seperti buah ...*" (misalnya, saya seperti buah nanas yang asem tapi menyegarkan).
4. Kemudian peserta berdiri, dan tanpa bersuara mencari orang dengan warna kartu yang sama dan membentuk kelompok dengan orang yang memiliki kartu yang sama.
5. Dalam kelompok, persilakan mereka masing-masing memperkenalkan diri dan menyampaikan apa yang mereka tulis di kartu tersebut. Kemudian secara bersama-sama memberi nama kelompok berdasarkan campuran buah yang mereka miliki, misalnya kelompok es buah, kelompok rujak dan lain-lain.
6. Setelah selesai, minta salah seorang dari anggota kelompok untuk memperkenalkan semua anggota kelompoknya dalam pleno.
7. Bila proses perkenalan sudah selesai, bagikan kepada setiap orang lembar identitas diri untuk mereka isi.
8. Pada rehat kopi pertama, fasilitator menggantungkan semua lembar identitas di dinding ruang sidang utama.
9. Fasilitator pada hari pertama akan mengambil foto dari semua peserta, cetak foto, dan menempelkan fotonya pada tempat yang tersedia di lembar identitas.

B. Alat Bantu

I. Lembar Profil Diri

1. Nama:

FOTO



2. Usia:

3. Pekerjaan:

4. Kapan pertama terlibat dalam urusan mewujudkan kesetaraan gender (tahun):

5. Pengalaman dengan implementasi PUG (contoh):

6. Pengalaman dengan PPRG (contoh):

7. Harapan untuk pelatihan ini:

SESI 2

Pengantar Pelatihan

Tujuan	Memahami tujuan pelatihan, menyepakati alur dan agenda, mengukur pemahaman awal, mengetahui hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk pelatihan
Output	Peserta mengerti tujuan, agenda, dan menyepakati kontrak belajar
Metode	Presentasi, diskusi interaktif
Waktu	45 menit
Alat Bantu	I. Presentasi 1. Tujuan, Alur, Agenda, dan Pendekatan Pelatihan II. Bahan Bacaan 1. Agenda Pelatihan 2. Prinsip dan Teknik Memfasilitasi III. Blangko Tugas Kelompok
Perlengkapan	LCD projector
Urgensi sesi	Sesi ini merupakan sarana untuk membangun kontrak belajar yang akan menentukan efektivitas pelatihan karena setiap orang yang terlibat dalam pelatihan mengetahui apa peran dan tanggungjawab mereka di dalam proses pelatihan

A. Proses

Langkah 1: Presentasi: Tujuan, Alur, Agenda, dan Pendekatan Pelatihan (10 menit)

Tujuan: Memberi penjelasan dan menyepakati tujuan, alur, agenda, dan pendekatan pelatihan serta pembentukan kelompok

1. Fasilitator membagi agenda rinci dan menjelaskan tujuan sesi dan mempresentasikan tujuan, alur, agenda dan pendekatan pelatihan, pembagian kelompok kerja dan cara bekerja dalam kelompok serta kontrak belajar pelatihan.
2. Fasilitator mengajak peserta untuk memberi masukan tentang agenda dan menambah ketentuan tentang kontrak belajar bila ada.
3. Menyepakati kontrak belajar.

Langkah 2: Pre tes (10 menit)

Tujuan: Mengukur pemahaman awal peserta mengenai PPRG

1. Fasilitator menjelaskan tujuan pre tes. Fasilitator menjelaskan bahwa tes ini dilaksanakan secara anonim – tidak perlu mencatat nama di atas lembarnya.
2. Fasilitator membagi lembar pre tes untuk diisi oleh peserta saat itu juga. Bila selesai, lembar pre tes yang sudah diisi dikumpulkan.

Langkah 3: Prinsip, Pendekatan, dan Teknik Memfasilitasi (15 menit)

Tujuan: Menyamakan persepsi mengenai prinsip dan pendekatan dalam memfasilitasi proses pelatihan serta mengeksplorasi pengalaman mengenai teknik-teknik memfasilitasi

1. Fasilitator membagikan *handout* mengenai teknik memfasilitasi dan mengajak peserta untuk bertukar pengalaman mengenai prinsip dan pendekatan memfasilitasi.
2. Fasilitator kemudian mempersilakan beberapa peserta memperagakan teknik memfasilitasi di

depan para peserta lain: apa praktek yang baik dan yang buruk? Lakukan proses ini secukupnya saja.

3. Fasilitator kemudian menjelaskan bahwa semua peserta diminta untuk mengambil kesempatan ko-fasilitasi beberapa sesi kerja kelompok dan mempresentasikan hasil di pleno sebagai praktek memfasilitasi. Fasilitator akan mencatat siapa yang sudah melakukan praktek fasilitasi dan jika perlu akan mengajak peserta tertentu untuk menjadi ko-fasilitator dan presenter.

Langkah 4: Pelaporan Pelajaran Hari Sebelumnya (10 menit)

Tujuan: Menjelaskan tugas pelaporan pelajaran hari sebelumnya oleh peserta

1. Fasilitator menjelaskan mengenai kebutuhan pelaporan hari sebelumnya; di mana hasil pelajaran setiap hari sebelumnya akan diperkenalkan pada hari berikutnya. Pelaporan dilakukan dalam bentuk kerja kelompok. Bentuk pelaporan ini diharapkan kreatif dan lain dari presentasi rekap biasa. Misalnya: memperkenalkan hasil dari hari sebelumnya melalui interview, *role play*, perspektif pribadi, personifikasi isi belajaran dan lain-lain. Fokus presentasi ini di tingkat hasil, bukan proses (apa yang tercapai, apa yang dipelajari, apa yang masih menimbulkan masalah, dan lain-lain).
2. Fasilitator meminta semua peserta untuk mencatat nama dirinya dalam satu lembar kertas yang digantungkan dekat pintu keluar ruang sidang utama. Semua peserta harus melakukan tugas ini.

B. Alat Bantu

I. Presentasi

1. Tujuan, Alur, Agenda dan Pendekatan Pelatihan

a. Tujuan Pelatihan

- Memperkuat pemahaman peserta mengenai Perencanaan dan Penganggaran Daerah yang Responsif Gender (PPRG)
- Memperkuat pemahaman peserta mengenai pemantauan dan evaluasi PPRG
- Memperkuat pemahaman peserta mengenai advokasi dan promosi PPRG
- Membangun keterampilan peserta untuk melakukan fasilitasi dan/atau memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam hal PPRG

b. Alur Pelatihan



c. Agenda Pelatihan

- Hari I dan II: Perkenalan dan Pengantar Pelatihan, Konsep Manajemen Berbasis Kinerja, Gender dan Pembangunan, Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Analisis Gender dan Data Pembuka Wawasan
- Hari II dan III: Perencanaan yang Responsif Gender
- Hari III dan IV: Penganggaran yang Responsif Gender
- Hari V: Pemantauan dan Evaluasi, Advokasi dan Promosi PPRG, dan RTL

d. Pendekatan Pelatihan serta Pembagian Kelompok

Pendekatan Pelatihan:

- Prinsip Pembelajaran Orang Dewasa (POD): kreativitas dan interaksi peserta dalam membangun pengetahuan dan keterampilan bersama.

Pembagian Kelompok:

- kelompok disusun oleh fasilitator berdasarkan latar belakang, kemampuan, dan pertimbangan lain yang dapat mendukung proses pelajaran
- komposisi kelompok tidak akan diubah selama pelatihan untuk memaksimalkan koherensi dari satu sesi ke yang lain serta meningkatkan kesempatan belajar bersama

E. Kontrak belajar pelatihan

- Kontrak belajar selama pelatihan diperlukan untuk mengefektifkan dan memperlancar proses pelatihan
- Terdiri dari hal-hal yang disepakati oleh semua peserta: mana yang mesti dilakukan dan mana yang mesti dihindari
- Dapat juga dilengkapi dengan sanksi bilamana aturan tersebut dilanggar

f. Contoh kontrak belajar

Hal yang mesti dilakukan:

- Menghormati setiap pendapat peserta
- Semua terlibat dalam kerja kelompok
- Membuat ponsel *silent*

Hal yang mesti dihindari:

- Datang terlambat
- Mengirim/menjawab SMS
- Menerima telepon dalam ruang pelatihan
- Melaksanakan diskusi paralel yang mengganggu proses pelatihan
- Mengganggu peserta lain secara sengaja

Sanksi:

Bernyanyi/menari bila datang terlambat atau tidak menghormati kontrak belajar

II. Bahan Bacaan

1. Agenda Pelatihan per Hari

Waktu	Hari I	Hari II	Hari III	Hari IV	Hari V
8.30-9.00	Pembukaan	Review Hari I	Review II	Review Hari III	Review Hari IV
9.00-9.30	Perkenalan	Data Pembuka Wawasan dan Analisis Gender (1)	Integrasi Gender dalam Dokumen Perencanaan Jangka Menengah (2)	Konsep ARG (1)	Fungsi Pemantauan dan Evaluasi (1)
9.30-10.15	Pengantar Pelatihan	Data Pembuka Wawasan dan Analisis Gender (2)	Integrasi Gender dalam Dokumen Perencanaan Jangka Menengah (3)	Konsep ARG (2)	Fungsi Pemantauan dan Evaluasi (2)
10.15-10.30	<i>Istirahat</i>				
10.30-11.15	Manajemen Berbasis Kinerja (1)	Data Pembuka Wawasan dan Analisis Gender (3)	Integrasi Gender dalam Perencanaan Tahunan (1)	Instrumen ARG (1)	Pemantauan dan Evaluasi PPRG (1)
11.15-12.00	Manajemen Berbasis Kinerja (2)	Data Pembuka Wawasan dan Analisis Gender (4)	Integrasi Gender dalam Perencanaan Tahunan (2)	Instrumen ARG (2)	Pemantauan dan Evaluasi PPRG (2)
12.00-12.45	Manajemen Berbasis Kinerja (3)	Mekanisme Perencanaan di Daerah (1)	Integrasi Gender dalam Perencanaan Tahunan (3)	Instrumen ARG (3)	Advokasi dan Promosi PPRG (1)
12.45-13.45	<i>Istirahat</i>				
13.45-14.30	Gender dan Pembangunan	Mekanisme Perencanaan di Daerah (2)	Integrasi Gender Dalam Musrenbang (1)	Integrasi Gender dalam KUA (1)	Advokasi dan Promosi PPRG (2)
14.30-15.15	Konsep PUG dan Pemberdayaan Perempuan (1)	Perencanaan Responsif Gender (1)	Integrasi Gender Dalam Musrenbang (2)	Integrasi Gender dalam KUA (2)	RTL dan Evaluasi Pelatihan (1)
15.15-15.30	<i>Istirahat</i>				
15.30-16.15	Konsep PUG dan Pemberdayaan Perempuan (2)	Perencanaan Responsif Gender (2)	Penganggaran di Daerah (1)	Integrasi Gender dalam RKA SKPD (1)	RTL dan Evaluasi Pelatihan (2)
16.15-17.00	Konsep PUG dan Pemberdayaan Perempuan (3)	Integrasi Gender dalam Dokumen Perencanaan Jangka Menengah (1)	Penganggaran di Daerah (2)	Integrasi Gender dalam RKA SKPD (2)	Penutup

2. Prinsip dan Teknik Memfasilitasi

Prinsip Dasar Memfasilitasi:

- Merupakan suatu seni membimbing (*guiding*) proses kerja suatu kelompok menuju tujuan yang disepakati.
- Berpegang pada prinsip pembelajaran orang dewasa (*adult learning*) yang mengakui bahwa semua orang dalam suatu kelompok (dalam pelatihan) merupakan peserta yang berpengetahuan didasarkan pada pengalaman hidupnya masing-masing, pengetahuan dimiliki oleh semua orang.
- Tugas fasilitator adalah mengolah pengetahuan tersebut bersama seluruh peserta dalam kelompok untuk pencapaian tujuan kelompok/pelatihan.
- Kompetensi dasar yang perlu dimiliki oleh seorang fasilitator adalah pemahaman materi pelatihan (*knowledgeable on content*), dan pemahaman mengenai metodologi dan proses pelatihan.

Teknik Memfasilitasi:

- **Percaya pada sumber daya peserta:** sebagai fasilitator anda harus memiliki keyakinan bahwa setiap orang yang terlibat dalam pelatihan akan memiliki sumber daya untuk melakukan tugasnya melalui berbagai proses.
- **Hargai setiap peserta yang terlibat:** ada keyakinan bahwa semua anggota kelompok adalah peserta yang cakap, berguna, dan memiliki komitmen terhadap pencapaian tujuan.
- **Dapat beradaptasi:** anda perlu memiliki kecakapan dalam memiliki teknik yang akan ditetapkan dalam suatu waktu/sesi tertentu, apa yang akan dilakukan, apakah akan melakukan intervensi atau tidak, dan bagaimana melakukan intervensi.
- **Jadilah diri sendiri:** akan sangat efektif bilamana anda tampil apa adanya. Peserta pelatihan kadang bertindak meniru tingkah laku yang anda perlihatkan (*role modeling*). Jika anda kaku dan formal peserta cenderung kaku; jika anda rileks dan terbuka, peserta akan rileks juga.
- **Menahan diri untuk melakukan intervensi:** berhati-hatilah dalam mengajukan suatu "resep" jawaban; jangan memaksa peserta untuk menerima resep tersebut sebagai kebenaran tunggal. Tapi anda tetap perlu melakukan intervensi untuk membuat peserta tetap fokus.
- **Gunakan pertanyaan dan saran:** gunakan pertanyaan dan saran; hindari memberi nasihat. Katakan "Saya sarankan..." ketimbang "Yang perlu anda lakukan...".
- **Negosiasi dan kontrak:** fasilitator adalah negosiator terkait dengan struktur, kerangka, dan proses pelatihan. Temukanlah kesepakatan dengan peserta.
- **Sensitif terhadap latar belakang budaya:** kepekaan terhadap latar budaya peserta dalam kelompok sangat penting bagi seorang fasilitator. Bila anda ragu mengenai sesuatu hal, tanyakan saja.
- **Improvisasi:** fasilitator perlu memiliki seni improvisasi dalam suatu struktur yang telah disepakati dan dinegosiasikan. Berusahalah untuk fleksibel dan penuh improvisasi.

III. Blanko Tugas Kelompok untuk Pelaporan Pelajaran

Hari 2 (Pelaporan Pelajaran Hari 1)	Hari 3 (Pelaporan Pelajaran Hari 2)	Hari 4 (Pelaporan Pelajaran Hari 3)	Hari 5 (Pelaporan Pelajaran Hari 4)
<i>Diisi nama</i>			

SESI 3

Manajemen Berbasis Kinerja

Tujuan	Memahami konsep manajemen berbasis kinerja (MBK) sebagai dasar pendekatan dalam pengelolaan pembangunan di Indonesia dan dapat menyusun kerangka kinerja dari kegiatan, <i>output</i> sampai <i>outcome</i> dan dampak
Output	Peserta mampu merumuskan isu strategis, terampil menggunakan konsep manajemen berbasis kinerja dalam menemukan rumusan <i>outcome</i> , <i>output</i> , dan kegiatan yang tepat.
Metode	Presentasi, <i>media review</i> , kerja kelompok, <i>market place</i>
Waktu	135 menit
Alat Bantu	I. Presentasi 1. Manajemen Berbasis Kinerja II. Panduan Praktikum 1. Lembar Pertanyaan Kunci untuk Praktikum Penyusunan Kerangka Kinerja III. Bahan Bacaan 1. Manajemen Berbasis Kinerja: Informasi Tambahan
Perlengkapan	Koran-koran bekas untuk <i>media review</i> , utamakan koran-koran lokal, <i>pinboard</i> dan peralatan kartu metaplan untuk kerja kelompok, kartu post-it berukuran sedang, <i>LCD projector</i>
Urgensi sesi	Sesi memiliki peran yang sangat strategis dalam keseluruhan karena akan membawa peserta kepada suatu pemahaman dan keterampilan dasar mengenai manajemen berbasis kinerja (MBK) sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran. MBK sangat berguna dalam membawa peserta untuk mengembangkan suatu kerangka perubahan yang bersifat sistemik, dapat tercapai dan berkelanjutan. MBK dengan demikian berfungsi sebagai pendekatan yang akan mewarnai setiap sesi, sekaligus juga merupakan suatu instrumen atau alat teknis yang memang harus dikuasai penggunaannya oleh peserta

A. Proses

Langkah 1: Presentasi: Manajemen Berbasis Kinerja (45 menit)

Tujuan: Menjelaskan dan menggali kesepahaman tentang konsep Manajemen Berbasis Kinerja (MBK) dalam pembangunan

1. Fasilitator memberikan presentasi singkat mengenai konsep Manajemen Berbasis Kinerja dalam pembangunan.
2. Fasilitator membagikan bahan bacaan kepada peserta, dan memberikan waktu beberapa menit kepada peserta untuk membacanya.
3. Fasilitator membuka sesi diskusi pleno dengan menggali pengalaman peserta mengenai manajemen berbasis kinerja ini.

Langkah 2: Praktikum: Penyusunan Tujuan Strategis, *Outcome*, *Output*, dan Kegiatan (60 menit)

Tujuan: Melatih keterampilan penyusunan manajemen berbasis kinerja berdasar isu strategis

1. Kelompok kerja menentukan fasilitator kelompok serta pelapor untuk presentasi hasil kerja kelompok.
2. Fasilitator menjelaskan tugas kelompok untuk mengerjakan dua hal:
 - Identifikasi isu strategis dari suatu kasus.
 - Mengembangkan kerangka kinerja terkait dengan isu strategis ini.
 - Menjelaskan sekali lagi kerangka kinerja serta pertanyaan kunci yang membantu merumuskan kerangka kinerja.
3. Fasilitator membagi koran bekas kepada setiap kelompok dan minta kelompok untuk menggunting berita atau foto yang menggambarkan tentang kondisi suatu pelayanan publik yang mengalami kondisi kesenjangan gender.
4. Kelompok menentukan apa isu strategis terkait dengan kesetaraan gender dengan pemberitaan koran tersebut: apa yang menjadi masalah dasar? Apa yang menyebabkan masalah kesenjangan? Isu strategis dicatat di atas papan *pinboard* dalam bentuk rumusan masalah yang ingin diatasi.
5. Kelompok merumuskan perubahan kondisi/hasil yang mereka harapkan akan tercapai pada lima tahun yang akan datang terkait dengan isu strategis ini melalui program pembangunan yang konkret. Hasil ini dirumuskan dalam pernyataan *outcome* yang sesuai dengan standar penyusunan *outcome* (lihat lembar pertanyaan kunci). *Outcome* bisa lebih dari satu bilamana dipandang penting dan realistis untuk dicapai. Rumusan *outcome* mempertunjukkan perubahan nyata yang diharapkan dan kelompok sasarannya.
6. Setelah pernyataan *outcome* diperoleh, kelompok menyusun dua sampai tiga ungkapan *output* (hasil dari kegiatan) yang sebaiknya dipersiapkan jika ingin mencapai *outcome* tersebut; mengacu kembali ke lembar pertanyaan kunci untuk memastikan bahwa *output* ini sesuai dengan standar.
7. Selanjutnya kelompok memilih satu ungkapan *output* dan menyusun usulan kegiatan, kegiatan yang diperlukan untuk mencapai *output* tersebut.
8. Kelompok mengatur kegiatan – *output* – *outcome* – isu strategis ini sebagai kerangka kinerja (kerangka kerja logis) dan memverifikasi lagi kerangka kinerja: apakah sudah memenuhi logika perkembangan hasil dari satu tingkat ke yang lain? Apakah sudah lengkap dengan kelompok sasaran di masing-masing level? Bandingkan hasil ini dengan contoh kerangka kinerja yang ada untuk melihat kualitas hasil kerja.
9. Dalam proses kerja kelompok ini, fasilitator harus aktif mendampingi setiap kelompok.

Langkah 3: Presentasi Hasil Kelompok dalam *Marketplace* (30 menit)

Tujuan: Mempresentasikan hasil kerja kelompok dan mendapatkan input dari kelompok/peserta lain

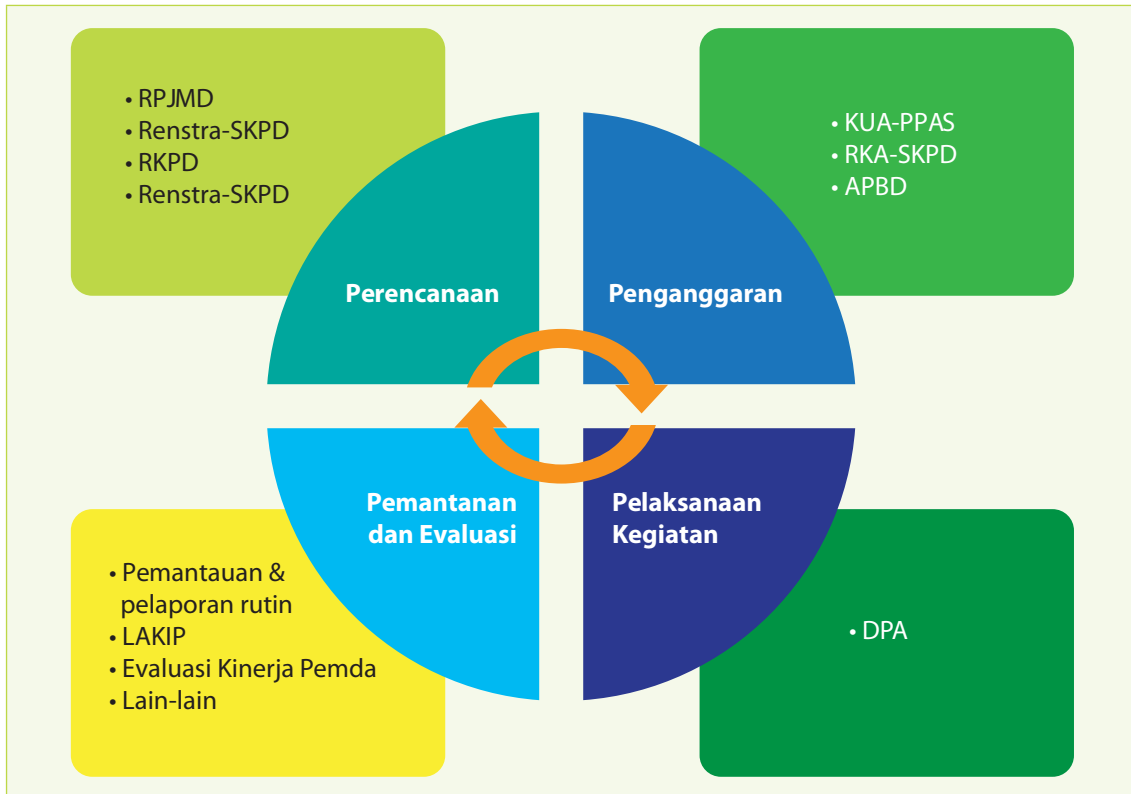
1. Pelapor masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompok yang telah ditempelkan di *pinboard*. Peserta/kelompok mengunjungi kelompok lain untuk mendengar tentang hasil kerja kelompok masing-masing.
2. Peserta dapat memberikan usulan perbaikan terhadap masing-masing hasil presentasi kelompok. Usulan tersebut dicatat di atas *kartu post-it* dan ditempelkan pada bagian yang dimaksud.
3. Hasil kerja kelompok yang ada di *pinboard* kemudian dilem pada kertas coklat dan digantungkan di dinding ruang sidang utama sebagai rujukan untuk tugas kelompok hari berikutnya.

B. Alat Bantu

I. Presentasi

1. Manajemen Berbasis Kinerja

a. Keterkaitan antara MBK dan Perencanaan dan Penganggaran



- Manajemen berbasis kinerja harus diterapkan dalam semua siklus pengelolaan pembangunan, yakni dari perencanaan, penganggaran, implementasi kegiatan, serta pemantauan dan evaluasi.
- Perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran yang mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan hasil yang diharapkan berupa dampak, *outcome*, dan *output*.
- Rumusan hasil tersebut haruslah tertera dalam berbagai dokumen perencanaan dan penganggaran yang menjadi acuan penyelenggara pemerintahan.

b. Manfaat Manajemen Berbasis Kinerja dalam Rangka Melaksanakan Pembangunan

- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya yang dialokasikan ke sektor publik terhadap *outcomes*/hasil dan *output*.
- Meningkatkan akuntabilitas kementerian, SKPD, serta semua organisasi yang memiliki kewenangan dalam penggunaan dana publik
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, karena masyarakat akan memiliki peran kontrol yang lebih besar untuk mendesak pencapaian hasil (masyarakat lebih tertarik pada hasil, bukan proses)

c. Konsep Kerangka Kinerja

- Kerangka Kinerja dimulai dengan “apa yang ingin diubah” (dampak/*impact*).
- Dampak disusul dengan “apa yang ingin dicapai” (*outcome*) guna mewujudkan perubahan yang diinginkan.
- Selanjutnya untuk mencapai *outcome* diperlukan informasi tentang “apa yang dihasilkan” (*output*).



II. Panduan Praktikum

1. Lembar Pertanyaan Kunci untuk Praktikum Penyusunan Kerangka Kinerja

a. Penyusunan Isu Strategis

- Pilihlah dan gunting berita-berita atau gambar dari koran/majalah yang berkenaan dengan suatu layanan publik tertentu atau isu kesenjangan gender. Tempel berita-berita atau gambar tersebut di *pinboard* (sedemikian rupa sehingga dapat pula menjadi suatu cerita/berita yang ada urutannya)
- Apa isu strategis dari berita-berita/gambar koran yang sudah ditempel itu?

Isu strategis merupakan suatu isu dengan ciri, antara lain: bersifat sistemik, dirasakan oleh sebagian besar orang dan di banyak tempat (*coverage*), mendesak diselesaikan (*urgensi*), memiliki daya ungkit kepada penyelesaian isu lain bilamana diselesaikan.

b. Penyusunan Kerangka Kinerja

- Perubahan apa yang diharapkan terjadi dalam kurun waktu 3-5 tahun terkait dengan isu strategis tersebut? Masukkan rumusan ini sebagai rumusan **hasil/outcome**.
- Barang/produk atau jasa apa yang harus disediakan oleh pemerintah dalam jangka tahunan atau jangka menengah agar perubahan tersebut dapat terjadi? Masukkan rumusan ini sebagai rumusan **output**.
- Tindakan apa yang perlu dilakukan agar barang atau jasa tersebut bisa dihasilkan? Masukkan rumusan ini dalam **kegiatan**.
- Susunlah rumusan **dampak-outcome-output-kegiatan-indikator** dalam tabel seperti contoh berikut.

c. Contoh Isu Strategis: Kebutuhan Air Bersih Bagi Warga di Wilayah Perkotaan di Kota Y

Dampak	Outcome	Output	Kegiatan
Meningkatnya kualitas hidup warga	<p><i>Kebutuhan air bersih bagi warga terpenuhi</i></p> <p>Indikator: Jumlah rumah yang mendapatkan layanan air bersih melalui pipa meningkat</p>	<p>Kebijakan penyediaan air bersih melalui pipa ke rumah</p> <p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> Perda tentang penyediaan air bersih perkotaan MOU dengan PDAM 	<ul style="list-style-type: none"> Konsultasi publik mengenai kebutuhan air bersih warga Kajian teknis Penyiapan draf Perda Audiensi dan rapat dengan DPRD dan PDAM

III. Bahan Bacaan

1. Manajemen Berbasis Kinerja: Informasi Tambahan

a. Kerangka Kebijakan Terkait Manajemen Berbasis Kinerja

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menetapkan pendekatan anggaran berbasis kinerja
- UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menetapkan sistem perencanaan multitaruhan nasional yang memastikan keterkaitan antara jenis dan tingkat perencanaan serta konsistensi perencanaan dan penganggaran UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, menetapkan adanya audit kinerja di samping audit keuangan lainnya
- UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 9 tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah

b. Pengertian Tingkatan Kinerja

Dampak:

- Biasanya merupakan perubahan yang diharapkan terjadi dalam jangka menengah dan jangka panjang yang tercermin dalam visi, misi, dan sasaran strategis K/L/SKPD.
- Merupakan hasil tidak langsung (*indirect result*) dari intervensi yang dilakukan suatu K/L/SKPD.
- Seringkali bersifat akumulatif; artinya, baru akan tercapai jika ada kontribusi *outcome* oleh beberapa instansi.
- Pencapaian hasil pada tingkat ini diukur dengan indikator-indikator yang bersifat jangka menengah dan panjang, misalnya: MDGs.
- Pencapaian hasil merupakan kontribusi dari berbagai K/L/SKPD dan pihak-pihak lain yang memiliki visi perubahan yang serupa.

Outcome:

- Perubahan konkret yang dihasilkan oleh pencapaian kinerja program.
- Menjawab apa yang ingin dicapai dalam jangka pendek dan menengah.
- Bukan tentang proses atau kegiatan, juga bukan tentang pelayanan "apa" atau "bagaimana" melakukan pelayanan (oleh K/L/ SKPD).

Keluaran/Output:

- Berupa barang atau jasa/pelayanan yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan oleh K/L/SKPD.
- Barang atau jasa tersebut selalu dihasilkan sebagai kontribusi untuk suatu proses berikutnya.
- Barang atau jasa tersebut bisa bersifat internal (misalnya kebijakan internal, pedoman, dan lain-lain) atau eksternal, yaitu produk atau jasa untuk pihak ketiga.
- Kualitas barang atau jasa tersebut dapat dilihat jika keluaran tepat guna (dapat diterapkan internal atau eksternal) dan diterima oleh kelompok sasaran.
- Dapat diukur menggunakan indikator kinerja.

c. Indikator

Catatan: informasi tentang indikator dapat juga dilihat pada Sesi 17

1. Fungsi dan Kriteria Indikator

sesuai Modul Reformasi Perencanaan dan Penganggaran, Bappenas (2008)

- Indikator adalah alat untuk mengukur pencapaian kinerja (*impact, outcome, dan output*). Pengukuran kinerja memerlukan penetapan indikator-indikator yang sesuai dan terkait dengan informasi kinerja (*impact, outcome, dan output*).

2. Kriteria Menyusun Indikator

- Kriteria dalam menyusun indikator kinerja:
 - **Specific:** sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi dengan jelas;
 - **Measurable:** indikator yang digunakan diukur dengan skala penilaian tertentu yang disepakati, dapat berupa pengukuran secara kuantitas, kualitas atau harga.
 - **Appropriate:** pemilihan indikator yang sesuai dengan upaya peningkatan pelayanan/kinerja.
 - **Achievable:** target kinerja dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumber daya yang ada.
 - **Relevant:** indikator terkait secara logis dan langsung dengan tugas institusi, serta realisasi tujuan dan sasaran strategis institusi.
 - **Reliable:** indikator yang digunakan akurat dan dapat mengikuti perubahan tingkatan kinerja.
 - **Time bound:** waktu/periode pencapaian kinerja ditetapkan.
 - **Cost-effective:** kegunaan indikator sebanding dengan biaya pengumpulan data.

3. Indikator Kuantitatif dan Indikator Kualitatif

- **Indikator kuantitatif** diukur dengan satuan angka dan unit dan biasanya akan melihat kuantitas yang cukup besar, sehingga data dapat dianggap representatif.
Contoh: jumlah laki-laki dan perempuan pelaku usaha di Kabupaten Y yang menjadi nasabah bank perkreditan rakyat.
- **Indikator kualitatif** menggambarkan kondisi atau keadaan yang dicapai berdasarkan persepsi orang, sehingga muncul gambaran tentang efektivitas suatu program.
Contoh: persepsi perempuan tentang hasil dan manfaat nyata dari program peningkatan kapasitas perempuan.
- **Indikator harga** mencerminkan kelayakan biaya yang diperlukan untuk mencapai sasaran kinerja.
Contoh: biaya pemrosesan aplikasi kredit per nasabah.

4. Target Kinerja

- Melekat dengan indikator kinerja adalah target indikator kinerja (atau biasa disebut "target kinerja").
- Target indikator kinerja disusun setelah indikator kinerja ditetapkan.
- Contoh target kinerja: Pada tahun 2012, jumlah laki-laki dan perempuan pelaku usaha di Kabupaten Y yang menjadi nasabah bank perkreditan rakyat meningkat menjadi 5.000 laki-laki dan 4.000 perempuan (data dasar tahun 2010: 3.500 laki-laki dan 2.000 perempuan).
- Target indikator kinerja menunjukkan sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh K/L, program, dan kegiatan dalam periode waktu yang telah ditetapkan.

2. Contoh Kerangka Kinerja dan Indikator Kinerja

a. Contoh Kerangka Kinerja

Tingkatan Kinerja	Rumusan Kinerja
Dampak	Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia di Kabupaten X
Hasil (Outcome)	Anak laki-laki dan perempuan di semua rumah tangga miskin di Kabupaten X menikmati wajib belajar 12 tahun
Keluaran (Output)	Tersedianya layanan beasiswa untuk anak keluarga miskin usia sekolah untuk mengikuti wajib belajar 12 tahun
Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> a. identifikasi keluarga miskin yang berhak ikut program b. informasi ke sekolah dan orangtua c. persiapan sistem pembayaran beasiswa d. transfer biaya sekolah ke pihak yang terkait e. pelaporan kemajuan rutin f. kontrol kehadiran sekolah anak yang menerima beasiswa
Input	Anggaran beasiswa untuk populasi yang dilayani

b. Contoh Indikator Kinerja

Tingkatan Kinerja	Rumusan Kinerja	Contoh Indikator
Dampak	Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia laki-laki dan perempuan di Kabupaten X	<p>Angka partisipasi sekolah pada tingkat pendidikan menengah berdasarkan jenis kelamin</p> <p>Angka partisipasi angkatan kerja terampil berdasar jenis kelamin</p>
Hasil (Outcome)	Anak laki-laki dan perempuan di rumah tangga miskin di Kabupaten X menikmati wajib belajar 12 tahun	Proporsi anak laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga miskin yang menikmati wajib belajar 12 tahun
Keluaran (Output)	Tersedianya layanan beasiswa untuk anak keluarga miskin usia sekolah	Jenis kebijakan daerah yang efektif untuk mendorong wajib belajar 12 tahun (misalnya: Perda, Peraturan Bupati/Walikota, SK Kepala Dinas Pendidikan)

SESI 4

Gender dan Pembangunan

Tujuan	Meningkatkan kepekaan peserta tentang dampak pembangunan terhadap perempuan dan laki-laki
Output	Peserta memiliki keterampilan mengidentifikasi manifestasi kesenjangan gender dalam pembangunan
Metode	Presentasi, Praktikum
Waktu	45 menit
Alat Bantu	I. Presentasi 1. Gender, Kesetaraan Gender, dan Indikator Kesetaraan Gender II. Panduan Praktikum 1. Lembar Tugas Kelompok Praktikum 1 2. Lembar Tugas Kelompok Praktikum 2
Perlengkapan	<i>Pinboard</i> , kartu-kartu metaplan
Urgensi sesi	Sebagai langkah awal untuk melakukan analisis gender maupun intervensi yang responsif gender, peserta harus benar-benar paham mengapa gender menjadi suatu isu dalam pembangunan

A. Proses

Langkah 1: Presentasi: Gender, Kesetaraan Gender, dan Indikator (15 menit)

Tujuan: Memberikan dan menggali pemahaman mengenai konsep dasar gender dan pembangunan

1. Fasilitator mempresentasikan secara singkat tentang konsep gender, konsep kesetaraan gender, dan indikator kesetaraan gender.
2. Fasilitator mempersilakan peserta untuk menyampaikan pendapatnya.

Langkah 2: Praktikum (30 menit)

Tujuan: Membangun keterampilan untuk mengidentifikasi kesenjangan gender dan membangun argumen mengapa gender menjadi isu dalam pembangunan

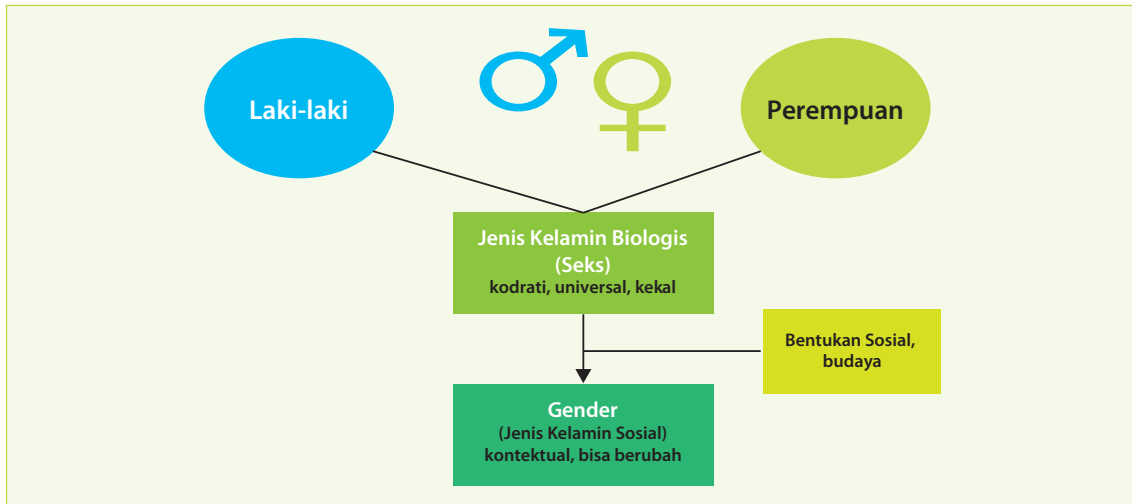
1. Peserta melaksanakan praktikum untuk membuka wawasan tentang pentingnya isu gender dalam pembangunan. Metode yang diterapkan mampu untuk membangun kepekaan aparaturnya pemerintah tentang isu gender dalam pembangunan.
2. Masing-masing kelompok memilih dan mempraktekkan satu jenis aspek kesenjangan gender dalam pembangunan:
 - Kelompok praktikum 1:** Praktikum yang ditujukan untuk membuka wawasan aspek gender dalam kegiatan pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah;
 - Kelompok praktikum 2:** Praktikum yang ditujukan untuk membangun argumen terkait dengan isu gender dalam pembangunan.
3. Persilakan masing-masing kelompok berdiskusi dibantu dengan alat bantu terlampir.
4. Minta kelompok membuat dokumentasi hasil kerja/praktikum mereka di *pinboard*.
5. Bila waktu memungkinkan, persilakan kelompok untuk melakukan presentasi.

B. Alat Bantu

I. Presentasi

1. Gender, Kesetaraan Gender, dan Indikator Kesetaraan Gender

a. Konsep Gender



- Laki-laki dan perempuan terlahir memiliki jenis kelamin yang bersifat kodrati, universal, dan kekal. Misalnya: vagina dan rahim untuk perempuan; penis dan sperma untuk laki-laki.
- Nilai-nilai sosial budaya tempat laki-laki dan perempuan tersebut hidup memberikan atribut-atribut sosial kepada laki-laki dan perempuan. Atribut ini disebut **gender**, yang sifatnya kontekstual dan bisa berubah. Misalnya: laki-laki penakluk; perempuan penurut.
- Atribut sosial ini kemudian menjadi dasar dalam pembagian kerja dan peran dalam masyarakat tersebut. Misalnya: laki-laki pencari nafkah atau kepala keluarga; perempuan terbatas sebagai ibu rumah tangga.
- Gender menjadi isu karena membawa berbagai kesenjangan dalam situasi laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang yang berupa subordinasi, marginalisasi, beban ganda, kekerasan pada perempuan serta pelabelan (*stereotype*). Intinya, gender menjadi masalah apabila terjadi ketidakadilan bagi laki-laki dan perempuan, antara lain:
 - Salah satu jenis kelamin dirugikan,
 - Salah satu jenis kelamin dibedakan derajatnya,
 - Salah satu jenis kelamin dianggap tidak cakap dibanding dengan jenis kelamin lain,
 - Salah satu jenis kelamin diperlakukan lebih rendah.

b. Kesetaraan Gender

Laki-laki dan perempuan memiliki dan mendapatkan penghargaan yang setara sebagai manusia di dalam berbagai aspek kehidupan dan sama-sama mendapatkan akses, mampu berpartisipasi, dan memiliki kontrol serta mendapatkan manfaat dari intervensi pembangunan.

c. Indikator Kesetaraan Gender

- **Indikator tingkat dampak:** indikator yang bersifat makro yang biasanya mengacu pada indikator yang disepakati secara nasional, misalnya:
 - Indeks Pembangunan Gender (*Gender Development Index-GDI*) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan.
Variabel GDI: angka harapan hidup, pendidikan, pendapatan.
 - Indeks Pemberdayaan Gender (*Gender Empowerment Measures-GEM*) merupakan indeks yang mengukur peran aktif perempuan dan kehidupan ekonomi dan politik.
Variabel GEM: partisipasi perempuan dalam politik, partisipasi dalam bidang ekonomi, partisipasi dalam pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.
 - Tujuan Pembangunan Milenium atau Millenium Development Goals (MDGs), terutama terkait dengan tujuan tiga, yakni mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

- **Indikator pada tingkat hasil/outcome,** yakni indikator yang merupakan hasil langsung dari pelayanan yang diberikan oleh suatu organisasi/SKPD dalam jangka waktu satu sampai lima tahun:
 - Misalnya: Data/indeks yang menjelaskan hasil suatu layanan; misalnya: populasi laki-laki dan perempuan yang mendapatkan pelayanan yang berkualitas; jumlah rumah tangga miskin yang mendapat pelayanan air bersih, jumlah pekerja laki-laki dan perempuan mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja, perempuan korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan terpadu.

- **Indikator pada tingkat output,** yakni indikator yang merupakan hasil langsung dari suatu kegiatan
 - Misalnya: Rasio laki-laki dan perempuan yang mendapatkan pelatihan agribisnis, perempuan yang terlibat dalam Musrenbang.

- **Indikator spesifik gender, yakni indikator yang secara khusus terkait dengan satu jenis kelamin saja**
 - Misalnya: Angka kekerasan terhadap perempuan, jumlah kasus *trafficking* di kalangan perempuan.

II. Panduan Praktikum

1. Lembar Tugas Kelompok Praktikum 1

Tujuan: Membuka wawasan aspek gender dalam kegiatan pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah

- Menentukan fasilitator kelompok serta pelapor.
- Baca dan telitilah kegiatan suatu SKPD yang tertera dalam RKA SKPD terlampir.
- Siapa yang menjadi sasaran dari kegiatan tersebut?
- Apa kira-kira dampak kegiatan tersebut bagi laki-laki dan perempuan?
- Apa saja yang diperlukan agar laki-laki dan perempuan mendapatkan manfaat dari kegiatan tersebut?

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PEMERINTAH DAERAH		R.2.2.1
Provinsi/kabupaten/kota..... Tahun Anggaran 2010		
Program	Peningkatan mutu pendidikan SD	
Kegiatan	Pemberian beasiswa kepada 50 anak SD	
Lokasi Kegiatan		
Jumlah tahun n-1	Rp	
Jumlah tahun n	Rp	
Jumlah tahun n+1	Rp	
INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG		
INDIKATOR	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Angka partisipasi sekolah dari siswa keluarga miskin
Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 50 juta
Keluaran	Tersalurkannya beasiswa kepada siswa dari keluarga miskin	50 siswa
Hasil	Menurunnya angka putus sekolah
Kelompok sasaran kegiatan: siswa keluarga miskin		

2. Lembar Tugas Kelompok Praktikum 2

Tujuan: Membangun argumen terkait dengan isu gender dalam pembangunan

- Tentukan moderator kelompok untuk praktikum ini.
- Apa relevansi/hubungan isu gender dalam pembangunan berdasarkan pemahaman anda? Bangunlah argumentasi anda tentang hal ini. Tulis jawaban tersebut dalam kartu-kartu metaplan.
- Kelompokkan jawaban dalam kartu-kartu metaplan tersebut berdasarkan isu/argumentasi utama, misalnya:
 - tujuan umum pembangunan untuk mewujudkan perkembangan yang adil dan setara
 - kewajiban negara untuk melindungi masyarakat/ HAM,
 - kontribusi terhadap tujuan khusus pembangunan, misalnya pencapaian MDGs,
 - alasan pertumbuhan ekonomis,
 - alasan keberlanjutan,
 - alasan sosial budaya,
 - efisiensi proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program.
- Bahas: siapa kira-kira kelompok sasaran untuk masing-masing argumentasi, misalnya argumen mana cocok untuk pimpinan SKPD, untuk bagian perencanaan, untuk staf teknis, dan untuk anggota DPRD dan pimpinan politik dan lain-lain?
- Catat hasil diskusi atas kartu metaplan dan tempelkan di *pinboard*.

SESI 5

Konsep Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Tujuan	Memahami PUG sebagai strategi lintas bidang Memahami pemberdayaan perempuan sebagai salah satu urusan wajib Memahami PUG sebagai bagian dari strategi pemenuhan HAM
Output	Peserta mampu menjelaskan relasi antara PUG dan pemberdayaan perempuan serta relevansinya sebagai urusan wajib daerah
Metode	Curah gagasan menggunakan kertas kartu metaplan, presentasi, diskusi <i>fish bowl</i>
Waktu	135 menit
Alat Bantu	I. Lembar Kerja 1. Curah Gagasan PUG dan Pemberdayaan Perempuan II. Presentasi 1. Konsep Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan III. Bahan Bacaan 1. Kode dan Daftar Program dan Kegiatan Menurut Urusan Pemerintahan: Urusan Pemberdayaan Perempuan
Perlengkapan	Kartu-kartu metaplan beberapa warna, <i>LCD projector</i>
Urgensi sesi	Sesi ini berguna sebagai suatu titik tolak untuk benar-benar memahami bahwa intervensi yang responsif gender tidak terbatas hanya pada kegiatan-kegiatan pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh unit pemberdayaan perempuan di daerah, tetapi juga mencakup kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh semua SKPD yang menempatkan gender sebagai isu lintas bidang

A. Proses

Langkah 1: Curah Gagasan (45 menit)

Tujuan: Peserta mengeksplorasi perbedaan antara PUG sebagai strategi dalam pembangunan dan urusan wajib pemberdayaan perempuan

1. Fasilitator membaca beberapa nama program dan kegiatan pengarusutamaan gender atau pemberdayaan perempuan yang ditulis atas kartu (sekitar 10 contoh). – Catatan: contoh ini harus dipersiapkan sebelum sesi (lihat juga bagian Alat Bantu).
2. Peserta ditanya untuk memberi indikasi siapa yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program/ kegiatan tersebut.
3. Sesuai dengan jawaban, fasilitator menempelkan kartu atas papan *pinboard* pada kolom pertama: urusan wajib pemberdayaan perempuan atau kolom kedua: tugas pengarusutamaan gender (lihat alat bantu terlampir).
4. Dalam pelatihan ini bisa muncul diskusi tentang tumpang tindih kegiatan PUG dan pemberdayaan perempuan yang dalam praktek sering kali terjadi di tingkat daerah. Membahas situasi ini sebentar sebagai persiapan untuk presentasi tentang PUG dan pemberdayaan perempuan.

Langkah 2: Presentasi tentang PUG dan Pemberdayaan Perempuan (45 menit)

Tujuan: Mempertajam pengertian tentang PUG dan pemberdayaan perempuan dalam konteks pembangunan daerah

1. Fasilitator melanjutkan dengan presentasi singkat mengenai konsep PUG dan pemberdayaan perempuan dengan juga mengacu pada hasil *fish bowl*. Presentasi memperjelaskan keterkaitan antara PUG dan peningkatan hak-hak asasi manusia, dan khususnya hak perempuan.
2. Presentasi harus membedakan dengan sangat jelas antara PUG dan urusan wajib pemberdayaan perempuan karena ada tendensi untuk mencampurkan dua isu ini, sehingga agenda “kesetaraan gender” menjadi “agenda perempuan” saja.
3. Fasilitator juga dapat mengacu lagi kepada hasil dari praktikum dan *fish bowl* untuk memperjelas perbedaan antara PUG dan pemberdayaan perempuan.
4. Sebelum menutup sesi ini, fasilitator mempersilakan peserta untuk menyampaikan *input* atau komentar lain yang belum dimunculkan dalam proses *fish bowl* maupun dalam presentasi.

Langkah 3: Diskusi Fish Bowl (45 menit)

Tujuan: Membangun argumen mengenai urgensi PUG dan pemberdayaan perempuan serta peluang dan tantangan dalam implementasinya dalam pembangunan daerah

1. Fasilitator mengajak peserta untuk mendiskusikan mengenai tantangan PUG dan pemberdayaan perempuan di tingkat daerah dengan metode *fish bowl*. Lima kursi ditempatkan di depan dalam bentuk lingkaran.
2. Dalam metode ini diundang satu orang peserta sebagai pembicara voluntir dan duduk di kursi pembicara. Kemudian fasilitator mengundang empat peserta lain untuk duduk di lingkaran dan memberikan komentar baik sebagai pendukung (yang setuju dengan pendapat pembicara), penantang (yang tidak setuju), serta narasumber yang membantu.
3. Dua orang peserta dipilih sebagai “pelapor”. Mereka akan merangkum alur diskusi pada akhir sesi ini sebagai pelatihan presentasi. Masing-masing dapat dua menit.
4. Pembicara mempresentasikan argumennya tentang tantangan implementasi PUG dan pemberdayaan perempuan di tingkat daerah. Pembicara yang lain mengomentari secara cepat.
5. Jika satu pembicara merasa sudah memberi komentar secukupnya, dia akan keluar dari lingkaran dan orang lain dapat mengambil tempatnya untuk menyumbang dalam diskusi.
6. Setelah 10 menit menghentikan diskusi dan memberi kesempatan kepada peserta lain untuk duduk di kursi pembicara awal. Bila selesai persilakan orang untuk bertepuktangan.
7. Pelapor sesi masing-masing memberi rangkuman sesi *fish bowl*: poin-poin utama, perbedaan pendapat yang muncul, alasan perbedaan pengalaman peserta jika dapat disimpulkan dari sesi dan lain-lain.
8. Fasilitator secara singkat menanyakan bagaimana pandangan peserta mengenai proses ini

B. Alat Bantu

I. Lembar Kerja

1. Lembar Kerja Curah Gagasan PUG dan Pemberdayaan Perempuan

Contoh program dan kegiatan terkait PUG dan pemberdayaan perempuan

Nama Kegiatan	Urusan wajib pemberdayaan perempuan/ tanggungjawab BPP	Pengarusutamaan gender/ tanggungjawab SKPD lain
Urusan: Pendidikan		
Pemberian beasiswa pendidikan menengah dan tinggi bagi perempuan berprestasi		PUG, Dinas Pendidikan
Sosialisasi kepada organisasi perempuan tentang pentingnya pendidikan anak perempuan	Urusan wajib, BPP	
Pelatihan penyusunan data pilah gender bidang pendidikan	Urusan wajib BPP (pelayanan internal)	
Penyusunan data pilah gender bidang pendidikan		PUG, Dinas Pendidikan
Urusan xxx: ...		
...		

II. Presentasi

1. Konsep Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

a. Konsep Pengarusutamaan Gender (PUG)



b. Konsep Pengarusutamaan GenderKonsep

- Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi untuk mengurangi kesenjangan gender dan mencapai kesetaraan gender dengan cara menggunakan perspektif gender dalam proses pembangunan
- Pengarusutamaan gender adalah proses untuk menjamin perempuan dan laki-laki mempunyai akses dan kontrol terhadap sumber daya, memperoleh manfaat pembangunan dan pengambilan keputusan yang sama di semua tahapan proses pembangunan dan seluruh proyek, program, dan kebijakan pemerintah (Inpres 9/2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional)

Fungsi

- Pengarusutamaan gender merupakan satu strategi nasional yang merupakan strategi lintas bidang bersama dengan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik, yang berfungsi sebagai:
 - Landasan operasional bagi seluruh pelaksanaan pembangunan yang tertuang dalam RPJMN.
 - Prinsip-prinsip pengarusutamaan ini diarahkan untuk dapat tercermin di dalam keluaran pada kebijakan pembangunan.
 - Prinsip-prinsip pengarusutamaan akan menjadi jiwa dan semangat yang mewarnai berbagai kebijakan pembangunan di setiap bidang pembangunan (Perpres No. 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014).

Dasar Hukum

- UU No. 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi CEDAW
- Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
- Perpres No. 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014
- Permendagri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Implementasi PUG di Daerah

c. Konsep Pemberdayaan Perempuan

- Merupakan strategi afirmasi untuk mencapai kesetaraan gender yang bertujuan untuk:
 - meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan,
 - meningkatkan pemenuhan hak-hak perempuan atas perlindungan dari tindak kekerasan.
- Biasanya berwujud program dan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan praktis maupun strategis khusus perempuan
- Misalnya: penguatan kapasitas perempuan calon legislatif, penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga

d. Pengelolaan Pemberdayaan Perempuan

- Di tingkat nasional, pengelolaan urusan pemberdayaan perempuan berada pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Perpres No. 47 Tahun 2009 terkait Tugas Pokok dan Fungsi KPP & PA)
- Dalam konteks otonomi daerah, pemberdayaan perempuan merupakan salah satu urusan wajib daerah yang pengelolaannya diserahkan kepada SKPD yang dibentuk oleh masing-masing daerah (UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah)

e. Relasi PUG dan PP dalam Kewenangan Pemerintah Daerah

- Pada prinsipnya, PUG dan pemberdayaan perempuan sama-sama bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan
- Dalam konteks otonomi daerah, PUG tetap menjadi isu lintas bidang yang mewarnai seluruh kebijakan, program, dan kegiatan semua SKPD/sektor
- Manifestasi PUG bisa berwujud kegiatan khusus perempuan di sektor tersebut maupun tercermin

dari indikator kinerja hasil sektor masing-masing. Dengan kata lain, **implementasi strategi PUG menjadi tanggungjawab seluruh SKPD.**

- Sedangkan pemberdayaan perempuan merupakan salah satu urusan wajib daerah yang fungsinya harus dikerjakan oleh daerah melalui suatu organisasi (SKPD) yang ditugasi untuk melakukan fungsi tersebut. Biasanya **pelaksanaan pemberdayaan perempuan menjadi tanggungjawab Badan Pemberdayaan Perempuan (BPP)** atau nama lain sesuai dengan ketentuan PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

f. Program dan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan

- Sebagai suatu urusan wajib daerah, sesuai dengan ketentuan Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka program dan kegiatan PP yang menjadi tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) BPP memiliki nomenklatur (nama) program sebagai berikut:
 - Program Keserasian Peningkatan Kualitas Hidup Anak dan Perempuan
 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
 - Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
 - Program Peningkatan Peranserta Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
- Program-program di atas (serta kegiatannya) telah memiliki kode rekeningnya sendiri terkait yang menjadi dasar alokasi pendanaan dalam APBD
- Berdasarkan ketentuan tersebut, maka peran BPP di daerah adalah:
 - Menyelenggarakan program dan kegiatan urusan pemberdayaan perempuan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan dan meningkatkan pemenuhan hak-hak perempuan atas perlindungan dari tindak kekerasan
 - Memfasilitasi SKPD lainnya untuk mengimplementasikan strategi PUG dalam program dan kegiatan masing-masing SKPD

III. Bahan Bacaan

1. Kode dan Daftar Program dan Kegiatan Menurut Urusan Pemerintahan: Urusan Pemberdayaan Perempuan

Lampiran A. VII: Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor : 13 Tahun 2006

Tanggal : 15 Mei 2006

KODE DAN DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kode					Program dan Kegiatan
1	11				Pemberdayaan Perempuan
1	11	xx	15		Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
1	11	xx	15	01	Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
1	11	xx	15	02	Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik
1	11	xx	15	03	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak
1	11	xx	15	04	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
1	11	xx	15	05	Dan seterusnya...
1	11	xx	16		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1	11	xx	16	01	Advokasi dan fasilitasi PUG bagi Perempuan
1	11	xx	16	02	Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)
1	11	xx	16	03	Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak
1	11	xx	16	04	Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG)
1	11	xx	16	05	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
1	11	xx	16	06	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
1	11	xx	16	07	Evaluasi pelaksanaan PUG
1	11	xx	16	08	Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak
1	11	xx	16	09	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
1	11	xx	16	10	Dan seterusnya...
1	11	xx	17		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
1	11	xx	17	01	Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah
1	11	xx	17	02	Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT
1	11	xx	17	03	Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan
1	11	xx	17	04	Sosialisasi dan advokasi kebijakan penghapusan buta aksara perempuan (PBAP)
1	11	xx	17	05	Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan
1	11	xx	17	06	Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT
1	11	xx	17	07	Penyusunan profil perlindungan perempuan lansia dan cacat
1	11	xx	17	08	Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
1	11	xx	17	09	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
1	11	xx	17	10	Dan seterusnya...
1	11	xx	18		Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
1	11	xx	18	01	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
1	11	xx	18	02	Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peranserta dan kesetaraan gender
1	11	xx	18	03	Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera
1	11	xx	18	04	Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha
1	11	xx	18	05	Kegiatan pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan
1	11	xx	18	06	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
1	11	xx	18	07	Dan seterusnya

SESI 6

Data Pembuka Wawasan dan Analisis Gender

Tujuan	Membangun pemahaman dan keterampilan mengenai analisis gender dan kebutuhan data untuk analisis
Output	Peserta memahami dan bisa mengidentifikasi data pembukaan wawasan Peserta memahami analisis gender Peserta bisa menerapkan GAP sebagai alat analisis dalam perencanaan pembangunan Peserta bisa menghubungkan data gender dan aplikasi GAP dengan kerangka kinerja
Metode	Presentasi, Praktikum
Waktu	165 menit
Alat Bantu	I. Presentasi 1. Data Pembuka Wawasan 2. Alat Analisis Harvard 3. Alat Analisis Gender Analysis Pathway (GAP) II. Panduan Praktikum 1. Memaknai Data 2. Memaknai Data untuk Analisis Gender Metode Harvard 3. Gender Analysis Pathway (GAP) III. Contoh Aplikasi GAP
Perlengkapan	LCD projector, kartu-kartu metaplan, pinboard
Urgensi sesi	Sesi ini sangat penting karena menjadi dasar bagi peserta untuk masuk kepada sesi-sesi perencanaan dan penganggaran yang responsif gender. Dalam sesi ini peserta harus benar-benar membangun keterampilannya mengenai konsep dan penggunaan alat analisis gender yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat analisis dalam perencanaan dan penganggaran

A. Proses

Langkah 1: Presentasi: Data Pembuka Wawasan (30 menit)

Tujuan: Mengenali data pembuka wawasan serta urgensinya dalam proses analisis gender

1. Fasilitator mempresentasikan mengenai konsep dan contoh data pembuka wawasan secara singkat.
2. Fasilitator dan peserta membahas pengalaman dengan menggunakan data dalam rangka persiapan analisis gender. Fasilitator mengaju peserta untuk mendiskusikan bagaimana dapat memaknai data dalam rangka analisis gender di dua sektor terpilih. Sektor yang dipilih bukan sektor yang seringkali dibahas (seperti pendidikan atau kesehatan) melainkan sektor yang belum begitu peka gender, misalnya, pekerjaan umum, perhutanan, perikanan, dll.
3. Bersama-sama dibahas:
 - Data seperti apa yang dapat digali di dalam sektor ini dalam pelaksanaan analisis gender?
 - Data mana yang cocok bagi penyusunan program, data seperti apa yang diperlukan untuk menyusun kegiatan terkait?
 - Dari mana data ini bisa diperoleh?
4. Sejauh mungkin peserta mengidentifikasi data yang sudah ada daripada data yang harus dikembangkan baru, mengingat bahwa pada saat melaksanakan analisis gender, kita tidak dapat kembangkan data baru tetapi harus menggunakan yang sudah tersedia.
5. Hasil diskusi ini ditulis/didokumentasikan pada *pinboard*.

Langkah 2: Alat analisis metode Harvard (15 menit)

Tujuan: Memperjelas metode Harvard sebagai suatu alat analisis gender yang banyak digunakan oleh pemerintah

1. Fasilitator secara singkat mempresentasikan alat analisis metode Harvard.
2. Peserta dipersilakan untuk memberikan *input* sekaitan dengan pemahaman dan pengalaman mereka dengan penggunaan alat analisis ini.

Langkah 3: Pratikum: Memaknai Data untuk Analisis Gender dengan Metode Harvard (30 menit)

Tujuan: Peserta mengerti kategori analisis akses, partisipasi, kontrol dan manfaat, dan dapat memaknai konsep tersebut

1. Fasilitator membaca beberapa item data yang dicatat atas kartu-kartu metaplan (sekitar 15 contoh).
2. Peserta ditanya untuk memberi indikasi apakah data tersebut menggambarkan aspek “akses”, “partisipasi”, kontrol” atau “manfaat”.
3. Sesuai dengan jawaban, fasilitator menempelkan kartu pada satu tabel “Akses – Partisipasi – Kontrol – Manfaat” yang telah dipersiapkan atas papan *pinboard* (lihat alat di bawah).
4. Setelah semua contoh data ditempatkan, fasilitator akan mengomentari dan memperbaiki penempatan kartu data jika dianggap perlu.
5. Selanjutnya, fasilitator meminta peserta untuk memaknai data ini: apa yang dapat kita pelajari dari data seperti itu tentang misalnya aspek “akses”. Hasilnya dicatat di bawahnya (lihat contoh tabel di bagian Alat Bantu).

Langkah 4: Presentasi: Alat Analisis Gender Analysis Pathway (GAP) (30 menit)

Tujuan: Memperjelas konsep dan langkah GAP sebagai alat analisis gender yang banyak digunakan oleh pemerintah

1. Fasilitator menyampaikan presentasi mengenai GAP secara singkat
2. Fasilitator mempersilakan peserta untuk memberikan *input* dan tanggapan

Langkah 5: Pratikum: Melaksanakan GAP untuk Suatu Kegiatan (60 menit)

Tujuan: Peserta menerapkan metode GAP dan mengerti kaitan dengan pendekatan manajemen berbasis kinerja dan kerangka kinerja

1. Fasilitator membagikan lembar kerja GAP dan menjelaskan tugas/pratikum yang akan dilakukan oleh setiap kelompok.
2. Setiap kelompok diminta untuk mengaplikasikan langkah-langkah GAP berdasarkan satu kegiatan tertentu berdasarkan contoh yang diberi oleh fasilitator. Sekali lagi, kelompok akan memakai contoh sektoral yang telah dipakai di atas, misalnya salah satu kegiatan dari kerangka kinerja yang diperkenalkan pada awal pelatihan.
3. Fasilitator mendampingi peserta dalam melakukan praktikum. Peserta mendokumentasikan hasil kerja di atas *pinboard*. Selama analisis, fasilitator juga menyoroti keterkaitan metode ini dengan pendekatan manajemen berbasis kinerja dan khususnya kerangka kinerja (kolom mana mengacu ke tingkat dampak – *outcome* – *output* – kegiatan).
4. Hasil kerja kelompok ditempel di tempat yang dapat terbaca oleh semua peserta.
5. Persilakan setiap orang untuk melihat hasil diskusi kelompok yang telah ditempelkan tersebut
6. Fasilitator kemudian menggali informasi dari peserta mengenai pengalaman mereka dalam melakukan praktikum tersebut, apa hal-hal menarik yang mereka temukan dalam upaya menggunakan metode GAP ini.

B. Alat Bantu

I. Presentasi

1. Data Pembuka Wawasan

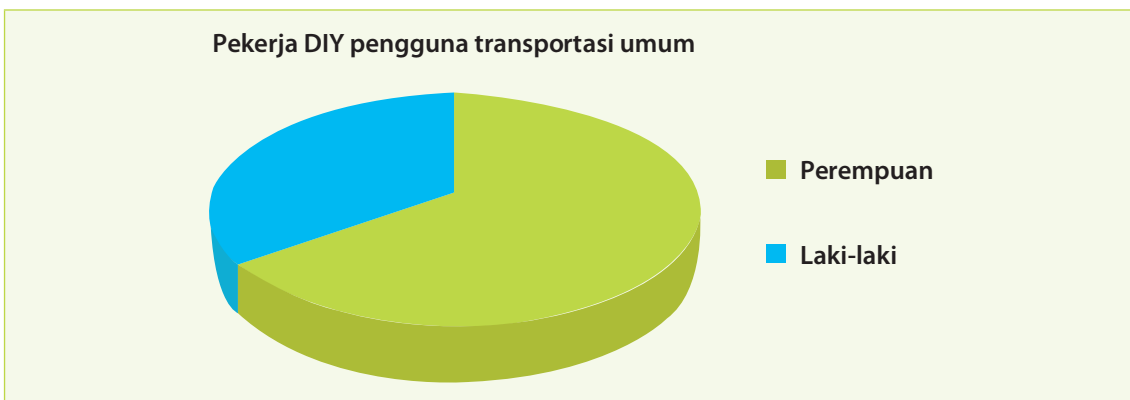
a. Data Pembuka Wawasan

- Merupakan data atau informasi untuk memperlihatkan adanya kesenjangan gender yang cukup berarti.
- Data pembuka wawasan sebaiknya merupakan data pilah berdasarkan jenis kelamin yang menjelaskan tingkat kesenjangan. Namun tidak semua data pembuka wawasan merupakan data pilah menurut jenis kelamin, tetapi merupakan data atau informasi yang menjelaskan insiden khusus yang tidak bisa diperbandingkan antar jenis kelamin, misalnya data tentang kekerasan terhadap perempuan, angka kematian ibu

b. Sumber dan Jenis Data

- Data pembuka wawasan bisa berupa data dan informasi:
 - Hasil studi *baseline* (idealnya harus dilakukan studi *baseline* sebelum kebijakan/program/kegiatan dimulai), atau
 - Hasil intervensi kebijakan/program/kegiatan yang sedang dan sudah dilakukan ataupun data yang berupa pencatatan pelaporan internal K/L/SKPD tentang intervensi yang sudah dan sedang dilakukan
- Jenis data bisa berupa:
 - Data statistik yang kuantitatif, misalnya data BPS, data sektor, atau data sekunder yang relevan lainnya
 - Data kualitatif; misalnya data yang diperoleh dari hasil observasi, FGD, dan wawancara mendalam, atau data hasil riset kualitatif

c. Contoh: Data Pembuka Wawasan yang Berupa Data Pilah



- Data di atas memberikan gambaran mengenai proporsi laki-laki dan perempuan pekerja di DIY yang menggunakan transportasi umum.
- Gambaran memberikan wawasan kepada kita:
 - Perempuan dan laki-laki sama-sama merupakan pengguna transportasi umum
 - Persentase perempuan lebih tinggi dari laki-laki dalam menggunakan moda transportasi ini.
- Informasi ini dapat digunakan sebagai informasi dasar mengenai kebutuhan, prioritas dan tingkat kepuasan perempuan dan laki-laki pengguna moda transportasi ini ketika melakukan intervensi terkait dengan perbaikan pelayanan transportasi umum.
- Contoh intervensi: halte bis haruslah dekat dengan pemukiman, dalam kondisi aman dan terang saat malam sehingga menjaga keamanan perempuan yang pulang malam hari dari pekerjaan mereka

2. Alat Analisis Harvard

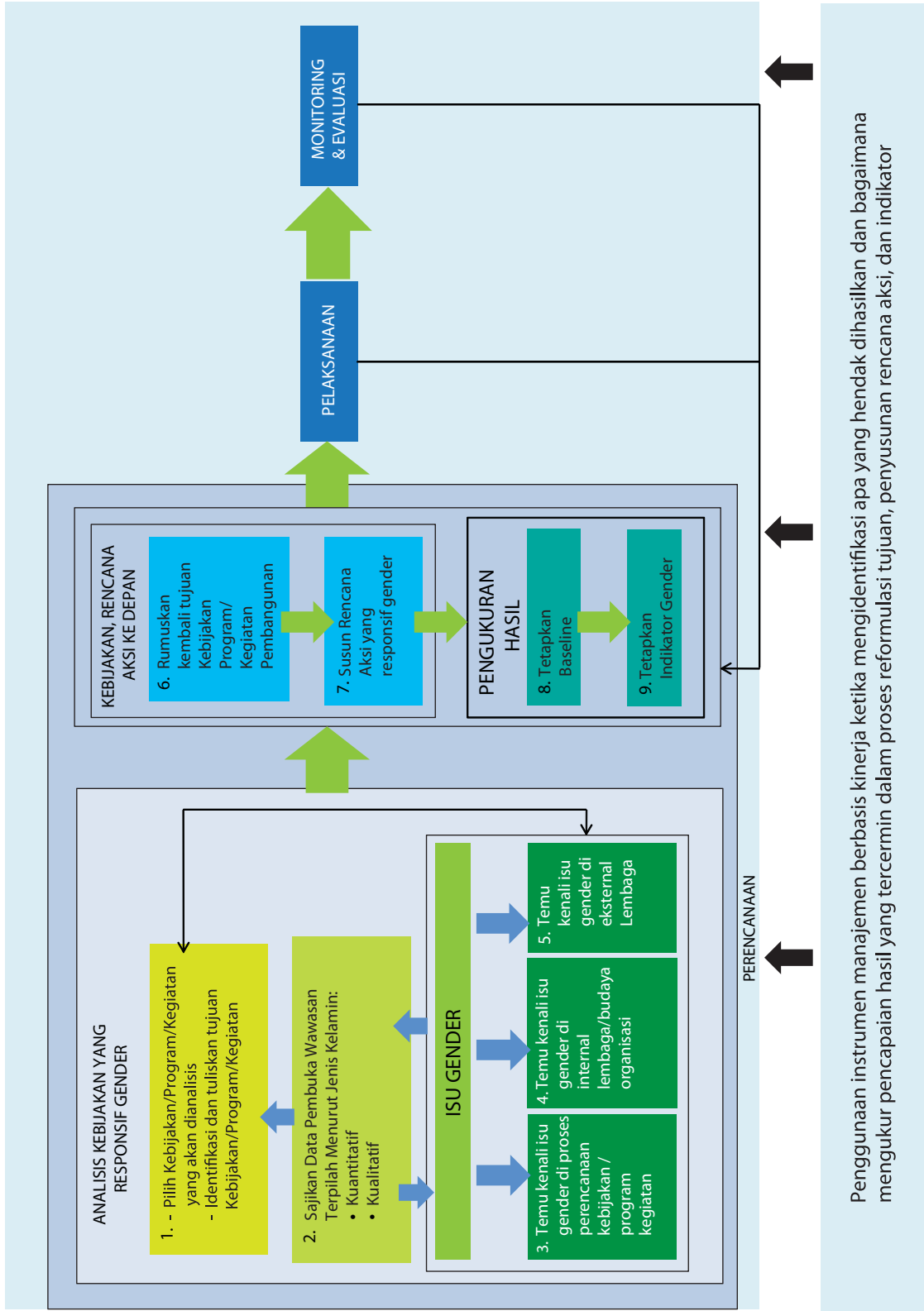
- Merupakan alat suatu analisis gender yang mempertanyakan siapa yang memiliki akses dan kontrol terhadap sumber daya atau intervensi pembangunan (kebijakan/ program/ kegiatan/ dana).
- Terdiri dari empat fokus analisis yakni: akses, partisipasi, kontrol, manfaat
 - **Akses:** Apakah intervensi pembangunan memberi ruang atau membuka pintu bagi laki-laki dan perempuan untuk terlibat dan mendapatkan manfaat dari intervensi tersebut.
 - **Partisipasi:** Apakah laki-laki dan perempuan terlibat secara nyata dalam proses intervensi tersebut. Bilamana tidak, apa kendala yang dihadapi?
 - **Kontrol:** Apakah laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki kekuatan/kekuasaan terhadap pengambilan keputusan terkait dengan intervensi tersebut
 - **Manfaat:** Apakah intervensi itu benar-benar menguntungkan laki-laki dan perempuan? Keuntungan mana yang akan bertambah, atau mana yang akan menguntungkan untuk laki-laki dan mana yang akan menguntungkan untuk perempuan?
- Proses analisis ini akan menghasilkan data yang digunakan sebagai data dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan
- Metode Harvard merupakan salah satu aspek penting dalam analisis metode Gender Analysis Pathway (GAP) yang direkomendasikan secara nasional

3. Gender Analysis Pathway (GAP)

a. Latar Belakang

- Merupakan salah satu alat analisis yang dirancang untuk membantu para perencana melakukan analisis gender dalam rangka mengarusutamakan gender dalam perencanaan kebijakan/program/kegiatan pembangunan. Penggunaan GAP direkomendasikan dalam kebijakan berupa Inpres 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan juga Permendagri 15/ 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah
- Terdiri dari dua komponen utama yaitu; 1) tahap analisis yang terdiri dari lima langkah (lihat Langkah 1-5 dalam Skema GAP), dan 2) tahap mengintegrasikan gender ke dalam rencana aksi yang terdiri dari empat langkah (lihat Langkah 6-9 dalam Skema GAP)
- Pada prinsipnya, GAP juga mengadopsi prinsip manajemen berbasis kinerja (MBK), yakni ada pengukuran pada kerangka kinerja pada rencana aksi yang dirumuskan (langkah 6-9)

b. Alur Kerja Analisis Gender (Gender Analysis Pathway/ GAP)



II. Panduan Praktikum

1. Memaknai Data untuk Analisis Gender dengan Metode Harvard

- Lihat kembali hasil praktikum sebelumnya tentang memaknai data
- Lihat data/informasi dalam daftar berikut:
 - Rasio laki-laki dan perempuan ikut pelatihan penyuluhan pertanian
 - Rasio anak laki-laki dan perempuan yang terlibat dalam wajib belajar
 - Dana kredit UKM yang diperuntukkan laki-laki dan perempuan pelaku ekonomi mikro
 - Sarana transportasi untuk pekerja pabrik garmen
 - Ketersediaan air bersih untuk memcuci dan memasak
 - Rasio laki-laki dan perempuan kepala keluarga yang mengambil keputusan dalam rapat RT
 - Rasio laki-laki dan perempuan yang mendaftarkan usaha atas nama mereka sendiri
 - Perempuan lebih banyak memiliki waktu mengembangkan keterampilan karena waktu memasak berkurang dengan menggunakan kompor gas
- Manakah data/informasi ini yang mencerminkan aspek akses, partisipasi, kontrol ataukah manfaat? Tulis data di atas kartu dan pasang di *pinboard* sesuai dengan tabel di bawah ini.
- Kembangkan lagi data dan informasi yang diperlukan bilamana sektor anda akan melakukan analisis gender dengan menggunakan metode Harvard.
- Apa makna dari masing-masing data/informasi bagi analisis gender? Catat hasil di atas kartu dan pasang di bagian bawah tabel.

Tabel Praktikum: Memaknai Data

	Akses	Partisipasi	Kontrol	Manfaat
DATA	<input type="text" value="data"/> <input type="text" value="data"/> <input type="text" value="data"/>	<input type="text" value="data"/> <input type="text" value="data"/>	<input type="text" value="data"/> <input type="text" value="data"/>	<input type="text" value="data"/> <input type="text" value="data"/>
	↓	↓	↓	↓
MAKNA	<input type="text" value="makna"/>	<input type="text" value="makna"/> <input type="text" value="makna"/>	<input type="text" value="makna"/>	<input type="text" value="makna"/>

2. Gender Analisis Pathway (GAP)

- Lihat hasil dua praktikum sebelumnya (Memaknai Data dan Analisis Harvard).
- Lihatlah kembali skema GAP dalam presentasi, dan juga lembar kerja GAP di bawah ini.
- Ambil contoh satu kebijakan/program/kegiatan dalam sektor yang menjadi topik diskusi anda pada dua praktikum sebelumnya. Misalnya: program hortikultura dalam sektor pertanian; program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dalam sektor perhubungan.
- Lakukan analisis gender pada program/kegiatan tersebut dengan menggunakan alat analisis GAP.
- Masukkan hasil analisis gender dalam tabel lembar kerja GAP.
- Identifikasi kerangka kinerja, rencana aksi dan pengukuran hasil pada kolom 6-9. Perhatikan:
 - Jika melaksanakan GAP untuk program, rumuskan baik "dampak" maupun "outcome".
 - Jika menganalisis kegiatan, rumuskan "dampak", "outcome" dan "output"

Lembar Kerja Analisis GAP, Termasuk Identifikasi Kerangka Kinerja, Rencana Aksi dan Pengukuran

Keb/Prog/Keg	Isu Gender			Ren. Aksi		Pengukuran Hasil		
	Data Pembuka Wawasan	Kesenjangan	Internal	Eksternal	Perumusan kembali	Rencana Aksi	Baseline	Indikator
(1) Pemilihan/penentuan kebijakan/program/kegiatan pembantuan yang akan dianalisis dengan fokus melihat pada tujuan dari kebijakan/program/kegiatan tersebut	(2) Penggunaan data pembuka wawasan untuk memberi gambaran kesenjangan gender terkait dengan kebijakan/program/kegiatan tersebut. Data bisa berupa data kuantitatif maupun kualitatif	(3) Menemukan isu gender dengan menggunakan alat analisis Harvard, yakni: akses, partisipasi, kontrol dan manfaat laki-laki dan perempuan terkait dengan kebijakan/program/kegiatan tersebut	(4) Menemukan isu gender di internal lembaga yang akan memproduksi kebijakan/program/kegiatan tersebut baik dari sisi individual staf (misalnya persepsi), mekanisme kerja maupun kebijakan-kebijakan lainnya. Apa yang menyebabkan isu gender tersebut?	(5) Menemukan isu gender di luar lembaga pada saat proses perencanaan yang fokus pada faktor-faktor penghambat pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan tersebut terkait dengan persepsi masyarakat atau nilai-nilai budaya lainnya	(6) Perumusan kembali (reformulasi) tujuan kebijakan/program/kegiatan sehingga tujuannya menjadi lebih responsif gender	(7) Penyusunan rencana aksi yang responsif gender yang merujuk pada hasil reformulasi tujuan	(8) Penetapan baseline, yaitu data dasar yang dipilih sebagai titik awal untuk mengukur kemajuan pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan tersebut. Data dasar tersebut dapat diambil dari data pembuka wawasan yang ada pada langkah 2	(9) Penetapan indikator gender, yakni ukuran kuantitatif maupun kualitatif untuk memperlihatkan tingkat perubahan pada tingkatan hasil (dampak, outcome dan output)
	Rumuskan - dampak - outcome (tingkat program)	Rumuskan rencana aksi	Rumuskan nilai baseline	Rumuskan nilai target kinerja	Rumuskan - dampak - outcome (tingkat kegiatan)			

III. CONTOH APLIKASI GAP

1. Contoh Analisis GAP di Dinas Binamarga Provinsi X

LANGKAH 1	LANGKAH 2	LANGKAH 3	LANGKAH 4	LANGKAH 5	LANGKAH 6	LANGKAH 7	LANGKAH 8	LANGKAH 9
Kebijakan atau program atau kegiatan yang akan dianalisis	Data Pembuka Wawasan.	Faktor Kesenjangan (Akse, Partisipasi, Kontrol, Manfaat)	Isu Gender	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Target) Pindahkan Kolom 2 ke 8	Indikator Gender
Program Peningkatan jalan dan penggantian jembatan. Kegiatan Pembebasan tanah jaringan jalan lintas selatan. Tujuan mendukung pengembangan perekonomian antar wilayah.	Data pemilik lahan (laki-laki dan perempuan) Jumlah laki-laki dan perempuan pelaku usaha	Akses: Laki-laki lebih banyak dilibatkan dalam sosialisasi dan penetapan harga dibanding perempuan Partisipasi: Laki-laki lebih banyak hadir dalam pertemuan sosialisasi dibanding Perempuan Kontrol: Pengambilan keputusan atas harga lahan tidak berada pada perempuan walaupun hak milik atas tanah ada pada perempuan. Manfaat: Laki-laki lebih menikmati keuntungan finansial dibanding perempuan	Tidak terstrukturnya data kepemilikan lahan Masih ada anggapan di pemerintah bahwa pemilik lahan adalah laki-laki sebagai kepala keluarga; juga anggapan pelaku usaha hanya laki-laki Belum ada kajian mengenai dampak pembebasan lahan bagi laki-laki dan perempuan	Dalam masyarakat, laki-laki lebih dominan mengambil keputusan terutama menyangkut sumber daya (tanah, lahan). Perempuan merasa takut dan malas mengurus pembebasan lahan walaupun hak milik tanah atas namanya, sehingga menyerahkan kepada suami atau keluarga laki-laki	Tujuan Program: Mendukung perekonomian antar wilayah melalui peningkatan mobilitas laki-laki dan perempuan pelaku ekonomi Tujuan Kegiatan: Melakukan pembebasan lahan secara adil dengan memperhatikan kepentingan laki-laki dan perempuan sebagai pemilik lahan dan pelaku usaha	Penstrukturan data kepemilikan lahan Kajian mengenai dampak pembebasan lahan bagi laki-laki dan perempuan Pemberian informasi yang berimbang mengenai proses pembebasan lahan dan penetapan harga kepada laki-laki dan perempuan Keterampilan pengembangan usaha bagi laki-laki dan perempuan yang terkena dampak pembebasan lahan	Data pemilik lahan (laki-laki dan perempuan) Jumlah laki-laki dan perempuan pelaku usaha	Laki-laki dan perempuan pemilik lahan yang mendapatkan informasi mengenai pembebasan lahan dan penetapan harga (indikator <i>output</i>) Kesepakatan dengan pemilik lahan, laki-laki dan perempuan, mengenai pemanfaatan lahan dan jumlah ganti rugi (<i>output</i>) Laki-laki dan perempuan pelaku usaha yang memanfaatkan jalan dan jembatan (indikator hasil)

BAGIAN 2

Perencanaan Daerah yang Responsif Gender

Cakupan:

- **Sesi 7: Mekanisme Perencanaan di Daerah**
- **Sesi 8: Perencanaan yang Responsif Gender**
- **Sesi 9: Integrasi Gender dalam Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah**
- **Sesi 10: Integrasi Gender dalam Dokumen Perencanaan Tahunan**
- **Sesi 11: Integrasi Gender dalam Proses Musrenbang**

SESI 7

Mekanisme Perencanaan di Daerah

Tujuan	Memperkuat pemahaman mengenai konsep dan mekanisme perencanaan di daerah, serta terampil menyusun indikator perencanaan berbasis kinerja
Output	Peserta memahami konsep dan mekanisme perencanaan di daerah, memahami dokumen-dokumen kunci perencanaan, dan mampu menyusun indikator dalam kerangka kinerja
Metode	Curah gagasan, presentasi, praktikum
Waktu	90 menit
Alat Bantu	I. Presentasi 1. Pendekatan Perencanaan dan Sinkronisasi antara Perencanaan dan Penganggaran II. Panduan Praktikum 1. Mengembangkan Isu Strategis dalam Perencanaan III. Bahan Bacaan untuk Peserta 1. Muatan Dokumen Perencanaan Daerah 2. Skema Penyusunan Perencanaan Daerah 3. Tahapan Musrenbang di Daerah
Perlengkapan	<i>Pinboard</i> , kartu-kartu metaplan, spidol, <i>sticky notes</i> , <i>LCD projector</i>
Urgensi sesi	Informasi mengenai konsep dasar dan mekanisme perencanaan di daerah merupakan satu aspek yang sangat penting untuk menerapkan PPRG, karena PPRG merupakan suatu proses mengintegrasikan dimensi gender dalam proses perencanaan dan penganggaran tersebut. Tanpa informasi yang jelas mengenai konsep dan mekanisme perencanaan, seorang fasilitator PPRG akan kehilangan esensi. Dalam sesi ini peserta akan diajak untuk memahami kerangka, pendekatan dan cakupan dokumen perencanaan mulai dari yang strategis hingga yang tahunan. Dalam sesi ini, peserta juga diajak untuk mengembangkan keterampilan dalam menyusun kerangka dan indikator kinerja dengan mengacu kepada hasil diskusi pada sesi sebelumnya, terutama sesi mengenai MBK dan Analisis Gender

A. Proses

Langkah 1: Curah Gagasan (20 menit)

Tujuan: Menggali pengetahuan dan pengalaman peserta mengenai aspek-aspek perencanaan daerah

1. Mintalah peserta menuliskan kata kunci yang mencerminkan tentang perencanaan di daerah di atas sehelai kartu-kartu metaplan. Setiap kartu-kartu metaplan hanya memuat satu kata kunci saja. Tempelkan kartu tersebut secara acak di *pinboard*.
2. Bersama dengan peserta, fasilitator mengelompokkan kata kunci yang tertulis dalam kartu tersebut berdasarkan isu utama, misalnya: jenis-jenis perencanaan, aktor dalam perencanaan, proses dan mekanisme, kaitan perencanaan dan penganggaran, masalah sinkronisasi antara perencanaan.
3. Persilakan beberapa peserta untuk menjelaskan atau menyampaikan pengalaman mereka terkait dengan isu-isu tersebut.
4. Catat poin-poin utama hasil curah gagasan ini di papan.

Langkah 2: Presentasi: Pendekatan Perencanaan dan Sinkronisasi antara Perencanaan dan Penganggaran (40 menit)

Tujuan: Memperjelas tentang konsep dasar perencanaan dan penyusunan dokumen perencanaan

1. Presentasikan secara singkat tentang skema perencanaan, pengertian dan muatan dokumen perencanaan, serta skema penyusunan dokumen perencanaan.
 - Apa dan bagaimanakah pendekatan yang dipakai dalam perencanaan pembangunan
 - Bagaimanakah keterkaitan antara perencanaan pembangunan di tingkat pusat dengan di tingkat daerah
 - Bagaimana proses dan mekanisme penyusunan dokumen perencanaan
 - Bagaimanakah keterkaitan antara proses perencanaan dengan proses penganggaran
 - Aktor kunci dalam perencanaan di daerah

Dalam memberikan presentasi, fasilitator dapat merujuk pula pada poin-poin yang telah dirumuskan dalam curah gagasan (dalam langkah 1)

2. Fasilitator kemudian membagikan bahan bacaan untuk peserta: a) muatan dokumen perencanaan daerah, b) skema proses penyusunan perencanaan daerah, c) tahapan Musrenbang.
3. Beri waktu sekitar 10 menit kepada peserta untuk membaca kedua bahan bacaan tersebut.
4. Beri kesempatan untuk diskusi interaktif baik mengenai presentasi maupun bahan bacaan.

Langkah 3: Praktikum: Mengembangkan Isu Strategis dalam Perencanaan (30 menit)

Tujuan: Membangun keterampilan mengidentifikasi muatan dokumen perencanaan berdasarkan satu isu strategis serta menyusun indikator kinerja utama

1. Fasilitator menyampaikan mengenai satu isu strategis yang dihadapi oleh suatu wilayah perkotaan Y. Isu strategis ini adalah “*Rendahnya kualitas hidup manusia Kota Y*”.
2. Fasilitator mengajak setiap kelompok melakukan praktikum, bagaimana membawa isu tersebut dalam proses dan dokumen perencanaan strategis (RPJMD dan Renstra) dan perencanaan operasional (RKPD dan Renja SKPD), menyusun kerangka kerjanya serta mengidentifikasi aktor kunci yang terlibat dalam proses tersebut.

Dalam melakukan praktikum, kelompok mengacu pada panduan praktikum terlampir.

3. Setelah proses selesai, dipersilakan setiap kelompok untuk saling melihat hasil praktikum kelompok lain dan melakukan proses dialog dan tanya jawab dengan kelompok tersebut

B. Alat Bantu

I. Presentasi

1. Pendekatan Perencanaan dan Sinkronisasi antara Perencanaan dan Penganggaran

a. Pendekatan Perencanaan Pembangunan



- Masing-masing pendekatan memiliki karakter dan aktor kunci yang berbeda
- Komposisi di antara pendekatan antardaerah tidaklah sama. Ini akan dipengaruhi oleh konstelasi politik di satu wilayah yang bersifat khas

b. Definisi Perencanaan Pembangunan

- Menurut UU No. 25 tahun 2004, perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
- Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.
- Perencanaan pembangunan di daerah sebetulnya tidak terpisah dari perencanaan pembangunan di tingkat nasional, sebagaimana disebutkan dalam PP No. 8 tahun 2008 (pasal 2 ayat 1).

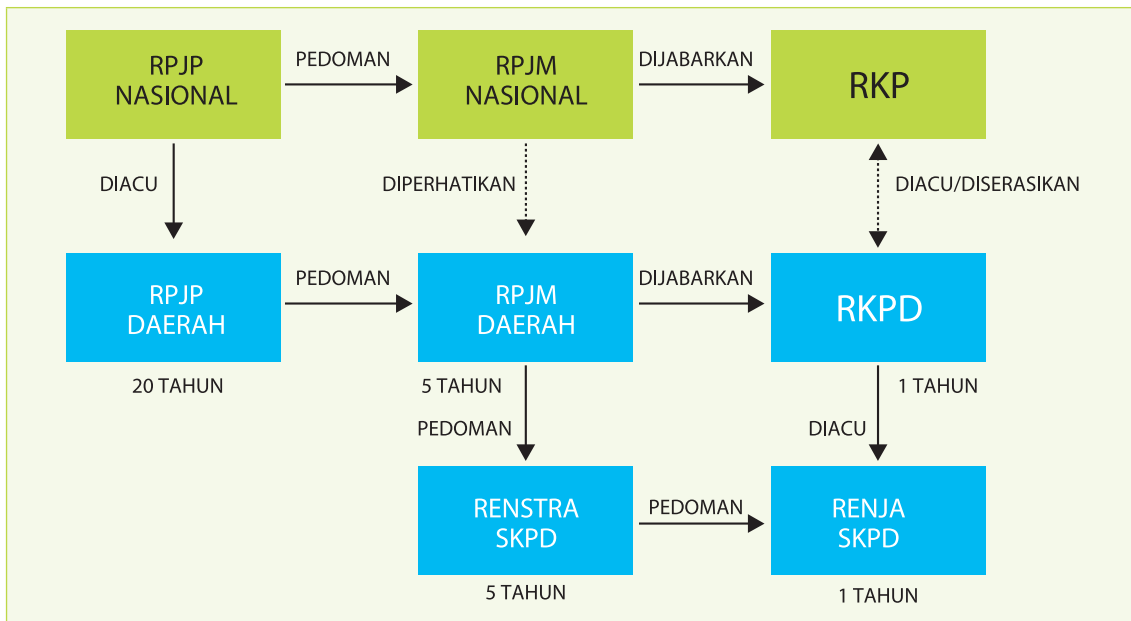
d. Agenda waktu penyusunan perencanaan dan penganggaran tahunan

No.	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab/ Koordinator Pelaksana
1.	Penyusunan Renja SKPD	Minggu II-IV Januari	SKPPD-Bappeda
2.	Rancangan awal RKPD	Minggu I-III Pebruari	SKPPD-Bappeda
3.	Musrenbang Desa/Kelurahan, Kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten/Kota	Minggu IV Pebruari-Minggu II April	SKPPD-Bappeda
4.	Rancangan akhir RKPD	Minggu III April-Minggu II Mei	SKPPD-Bappeda
5.	Rancangan awal KUA	Minggu III Mei-Minggu II Juni	TAPD-SKPKD-SKPPD
6.	Kesepakatan KUA	Minggu I Juli	SKPKD/PPKD/BUD-TAPD
7.	Rancangan awal PPAS	Minggu II Juli	SKPKD/PPKD/BUD-TAPD
8.	Kesepakatan PPA	Minggu III Juli	SKPKD/PPKD/BUD-TAPD
9.	Nota Kesepakatan KUA dan PPA	Minggu IV Juli	SKPKD/PPKD/BUD-TAPD
10.	Penyusunan RKA-SKPD	Minggu I Agustus	SKPKD/PPKD/BUD-TAPD
11.	Penyiapan Raperda APBD	September	SKPKD/PPKD/BUD-TAPD
12.	Penetapan APBD	Paling lambat 31 Desember	SKPKD/PPKD/BUD-TAPD
13.	Pelaksanaan APBD	Paling lambat 7 hari setelah DPA-SKPD yang telah disahkan disampaikan kepada Kepala SKPD, Inspektorat, BPK	SKPKD/PPKD/BUD-TAPD

Keterangan:

- SKPPD: Satuan kerja Pengelola Perencanaan daerah
- SKPKD: Satuan kerja Pengelola Keuangan Daerah
- TAPD: Tim Anggaran Pemerintah Daerah
- PPKD: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
- BUD: Bendaharawan Umum Daerah

e. Dokumen-dokumen Perencanaan di Daerah



- Perencanaan di daerah terdiri dari perencanaan strategis dan perencanaan operasional:
 - o Perencanaan strategis terdiri dari Perencanaan Jangka panjang Daerah (RPJPD) dan Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD) yang disusun setiap lima tahun.
 - o Perencanaan operasional terdiri dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDA) dan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) yang disusun setiap tahun.
- RPJMD akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDA).
- Di level SKPD, Rencana Strategis (Renstra) SKPD akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD.
- Untuk menjamin konsistensi antara perencanaan di level daerah dengan di level SKPD, RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD, dan RKPDA akan diacu dalam penyusunan Renja SKPD.

f. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

- Forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
- Bentuk pendekatan partisipatif dalam proses perencanaan pembangunan.
- Dilaksanakan dalam kerangka perencanaan jangka panjang, menengah maupun tahunan.
- Dilaksanakan oleh Bappeda dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- Dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan dan penyesepakatan rancangan awal dokumen perencanaan
- Di daerah, Musrenbang terdiri dari tahap desa hingga provinsi.

II. Panduan Praktikum

1. Mengembangkan Isu Strategis dalam Perencanaan

- Kelompok merumuskan muatan RPJMD, Renstra SKPD, RKPd dan Renja SKPD untuk isu strategis berikut dengan mengacu pada pertanyaan kunci yang telah disediakan.
- Dalam merumuskan muatan Renstra SKPD dan Renja SKPD, kelompok mengambil satu contoh SKPD yang sangat relevan dengan isu strategis yang ada, misalnya: Dinas Kesehatan, Dinas Bina Marga, Dinas Tenaga Kerja.
- Identifikasi aktor-aktor kunci yang terlibat dalam setiap proses perencanaan.
- Dokumentasikan hasil praktikum dengan kartu metaplan dalam bentuk matriks seperti di bawah ini di atas *pinboard*.

Isu Strategis: “Rendahnya Kualitas Hidup Manusia Kota Y”

Dokumen	RPJMD (lima tahun)	Renstra SKPD (lima tahun): pilih satu SKPD	RKPd (satu tahun)	Renja SKPD (satu tahun)
Pertanyaan kunci terkait dengan muatan dokumen	<p>Rumuskan isi, misi, tujuan, dan sasaran terkait dengan isu strategis</p> <p>Apa kebijakan umum dan program pembangunan daerah yang relevan untuk menjawab isu strategis</p> <p>Rumuskan kerangka kinerja <i>outcome</i> untuk setiap program indikator</p> <p>SKPD mana yang akan mengampu program tersebut?</p>	<p>Berdasarkan tugas pokok dan fungsi SKPD, rumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran</p> <p>Rumuskan rencana program dan kegiatan utama terkait dengan isu strategis</p> <p>Rumuskan indikator <i>outcome</i> dan <i>output</i> terkait dengan program dan kegiatan tersebut</p>	<p>Tulis kembali program prioritas pembangunan daerah untuk tahun yang akan berjalan serta indikator kinerja tahunannya</p>	<p>Tulis kembali kebijakan dan program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh SKPD serta indikator kinerjanya</p>
Identifikasi aktor kunci yang terlibat				

III. Bahan Bacaan untuk Peserta

1. Muatan Dokumen Perencanaan di Daerah

Dokumen	Level dan Durasi	Pengertian	Muatan/outline
RPJMD	Daerah; lima tahun	Penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional. Memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka kebijakan dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendahuluan; b. gambaran umum kondisi daerah; c. gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan; d. analisis isu-isu strategis; e. visi, misi, tujuan, dan sasaran; f. strategi dan arah kebijakan; g. kebijakan umum dan program pembangunan daerah; h. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan; i. penetapan indikator kinerja daerah; dan j. pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.
Renstra SKPD	Sektor/ SKPD; lima tahun	Visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendahuluan; b. gambaran pelayanan SKPD; c. isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi; d. visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan; e. rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; f. indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
RKPD	Daerah; satu tahun	Penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> a. Rancangan kerangka ekonomi daerah; b. program prioritas pembangunan daerah; c. rencana kerja; dan d. pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif.
Renja SKPD	Sektor/ SKPD; satu tahun	Rencana Kerja SKPD yang memuat kebijakan dan program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh SKPD.	<ul style="list-style-type: none"> a. Kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. b. Program dan kegiatan meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.

2. Penyusunan Perencanaan

Catatan: berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

- Bappeda menyusun rancangan awal RPJMD.
- Bappeda menyempurnakan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD sebagai masukan.
- Rancangan akhir RPJMD dirumuskan oleh Bappeda berdasarkan hasil Musrenbang.
- Pembahasan rumusan rancangan akhir RPJMD dipimpin oleh Kepala Daerah.
- RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah

b. Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD)

- SKPD menyusun Renstra-SKPD.
- Kepala SKPD menyusun Rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan rancangan awal RPJMD
- Rancangan Renstra-SKPD disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Bappeda.
- Renstra-SKPD ditetapkan dengan keputusan kepala SKPD.

c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

- Bappeda menyusun rancangan awal RKPD.
- Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD menggunakan rancangan Renja-SKPD dengan Kepala SKPD.
- Rancangan RKPD menjadi bahan Musrenbang RKPD.
- Hasil Musrenbang RKPD menjadi dasar perumusan rancangan akhir RKPD oleh Bappeda. Rancangan akhir RKPD disusun oleh Bappeda berdasarkan hasil Musrenbang RKPD, dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju
- RKPD Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, dan RKPD Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.
- RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

3. Tahapan Musrenbang di Daerah

Tahapan	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Kab/Kota	Provinsi
PENGERTIAN	forum musyawarah perencanaan pembangunan tahunan desa dan kelurahan yang melibatkan para pelaku pembangunan desa dan kelurahan	forum musyawarah perencanaan pembangunan tahunan kecamatan yang melibatkan para pelaku pembangunan di kecamatan	forum musyawarah perencanaan pembangunan tahunan kabupaten dan kota yang melibatkan para pelaku pembangunan kabupaten dan kota	forum musyawarah perencanaan pembangunan tahunan provinsi yang melibatkan para pelaku pembangunan provinsi
MASUKAN	dokumen perencanaan, hasil evaluasi, daftar prioritas masalah desa/kelurahan dan kelompok masyarakat	dokumen prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil Musrenbang desa/kelurahan, hasil evaluasi pembangunan kecamatan, rancangan awal RKPD kabupaten/kota	dokumen prioritas program dan kegiatan pembangunan yang berasal dari kecamatan, evaluasi kinerja pembangunan daerah tahun sebelumnya, rancangan RKPD Kabupaten/Kota, Renja OPD, Rancangan Awal RKPD Provinsi	daftar prioritas program dan kegiatan pembangunan yang berasal dari kabupaten/kota, Rancangan Akhir RKPD Kabupaten/Kota, evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan daerah tahun sebelumnya, Rancangan RKPD Provinsi, hasil Pra Musrenbang, Rancangan Renja hasil forum OPD, Rancangan Renja KL, Rancangan RKP
KELUARAN	daftar prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APB Desa, swadaya serta kegiatan yang akan diusulkan ke kecamatan untuk dibiayai dari APBD Kabupaten dan kota, APBD Provinsi, APBN/BLN dan sumber dana lainnya serta berita acara Musrenbang Desa/Kelurahan	daftar prioritas program dan kegiatan yang akan disampaikan pada Musrenbang Kabupaten/Kota, berita acara Musrenbang Kecamatan	daftar prioritas program dan kegiatan pembangunan yang sudah dipilah berdasarkan sumber pembiayaan dari APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBN dan sumber pendanaan lainnya serta berita acara Musrenbang Kabupaten/Kota	hasil penyempurnaan RKPD Provinsi, penyesuaian rancangan RKP dan Renja KL dengan RKPD Provinsi dan RKPD Kabupaten/Kota, prioritas program dan kegiatan yang akan diusulkan pada Musrenbangnas
Waktu Pelaksanaan	Januari	Februari	Maret	April

BAGIAN 2

SESI 8

Perencanaan yang Responsif Gender

Tujuan	Memperkuat pemahaman mengenai konsep perencanaan responsif gender beserta kerangka regulasi serta membangun keterampilan dalam merumuskan isu strategis gender yang menjadi dasar dalam menyusun perencanaan responsif gender serta indikator kinerjanya
Output	Peserta semakin paham mengenai substansi perencanaan responsif gender; terampil merumuskan isu strategis dan mampu menyusun kerangka kinerja terkait dengan isu strategis
Metode	Presentasi, praktikum
Waktu	90 menit
Alat bantu	I. Presentasi 1. Perencanaan yang Responsif Gender II. Panduan praktikum 1. Perumusan Isu Strategis Perencanaan Berbasis Kinerja Responsif Gender III. Bahan Bacaan 1. Contoh Penyusunan Isu Strategis Gender 2. Contoh Kerangka Kinerja
Perlengkapan	<i>Pinboard</i> , kartu-kartu metaplan, spidol, <i>sticky notes</i> , <i>LCD projector</i>
Urgensi sesi	Sesi ini dirancang untuk mengantar peserta memahami konsep dasar perencanaan dan penyusunan isu strategis yang merupakan pengetahuan umum yang sangat diperlukan sebelum masuk secara khusus dalam pembahasan mengenai integrasi gender dalam dokumen-dokumen perencanaan.

A. Proses

Langkah 1: Presentasi tentang Perencanaan yang Responsif Gender (20 menit)

Tujuan: Menyampaikan konsep dasar tentang perencanaan daerah yang responsif gender

1. Fasilitator memaparkan bahan presentasi tentang konsep perencanaan responsif gender sebagaimana terlampir.
2. Fasilitator memberi kesempatan kepada peserta untuk bertanya dan mengajukan komentar.

Langkah 2: Praktikum: Perumusan Isu Strategis dan Perencanaan Berbasis Kinerja Responsif Gender (50 menit)

Tujuan: Membangun keterampilan merumuskan kerangka kinerja/kerangka hasil

1. Tentukan moderator kelompok dan presenter dalam stan *marketplace* pada langkah berikutnya.
2. Fasilitator menjelaskan kembali skema GAP dan menyampaikan bahwa langkah-langkah GAP akan digunakan dalam praktikum penyusunan perencanaan jangka menengah.
3. Setiap kelompok mengambil satu contoh mengenai kebijakan/program suatu sektor yang ada dalam RPJMD saat ini, misalnya kebijakan bidang pendidikan berupa pemberian beasiswa keluarga miskin di Kabupaten X.
4. Masing-masing kelompok menganalisis kebijakan saat ini, apa tujuan kebijakan tersebut, dan siapa yang menjadi sasaran dari kebijakan itu.
5. Kemudian mereka mengidentifikasi data yang ada terkait dengan implementasi kebijakan tersebut, terutama data pilah (lihat Bahan Bacaan mengenai data pilah).
6. Tanyakan kepada kelompok, apa yang mereka temukan dari data tersebut, apakah ada kesenjangan antara laki-laki dan perempuan?
7. Kemudian minta mereka mengidentifikasi kesenjangan tersebut dengan melihat empat aspek kesenjangan gender, yakni: akses, partisipasi, kontrol, manfaat.
8. Selanjutnya kelompok mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang relevan dengan faktor kesenjangan tersebut.
9. Setelah proses ini selesai, minta peserta memvisualisasikan hasil diskusi pada proses No. 4-7 dalam satu pohon masalah yang memuat:
 - a. *Daun*: Apa manifestasi kesenjangan gender di bidang tersebut yang ditemukan berdasarkan data pilah pembuka wawasan dan analisis kesenjangan gender
 - b. *Akar*: Mengapa isu gender tersebut ada? Apa penyebabnya?
 - c. *Batang*: Apa faktor pendukungnya?
10. Kemudian dengan bantuan visualisasi pohon masalah tersebut, kelompok mengidentifikasi isu strategis terkait dengan kebijakan tersebut (lihat presentasi tentang perumusan isu strategis).
11. Dengan merujuk pada isu strategis yang dirumuskan, minta mereka merumuskan kembali tujuan kebijakan yang tepat untuk mengatasi kesenjangan gender. Mintalah juga mereka merumuskan hasil yang akan dicapai (lihat bahan presentasi tentang perumusan dan pernyataan hasil jangka menengah). Pergunakan lembar kerja sebagaimana terlampir.
12. Hasil dari semua langkah diskusi didokumentasi dengan kartu-kartu metaplan dan *pinboard*.

Langkah 3: Presentasi dengan Marketplace (20 menit)

Tujuan: Mempresentasikan hasil kerja setiap kelompok

1. Lakukan presentasi dengan marketplace.
2. Beri kesempatan kepada kelompok lain untuk memberikan tanggapan, catatlah tanggapan atas *sticky notes* dan tempelkan pada paparan hasil masing-masing kelompok.
3. Fasilitator mengulas dan simpulkan.

B. Alat Bantu

I. Presentasi

1. Perencanaan yang Responsif Gender

a. Perencanaan Responsif Gender

- Perencanaan yang responsif gender dilakukan dengan memasukkan perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah.
- Bisa mempertajam analisa tentang kondisi daerah karena terpetakan kesejangan dalam pembangunan manusia, laki-laki dan perempuan.
- Membantu mempertajam target group/ kelompok sasaran karena data terpilih.
- Tidak selalu berupa penambahan program baru dan biaya tambahan bilamana analisis gender diterapkan.
- Pemberdayaan perempuan sebagai urusan wajib di daerah tidak mampu menjawab semua isu kesenjangan gender di berbagai bidang.

b. Dukungan Kebijakan

- Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan, yang menegaskan PUG dalam semua tahapan perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan daerah
- PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pemantanan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, pasal 3, menjelaskan bahwa:
 - o perencanaan pembangunan daerah harus dirumuskan secara responsif dan berkeadilan dengan prinsip keseimbangan gender,
 - o dalam menyusun kerangka studi dan instrumen analisis harus mempertimbangkan analisis biaya dan manfaat, analisis kemiskinan, dan analisis gender.
- Permendagri No. 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah, yang memuat instruksi implementasi PUG di daerah, konsep perencanaan dan penganggaran responsif gender, kelembagaan PUG. Secara khusus:
 - o Pasal 4 Ayat 1 disebutkan Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berperspektif gender; Perencanaan pembangunan perspektif gender dituangkan dalam RPJMD, Rencana Strategis SKPD dan Renja SKPD.
 - o Pasal 4 Ayat 2 disebutkan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan harus dilakukan melalui analisis gender.
- Perpres No. 5 tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014 menyatakan PUG sebagai salah satu dari tiga kebijakan pengarusutamaan dalam kebijakan pembangunan.

c. Perumusan Isu Strategis Gender

- Perumusan isu strategis gender sangat diperlukan dalam melakukan perencanaan yang responsif gender karena:
 - o merupakan gambaran situasi kesenjangan yang dihadapi,
 - o akan menjadi suatu dasar bagi perubahan yang akan diinginkan serta intervensi yang harus dilakukan untuk mendorong perubahan tersebut.

d. Beberapa Ciri untuk Mengidentifikasi Isu Strategis Gender

- Menyangkut relasi/kondisi laki-laki dan perempuan
- Adanya ketimpangan kondisi (perbedaan peran, akses, partisipasi, kontrol, manfaat) antara laki-laki dan perempuan
- Adanya rasa ketidakadilan yang dialami laki-laki dan perempuan: diskriminasi, marginalisasi, subordinasi (bentuk dan akibat yang ditimbulkan)
- Ada unsur pengaruh budaya dan kebijakan (unsur eksternal dan internal pemerintah)
- Cakupan luas (dirasakan oleh banyak orang di banyak tempat)
- Mendesak untuk segera diselesaikan dalam konteks kewilayahan
- Efek karambol (kalau diselesaikan berdampak positif pada isu gender lain)
- Berorientasi pada perubahan sistemik, yakni perubahan relasi laki-laki dan perempuan

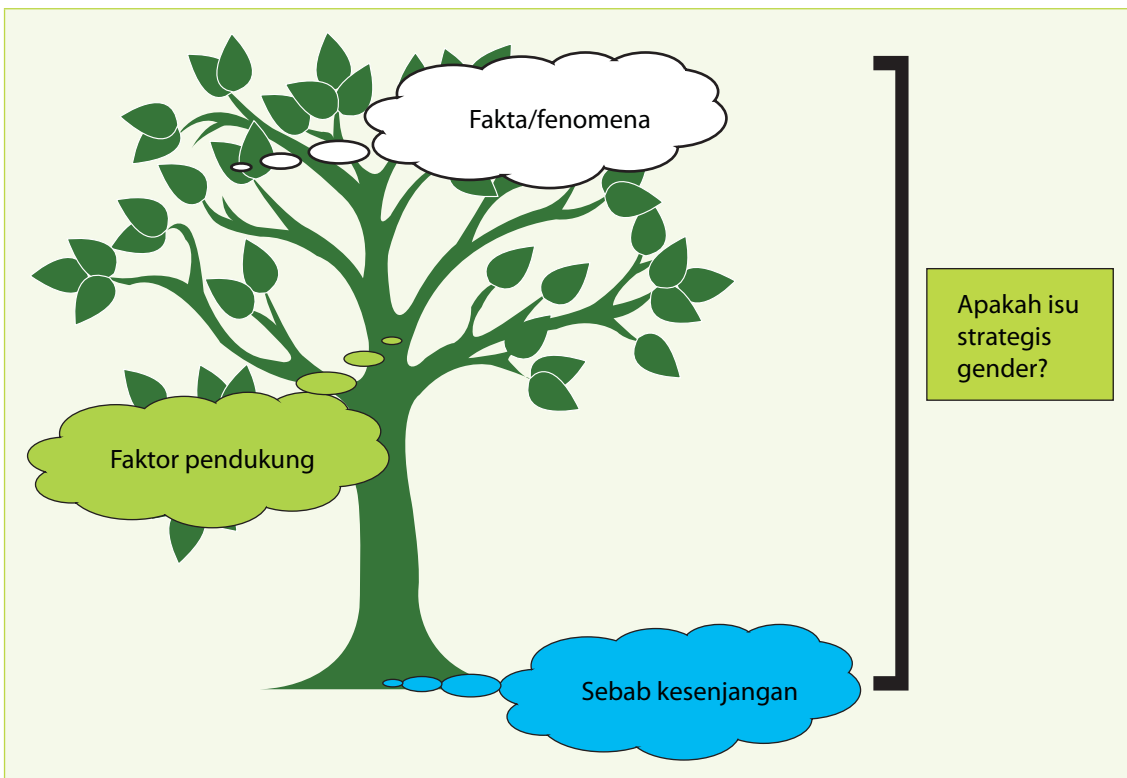
Referensi Lanjutan: Lihat referensi lanjutan untuk Sesi 8 tentang “Gender dalam Perencanaan” di CD-Rom yang terlampir Modul ini.

II. Panduan Praktikum

1. Perumusan Isu Strategis dan Perencanaan Berbasis Kinerja Responsif Gender

a. Perumusan Isu Strategis

- Ambil contoh satu program dalam urusan wajib pemerintah daerah, misalnya Pekerjaan Umum, Perhubungan, atau Pertanian. Setiap kelompok mengambil contoh dari sektor yang berbeda, misalnya kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan pertanian.
- Identifikasi fakta dan fenomena kesenjangan gender, sebab kesenjangan dan faktor pendukung terkait dengan urusan tersebut dengan menggunakan kerangka pohon masalah (hasil rumusan pohon masalah dapat digunakan dalam menyusun GAP pada langkah 1-5).



BAGIAN 2

b. Perumusan Kerangka Kinerja

- Rumuskan kerangka kinerja untuk isu strategis gender dengan menggunakan format berikut.

Isu strategis	<p>.....</p> <p>.....</p> <p><i>Pindahkan rumusan isu strategis yang dihasilkan dari analisis dengan pohon masalah!</i></p>	
Hasil/outcome	<p>.....</p> <p>.....</p> <p><i>Apakah kondisi yang diharapkan akan terjadi dalam jangka menengah (5 tahun yang akan datang)?</i></p>	<p>Indikator hasil:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p><i>Alat ukur untuk menilai tingkat pencapaian outcome (lihat III. Bahan Bacaan)</i></p>
Keluaran/ output	<p>.....</p> <p>.....</p> <p><i>Barang atau pelayanan apa yang dihasilkan untuk mendukung pencapaian outcome?</i></p>	<p>Indikator output:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p><i>Alat ukur untuk menilai tingkat pencapaian output (lihat III. Bahan Bacaan)</i></p>

III. Bahan Bacaan Peserta

1. Contoh Penyusunan Isu Strategis

Bidang/Urusan: Pekerjaan Umum

Program: Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan

Visualisasi Pohon masalah	Makna	Data/informasi yang diperlukan	Contoh isu
Daun	Fenomena atau kasus-kasus yang nampak dalam keseharian terkait dengan program di atas	<ul style="list-style-type: none"> Penerima informasi mengenai pembebasan lahan dan penetapan harga Informasi mengenai kepemilikan usaha di sekitar lahan yang akan dibebaskan Informasi mengenai kasus-kasus kesehatan dan pendidikan terkait dengan tidak adanya jalan dan jembatan di wilayah itu 	<p>Lebih banyak laki-laki yang mendapatkan informasi</p> <p>Laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki usaha ekonomi, namun mobilitas mereka dalam memasarkan hasil rendah; perempuan pemilik usaha sering menitipkan produknya untuk dipasarkan keluar wilayah kepada laki-laki yang memiliki usaha</p> <p>Banyak kasus lambatnya pertolongan medis, termasuk persalinan, karena akses dan jalan dan jembatan yang tidak memadai</p>
Batang	Faktor penguat kesenjangan	Faktor teknis terkait dengan kualitas pelayanan secara umum	<p>Sistem data pilah di pemda tidak memadai</p> <p>Kurangnya kemampuan aparat Dinas Bina Marga memahami perspektif gender</p> <p>Tidak adanya insentif untuk melakukan analisis gender</p>
Akar	Faktor penyebab terjadinya kesenjangan	Faktor kultural dalam masyarakat, maupun faktor struktural yang mempengaruhi terjadinya fenomena di atas	Laki-laki masih memiliki kontrol yang sangat besar dalam penguasaan kepemilikan lahan dan kepemilikan usaha Perempuan tidak terbiasa untuk hadir dalam pertemuan publik
Isu strategis Gender	Perlunya jalan dan jembatan yang berkualitas yang dibangun sesuai dengan kebutuhan laki-laki dan perempuan sebagai pemilik lahan dan pelaku usaha		

2. Contoh Kerangka Kinerja

Dampak (jangka panjang)	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya pendapatan laki-laki dan perempuan di wilayah yang terkena perbaikan jalan dan jembatan • Membaiknya kualitas kesehatan ibu dan anak di wilayah tersebut 	
Outcome/Hasil (jangka menengah, maksimal 5 tahun)	<ul style="list-style-type: none"> • Laki-laki dan perempuan di sekitar wilayah pembangunan jalan dan jembatan lebih mudah melakukan kegiatan ekonomi • Ibu hamil lebih mudah mendapatkan akses pelayanan medis 	Indikator Hasil <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah kegiatan transaksi ekonomi di dua wilayah yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan pelaku usaha meningkat • Menurunnya kasus-kasus kematian ibu melahirkan karena terlambatnya pertolongan medis
Output (jangka pendek, produk/jasa dari SKPD yang mengampu program)	<ul style="list-style-type: none"> • Jalan dan jembatan yang berkualitas lebih baik dibangun berdasarkan spesifikasi yang sesuai kebutuhan seluruh masyarakat yang terkena dampak 	Indikator Output <ul style="list-style-type: none"> • Luas jalan dan jembatan yang dibangun berdasarkan spesifikasi yang sesuai kebutuhan seluruh masyarakat yang terkena dampak
Kegiatan-kegiatan utama	<ul style="list-style-type: none"> • Konsultasi dengan pemilik lahan dan pelaku usaha, baik laki-laki dan perempuan, mengenai rencana pembebasan lahan dan penetapan harga • Sosialisasi mengenai rancang bangun jalan dan jembatan yang mengakomodasi kebutuhan warga • Membebasan lahan sesuai dengan kesepakatan harga dengan pemilik • Membangun jalan dan jembatan sesuai dengan spesifikasi yang disepakati 	

SESI 9

Integrasi Gender dalam Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah

Tujuan	Memperkuat keterampilan memasukkan perspektif gender dalam dokumen RPJMD dan Renstra SKPD dengan menggunakan hasil GAP, serta memahami kaitan RPJMD dengan Renstra SKPD
Output	Peserta terampil mengidentifikasi peluang mengintegrasikan gender dalam dokumen RPJMD dan Renstra SKPD
Metode	Presentasi, praktikum
Waktu	120 menit
Alat Bantu	I. Presentasi 1. Integrasi Gender dalam dokumen Perencanaan Jangka Menengah 2. Integrasi Hasil GAP dalam Dokumen Perencanaan II. Panduan Praktikum 1. Integrasi hasil GAP dalam Dokumen Renstra SKPD
Perlengkapan	<i>Pinboard, kartu-kartu metaplan, spidol, sticky notes, LCD projector</i>
Urgensi Sesi	Mengintegrasikan dimensi gender dalam perencanaan sebaiknya dilakukan mulai dari penyusunan dokumentasi perencanaan strategis karena perencanaan strategis menjadi rujukan dalam perencanaan operasional. Dengan demikian dapat meningkatkan konsistensi antara kerangka kinerja jangka menengah dan jangka pendek. Sesi ini merupakan bagian yang amat penting untuk membawa peserta dalam mencari peluang untuk mengintegrasikan isu gender dalam dokumen RPJMD dan Renstra SKPD dengan menggunakan alat analisis GAP.

A. Proses

Langkah 1: Presentasi: Integrasi Gender dalam Dokument Perencanaan Jangka Menengah (30 menit)

Tujuan: Menyampaikan peluang integrasi gender dalam dokumen perencanaan jangka menengah

1. Fasilitator mengulas kembali pengertian dan format dokumen perencanaan strategis baik RPJMD maupun Renstra. Pergunakan bahan yang dipakai di Sesi 7.
2. Fasilitator memaparkan langkah integrasi gender dalam penyusunan RPJMD dan Renstra.
3. Fasilitator memberi kesempatan kepada peserta untuk memberikan tanggapan.

Langkah 2: Praktikum: Memasukkan Hasil GAP dalam Format Dokumen Jangka Menengah (45 menit)

Tujuan: Mengintegrasikan gender dalam dokumen RPJMD dan Renstra SKPD dengan menggunakan hasil GAP

1. Tentukan moderator kelompok dan presenter dalam stan *marketplace* pada langkah berikutnya.
2. Setiap kelompok diajak mengambil hasil GAP yang sudah dihasilkan dalam Sesi 6.
3. Peserta melihat kembali hasil rumusan tujuan kebijakan/program/kegiatan yang diperbarui dan rencana aksi, dan melihat kembali apakah rencana aksi diperkirakan akan menjawab pencapaian tujuan.
4. Sambil melihat kembali rencana aksi, identifikasi rencana aksi mana yang dapat diselesaikan segera dan mana yang memerlukan waktu yang cukup lama.
5. Dari rumusan tujuan kebijakan/program/kegiatan dan rencana aksi ini kemudian kelompok mengidentifikasi kerangka hasil jangka menengah berupa *outcome*.
6. Dengan menggunakan panduan praktikum, setiap kelompok mengintegrasikan hasil GAP tersebut dalam dokumen Renstra SKPD.

Langkah 3: Marketplace (45 menit)

Tujuan: Peserta kelompok dapat mengenal hasil kelompok lain dalam suatu marketplace

1. Setiap kelompok mengamati hasil kerja kelompok lain dan memberikan/menempelkan catatan atas *sticky notes* pada bagian-bagian tertentu bilamana perlu.
2. Fasilitator kemudian menyimpulkan dan menutup sesi ini.

B. Alat Bantu

I. Presentasi

1. Integrasi Gender dalam dokumen Perencanaan Jangka Menengah

a. Peluang Integrasi Gender dalam Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

- Peluang integrasi isu gender dapat tercermin dalam:
 - o proses perencanaan partisipatif di mana laki-laki dan perempuan terlibat dan menyampaikan aspirasi serta kebutuhan mereka,
 - o dokumen perencanaan, baik secara tersurat maupun tersirat dalam rumusan kondisi daerah, visi dan misi, isu strategis, sasaran, program atau kegiatan suatu SKPD yang berkomitmen untuk mengurangi kesenjangan gender,
 - o program dan kegiatan khusus pemberdayaan perempuan,
 - o indikator dan target yang terpilah,
 - o target dan indikator yang berfokus pada isu-isu terkait gender tertentu.

b. Integrasi Hasil GAP dan Rumusan Kerangka Kinerja dalam RPJMD

Aspek yang dilihat	GAP (kolom 1-9)	Struktur dokumen RPJMD	Langkah integrasi hasil GAP dalam dokumen RPJMD
Konteks	Data Pembuka Wawasan	Pendahuluan	<ul style="list-style-type: none"> • Memasukkan data tentang kesenjangan antara laki-laki dan perempuan di berbagai bidang sebagai bagian dari gambaran umum kondisi daerah. Data ini dapat berupa data pilah maupun data gender. Misalnya: data pilah APK dan APM, jumlah kasus KDRT dan trafficking. • Memasukkan data atau fakta kontribusi ekonomi perempuan dalam keuangan daerah.
		Gambaran umum kondisi daerah	
		Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan	
Isu Strategis	Faktor Kesenjangan	Analisis isu-isu strategis	<ul style="list-style-type: none"> • Isu strategis gender mewarnai isu-isu strategis RPJMD • Masukkan isu strategis yang terkait dengan pemberdayaan perempuan
	Sebab kesenjangan: internal dan eksternal		
Strategi dan Kebijakan	Reformulasi tujuan kebijakan (<i>terdiri dari rumusan dampak dan rumusan outcome</i>)	Visi, misi, tujuan dan sasaran (<i>rumusan dampak atau kinerja jangka panjang</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Reformulasi tujuan kebijakan dalam GAP dimasukkan dalam strategi dan arah kebijakan dokumen RPJMD • Reformulasi juga mendasari kebijakan umum dan program pembangunan yang dipilih
		Strategi dan arah kebijakan (<i>rumusan outcome atau kinerja jangka menengah</i>)	
		Kebijakan umum dan program pembangunan daerah (<i>rumusan outcome</i>)	
Program dan Indikator	Rencana aksi (<i>Dapat menjadi dasar dalam penyusunan pernyataan Outcome untuk program dan Output untuk kegiatan</i>)	Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana aksi untuk pengurangan kesenjangan gender masuk dalam rencana program prioritas. Ini juga diikuti dengan kebutuhan pendanaannya • Indikator responsif gender -masuk dalam indikator kinerja pemerintah daerah
	Data dasar	Penetapan indikator kinerja daerah	
	Indikator gender	Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan	

c. Transfer Isu Gender dari RPJMD ke Renstra SKPD

Informasi dalam RPJMD					
Isu strategis	Urusan	Program	SKPD	Kondisi tahun n	Indikator capaian n+5 (indikator outcome)
<p>Angka buta huruf perempuan dan jumlah anak putus sekolah perempuan lebih tinggi daripada laki-laki</p> <p>Banyak keluarga miskin tidak mampu menyekolahkan anak</p>	Pendidikan	Peningkatan mutu pendidikan dasar sembilan tahun	Dinas Pendidikan	Jumlah buta huruf perempuan mencapai 25% sementara laki-laki 18%	Penurunan jumlah perempuan buta huruf menjadi 17% dan laki-laki 13%

Informasi dalam Renstra											
Urusan	Program/kegiatan	SKPD Pengelola	Kondisi tahun 2010	Indikator capaian 5 tahun	Indikator capaian tahunan					Lokasi	Biaya
					n	N+1	N+2	N+3	N=4		
Pendidikan	Program peningkatan mutu pendidikan dasar sembilan tahun	Dinas Pendidikan	Jumlah buta huruf perempuan mencapai 25% sementara laki-laki 18%	Penurunan jumlah perempuan buta huruf menjadi 17% dan laki-laki 13%							
	Kegiatan pemberian beasiswa bagi keluarga tidak mampu			Jumlah anak dari keluarga tidak mampu yang bersekolah							

d. Integrasi Hasil GAP dalam Renstra SKPD

Komponen	GAP	Struktur Renstra SKPD	Integrasi hasil GAP dalam dokumen Renstra SKPD
Konteks	Data pembuka wawasan	Pendahuluan	Memasukkan data pembuka wawasan berupa data pilah dan data gender terkait dalam "Pendahuluan".
Isu strategis	Faktor kesenjangan	Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi	Integrasikan isu gender terkait dengan sektor atau urusan yang menjadi tugas dan fungsi SKPD dalam rumusan "Isu-isu strategis". <i>Misalnya:</i> Kebutuhan laki-laki dan perempuan pekerja terhadap sarana transportasi publik yang murah dan aman (Dinas Perhubungan).
	Sebab kesenjangan: internal dan eksternal	Visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan	Integrasikan pula isu kesenjangan internal dalam rumusan "Isu strategis". <i>Misalnya:</i> Rendahnya kemampuan teknis staf Dinas Perhubungan dalam melakukan analisis gender dalam penyediaan transportasi publik untuk pekerja.
	Faktor kesenjangan Reformulasi tujuan kebijakan		Rumuskan kinerja dampak (kinerja jangka panjang) terkait dengan isu strategis dan masukkan ini dalam rumusan "Visi dan misi". Rumuskan kerangka kinerja hasil terkait dengan isu strategis dan masukkan ini dalam rumusan "Tujuan, sasaran dan kebijakan sektor". <i>Catatan:</i> rumusan dampak dan hasil harus disinkronkan dengan rumusan RPJMD.
Strategi, kebijakan dan program	Rencana aksi (program dan kegiatan yang responsif gender untuk menjawab isu strategis beserta indikator <i>outcome</i> untuk program dan indikator <i>output</i> untuk kegiatan)	Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif	Integrasikan rencana aksi dalam "Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran" Alokasikan anggaran untuk program dan kegiatan untuk mengatasi isu kesenjangan gender di sektor
Indikator	Data dasar	Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD	Integrasikan indikator dalam GAP ke dalam indikator gender sektoral sebagai acuan dasar kinerja SKPD
	Indikator		

Referensi Lanjutan: Lihat referensi lanjutan untuk Sesi 9 tentang "Integrasi Dimensi Gender dalam Dokumen RPJMD" di CD-Rom yang terlampir Modul ini.

II. Panduan Praktikum

1. Integrasi hasil GAP dalam Renstra SKPD

- Lihat kembali hasil praktikum GAP pada Sesi 6 dan hasil rumusan isu gender pada langkah 1-5: Rumuskan satu isu strategis gender. Untuk memudahkan penyusunan isu strategis dapat menggunakan visualisasi pohon masalah.
- Lihat hasil reformulasi tujuan kebijakan dan rencana aksi dalam GAP (langkah 6-7): Rumuskan hasil/*outcome* yang ingin dicapai dalam jangka menengah (maksimal lima tahun).
- Kemudian rumuskan strategi, kebijakan dan program yang relevan terkait dengan hasil/*outcome* yang ingin dicapai.
- Lihat pengukuran hasil dalam GAP langkah 8 dan 9. Lalu rumuskan kondisi dan saat ini sesuai dengan data dasar (langkah 8) dan indikator hasil responsif gender (langkah 9)
- Dokumentasikan hasil di atas *pinboard* sesuai dengan tabel berikut.

Informasi dalam Dokumen Renstra SKPD				
Isu strategis	Hasil/Outcome	Strategi, Kebijakan dan program	Kondisi tahun n	Indikator hasil (indikator n+5)
<i>didapat dari rangkuman langkah GAP 1-5</i>	<i>Didapat dari reformulasi tujuan dan Rencana aksi (langkah 6-7)</i>	<i>Didapat dari Rencana aksi (langkah 7)</i>	<i>Dapat diambil dari GAP langkah 8</i>	<i>Ukuran pencapaian hasil yang bisa didapat dari rumusan indikator gender GAP langkah 9</i>

SESI 10

Gender dalam Penyusunan Perencanaan Tahunan

Tujuan	Memperkuat keterampilan memasukkan perspektif gender dalam dokumen perencanaan tahunan
Output	Peserta terampil merumuskan perspektif gender dalam penyusunan indikator dan target kerja tahunan, serta identifikasi kegiatan-kegiatan utama
Metode	Presentasi, praktikum
Waktu	135 menit
Alat Bantu	I. Presentasi 1. Pemaduan Hasil GAP dalam Perencanaan Tahunan Daerah II. Panduan praktikum 1. Integrasi Gender dalam Dokumen Renja SKPD
Perlengkapan	<i>Pinboard, kartu-kartu metaplan, sticky notes, spidol, LCD projector</i>
Urgensi sesi	Dengan memanfaatkan hasil analisis gender, bagian ini mengintegrasikan gender dalam perencanaan tahunan yang diturunkan dari perencanaan jangka menengah. Selain memahami format dasar dokumen perencanaan tahunan, pada bagian ini, peserta juga mengenali dan mempraktekkan langkah-langkah integrasi di dalam format tersebut.

A. Proses

Langkah 1: Presentasi (30 menit)

Tujuan: Peserta memahami mekanisme perencanaan tahunan di daerah

1. Fasilitator menjelaskan secara singkat mengenai mekanisme perencanaan tahunan, Dokumen RKPD dan Renja SKPD. Dalam memberikan penjelasan tersebut, fasilitator menekankan kaitan logis antara *outcome* jangka menengah, program, kegiatan dan *output* dengan menekankan bahwa identifikasi program kegiatan untuk mencapai *output* dapat dipilih dari lampiran Permendagri No.13 tahun 2006 karena didalamnya sudah memuat nomenklatur program dan kegiatan beserta kode rekeningnya.
2. Peserta dipersilakan memberikan input berdasarkan pengalamannya terkait dengan hal ini

Langkah 2: Praktikum Penyusunan RKPD dan Renja SKPD (60 menit)

Tujuan: Mengintegrasikan hasil analisis gender dalam perencanaan tahunan

1. Tentukan moderator kelompok dan presenter dalam stan marketplace pada langkah berikutnya.
2. Kelompok diminta lagi untuk melihat hasil dan program yang telah rumuskan dalam dokumen RPJMD dan Renstra SKPD.
3. Setelah program cukup jelas, setiap kelompok melanjutkan dengan dengan identifikasi kegiatan utama yang diturunkan dari program itu, beserta kode rekening mengacu pada Permendagri No. 13 tahun 2006.
4. Setelah itu kelompok diminta untuk mengidentifikasi kelompok sasaran: apakah kelompok sasaran dari kegiatan tersebut adalah internal/sesama SKPD (pelayanan internal) atau masyarakat (pelayanan publik)?
5. Kemudian kelompok mengidentifikasi output dari kegiatan utama tersebut. Tuliskan output ini di dalam kertas kartu metaplan.
6. Terakhir, setiap kelompok memasukkan hasil ini dalam format dokumen RKPD dan Renja SKPD di atas *pinboard*.

Langkah 3: Marketplace (45 menit)

Tujuan: presentasi hasil kerja kelompok dan menggali input dari kelompok lain

1. Presenter stan mempresentasikan hasil kerja kelompok kepada peserta dari kelompok lain.
2. Supaya semua peserta membaca hasil kerja setiap kelompok, aturlah *marketplace* sebagai berikut:
 - Kelompok I diminta meninjau hasil kelompok II, kelompok II diminta meninjau hasil kelompok III dan seterusnya.
 - Beri kesempatan 5-10 menit untuk membaca, klarifikasi kepada petugas stan dan memberikan tanggapan dengan menulis di *sticky notes*.
 - Setelah dirasa cukup, kelompok I berpindah ke kelompok III, kelompok II ke kelompok IV, dan seterusnya. Putar kembali sampai kelompok kembali ke tempatnya.
 - Fasilitator minta setiap kelompok memaparkan hasil kerja dengan sekaligus menjawab komentar kelompok lain yang tertempel di *sticky notes*.
 - Fasilitator mengulas dan memberikan komentar untuk beberapa hal penting dan garis bawah sebagai kesimpulan

B. Alat Bantu

I. Presentasi

1. Integrasi Hasil GAP dalam Perencanaan Tahunan

a. Pemaduan hasil GAP dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Hasil GAP	Dokumen RKPD	Integrasi hasil GAP dalam dokumen RKPD
Data pembuka wawasan berupa data pilah dan analisis tentang kontribusi perempuan dan laki-laki dalam ekonomi daerah (bila ada) yang diperoleh dari catatan sektor maupun hasil kajian	Rancangan kerangka ekonomi daerah	Masukkan data dan analisis tentang kontribusi ekonomi perempuan dan laki-laki dalam rumusan "Kerangka ekonomi daerah"
Rencana aksi	Program prioritas pembangunan daerah	Masukkan rencana aksi yang bersifat jangka menengah dalam rumusan "Prioritas program"
	Rencana kerja daerah	Masukkan rencana aksi yang bersifat jangka pendek dalam rumusan "Kegiatan"

b. Pemaduan Hasil GAP dalam Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD)

Hasil GAP	Struktur Renja SKPD	Integrasi hasil GAP dalam dokumen RKPD
Rencana aksi	Program prioritas SKPD	Masukkan rencana aksi yang bersifat jangka menengah dalam rumusan "Prioritas program"
	Rencana kerja SKPD	Masukkan rencana aksi yang bersifat jangka pendek dalam rumusan "Kegiatan"
Data Dasar dan Indikator Kinerja	Indikator program	Masukkan rumusan indikator <i>outcome</i> dalam rumusan "Indikator program"
	Indikator kegiatan	Masukkan indikator <i>output</i> dalam rumusan "Indikator kegiatan"

c. Transfer Renstra SKPD dalam Renja SKPD

Informasi dalam Renstra											
Urusan	Program/kegiatan	SKPD Pengelola	Kondisi tahun 2010	Indikator capaian 5 tahun	Indikator capaian tahunan					Lokasi	Biaya
					2010	2011	2012	2013	2014		
Pendidikan	Peningkatan mutu pendidikan dasar 9 tahun	Dinas pendidikan	Jumlah buta huruf perempuan mencapai 25% sementara laki-laki 18%	Penurunan jumlah perempuan buta huruf menjadi 17% dan laki-laki 13%							
	Kegiatan pemberian beasiswa bagi keluarga tidak mampu			Jumlah anak dari keluarga tidak mampu yang bersekolah							

Informasi dalam RKPD/ Renja									
Prioritas	Program/kegiatan	Indikator program	Indikator kegiatan		Organisasi	Kelp Sasaran	Lokasi	Pagu Indikatif	
			Outcome	Output				Jumlah (Rp)	Sumber

II. Panduan Praktikum

1. Integrasi Gender dalam Dokumen Renja SKPD

- Lihat kembali hasil praktikum dalam Sesi 9 tentang integrasi GAP dalam dokumen Renstra SKPD) serta hasil dan program yang telah rumuskan.
- Setelah program cukup jelas, identifikasi kegiatan utama yang diturunkan dari program itu, beserta kode rekening mengacu pada Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolalan Keuangan Daerah.
- Identifikasi kelompok sasaran: Apakah kelompok sasaran dari kegiatan tersebut adalah internal/ sesama SKPD (pelayanan internal) atau masyarakat (pelayanan publik)?
- Identifikasi output dari kegiatan utama tersebut.
- Masukkan hasil diskusi dalam format Renja SKPD berikut.

Prioritas	Program/kegiatan	Indikator program	Indikator kegiatan		Kelompok Sasaran	Lokasi	Pagu Indikatif	
			Outcome	Output			Jumlah (Rp)	Sumber

BAGIAN 2

SESI 11

Integrasi Gender dalam Proses Musrenbang

Tujuan	Memahami proses Musrenbang dan mengidentifikasi peluang mengintegrasikan isu gender dalam proses Musrenbang
Output	Peserta mampu mengidentifikasi isu gender di dalam proses Musrenbang
Metode	<i>Roleplay</i> , presentasi, Praktikum
Waktu	90 menit
Alat Bantu	I. Presentasi 1. Integrasi Gender dalam Proses Musrenbang II. Panduan Praktikum 1. Panduan <i>roleplay</i> 2. Curah Gagagasan Pengalaman Integrasi Gender dalam Musrenbang III. Bahan Bacaan 1. <i>Check List</i> Integrasi Gender dalam Musrenbang
Perlengkapan	<i>LCD projector</i> , <i>pinboard</i> , kartu metaplan, kursi untuk <i>roleplay</i> , <i>sticky notes</i> , spidol
Urgensi sesi	Sebagai bagian dari pendekatan pembangunan partisipatif, mengkaji ruang partisipasi dan integrasi gender dalam Musrenbang diperlukan untuk memastikan akomodasi aspirasi dan kepentingan laki-laki dan perempuan. Bagian ini membekali peserta dengan konsep dan langkah-langkah praktis bagaimana membuat Musrenbang yang lebih responsif gender.

A. Proses

Langkah 1: *Roleplay* Musrenbang (30 menit)

Tujuan: Memahami pihak-pihak yang terlibat dalam proses Musrenbang

1. Mintalah delapan peserta sebagai relawan, dan siapkan delapan kursi di depan. Untuk peran peserta lihat Alat Bantu praktikum. Bagikan kartu peran kepada setiap relawan. Peserta lain menjadi pengamat.
2. Beri penjelasan singkat tentang permainan, dimana setiap peserta diminta memerankan satu pihak tertentu dalam sebuah forum Musrenbang. Beri kesempatan sebentar kepada setiap peserta untuk mencermati dan menyiapkan perannya.
3. Beri aba-aba untuk mulai.
4. *Roleplay* dihentikan bilamana sudah dipandang cukup
5. Gali beberapa pertanyaan berikut:
 - Apakah yang nampak dalam permainan ini?
 - Siapa sajakah pihak kunci yang sebetulnya menjadi penentu dalam proses pengambilan keputusan Musrenbang?
 - Adakah pihak yang tidak cukup punya ruang/ peran dalam proses Musrenbang?
 - Apa sajakah faktor yang menyebabkan kondisi ini terjadi?
 - Apakah intervensi yang dibutuhkan?
 Pertanyaan-pertanyaan ini sekaligus sebagai pintu masuk ke dalam presentasi.

Langkah 2: Presentasi Proses Musrenbang dan Integrasi Gender (30 menit)

Tujuan: Mengidentifikasi peluang integrasi gender dalam proses Musrenbang

1. Fasilitator memaparkan secara singkat dan jelas tentang aspek integrasi gender dalam Musrenbang, serta berilah kesempatan kepada peserta untuk memberikan tanggapan.

Langkah 3: Praktikum: Integrasi Gender dalam Proses Musrenbang (30 menit)

Tujuan: Mengeksplorasi pengalaman peserta dalam mengintegrasikan gender dalam proses Musrenbang

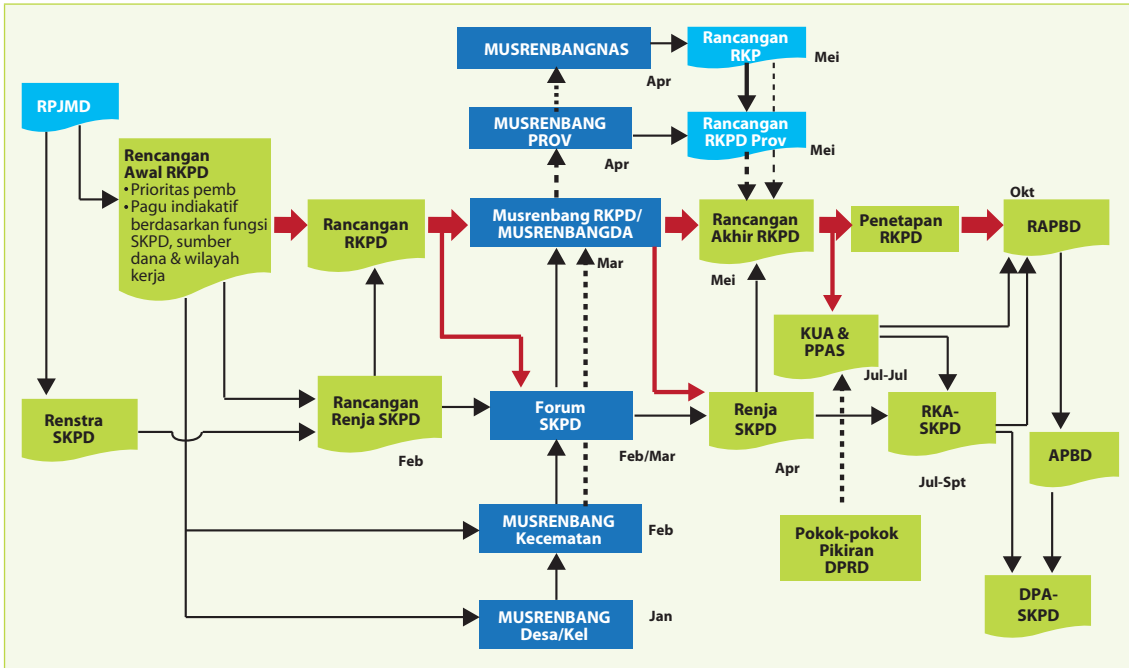
1. Tentukan moderator untuk sesi praktikum ini.
2. Tempelkan *check-list* integrasi gender dalam Musrenbang di pinboard. Peserta kelompok berdiri dan membacanya, serta memberikan tanggapan dan masukan untuk *check-list* ini.
3. Diskusikan dalam kelompok, apakah pengalaman yang dilakukan dalam mengintegrasikan gender dalam Musrenbang. Kategorisasikan langkah ini dalam perbaikan di empat level: akses, partisipasi, kontrol dan manfaat.
4. Masing-masing kelompok mendokumentasikan hasil diskusi di *pinboard* dalam bentuk tabel yang tertera dalam panduan praktikum.
5. Akhirnya, fasilitator persilakan salah satu kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok dalam pleno disertai dengan tanya jawab. Bila waktu memungkinkan, dapat dipersilahkan kelompok lain untuk presentasi.
6. Fasilitator mengulas hal-hal kunci dari diskusi kelompok tersebut dan simpulkan.

B. Alat Bantu

I. Presentasi

1. Integrasi Gender dalam Proses Musrenbang

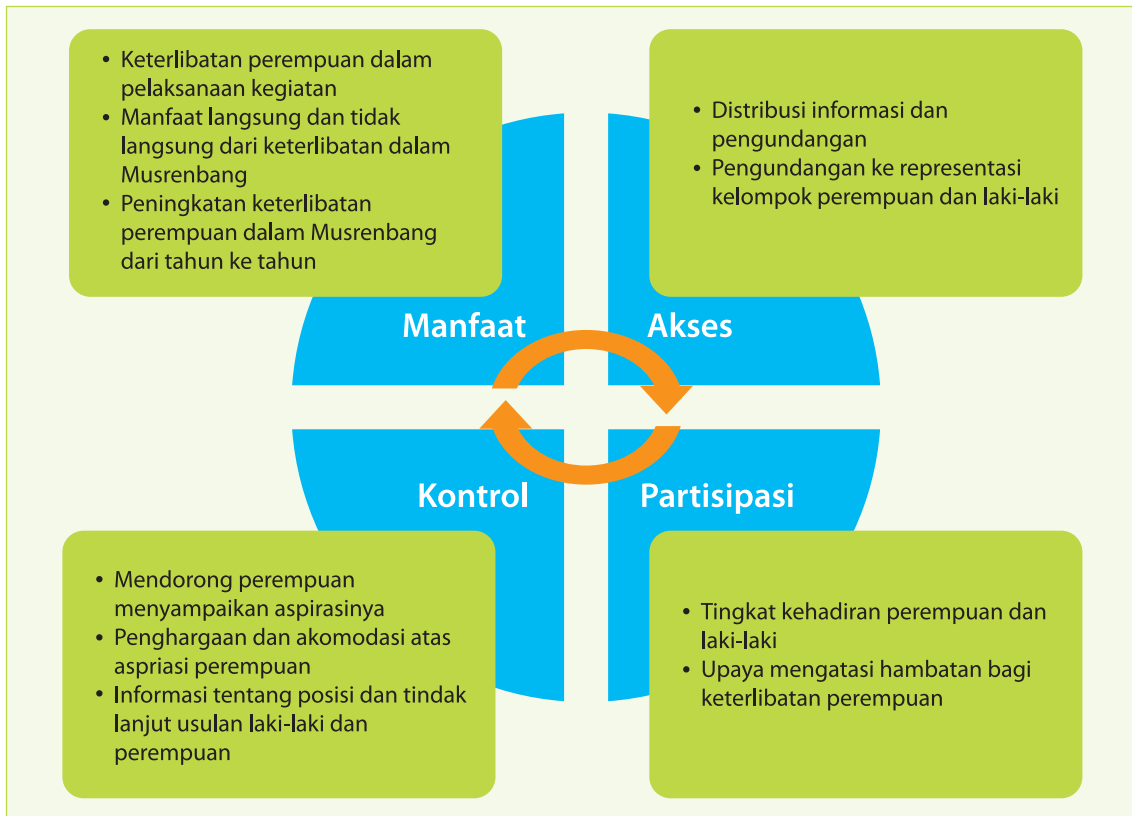
a. Proses Musrenbang



- Musrenbang menjadi saluran artikulasi kepentingan masyarakat dalam proses perencanaan.
- Perlu untuk memastikan keterlibatan, akses, kontrol dan manfaat yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam proses Musrenbang.

b. Integrasi Gender dalam Musrenbang

- Langkah integrasi gender bisa mencakup perbaikan-perbaikan pada level substantif pada pendekatan dan kualitas deliberasi dalam proses Musrenbang:
 - o memberi penghargaan yang sama antara isu yang dilontarkan laki-laki dan perempuan, dan
 - o memberi informasi tindak lanjut yang memadai atas usulan baik laki-laki maupun perempuan.
- Langkah integrasi gender bisa mencakup perbaikan pada level teknis yang memungkinkan keterlibatan baik perempuan maupun laki-laki di dalam proses Musrenbang:
 - o memastikan distribusi undangan
 - o setting tempat dan pemilihan waktu yang memungkinkan keterlibatan perempuan dan laki-laki



Referensi Lanjutan: Lihat referensi lanjutan untuk Sesi 10 tentang “Integrasi Dimensi Gender ke dalam Proses Musrenbang” di CD-Rom yang terlampir Modul ini.

II. Panduan Praktikum

1. Panduan Roleplay

a. Daftar Peran untuk setiap peserta adalah sebagai berikut

- **Kepala desa** yang populer tetapi tidak terlalu paham detail kebijakan termasuk prosedur penyelenggaraan Musrenbang, laki-laki.
- **Sekretaris desa**, usia 53 tahun, sudah 13 tahun menjabat sebagai sekretaris desa, berpengalaman dengan aspek-aspek pemerintahan desa dan pengelolaan pembangunan.
- **Pengurus PKK desa**, perempuan, istri dari sekretaris desa.
- **Kader posyandu** di tingkat desa, perempuan, usia 42 tahun, sudah belasan tahun menjadi kader.
- **Guru SD**, laki-laki, usia 50 tahun, tokoh masyarakat yang menjadi pemimpin sidang Musrenbang.
- **Kepala dukuh**, laki-laki, usia 59 tahun, yang dusunnya merupakan pusat desa, pengusaha kerajinan.
- **Kepala dukuh**, laki-laki, usia 38 tahun, petani, menjadi kepala dukuh di wilayah termiskin di kawasan perbukitan yang setiap tahun mengalami longsor dan krisis air bersih.
- **Anggota LPMD**, laki-laki, seorang wiraswasta yang sedang merintis bisnis konstruksi.

b. Petunjuk Roleplay

- Peserta diminta memerankan suasana pertemuan Musrenbang di tingkat desa.
- Agendanya adalah pembahasan program prioritas dan pemilihan delegasi desa ke Musrenbang di tingkat kecamatan.
- Suasana pertemuan cukup ramai karena muncul usulan yang sama-sama dianggap penting, baik fisik maupun nonfisik.

2. Praktikum Pengalaman Integrasi Gender dalam Musrenbang

- Identifikasikanlah pengalaman peserta dalam perbaikan dan mendorong integrasi gender dalam Musrenbang.
- Tuliskan atas kartu metaplan dan tempelkan sesuai dengan aspek integrasi dan perbaikan.

Aspek	Langkah integrasi dan perbaikan Musrenbang
Akses	
Partisipasi	
Kontrol	
Manfaat	

BAGIAN 3

Penganggaran Daerah yang Responsif Gender

Cakupan:

- **Sesi 12: Mekanisme Penganggaran Daerah**
- **Sesi 13: Konsep Anggaran Responsif Gender**
- **Sesi 14: Instrumen Anggaran Responsif Gender**
- **Sesi 15: Integrasi Gender dalam Dokumen KUA-PPAS**
- **Sesi 16: Integrasi Gender dalam Dokumen RKA-SKPD**

SESI 12

Konsep dan Mekanisme Penganggaran Daerah

Tujuan	Memperkuat pemahaman mengenai konsep penganggaran di daerah
Output	Peserta memahami konsep penganggaran daerah, relasinya dengan perencanaan, dan memahami dokumen anggaran serta bisa mengidentifikasi aktor strategis dalam penganggaran daerah
Metode	Presentasi, praktikum dan diskusi interaktif
Waktu	90 menit
Alat Bantu	I. Presentasi 1. Konsep, Proses dan Dokumen Kunci Penganggaran II. Panduan Praktikum 1. Identifikasi Aktor Kunci dalam Penganggaran Daerah III. Bahan Bacaan 1. Muatan Dokumen Penganggaran Daerah
Perlengkapan	LCD projector, kartu metaplan, spidol, pinboard, sticky notes
Urgensi Sesi	Mengenali sistem dan mekanisme penganggaran menjadi penting karena PPRG tidaklah keluar dari sistem perencanaan dan penganggaran yang ada. Sesi ini juga menjadi transisi untuk masuk ke dalam aspek-aspek yang lebih teknis dan mendalam dari anggaran responsif gender, setelah sebelumnya lebih banyak mendiskusikan aspek perencanaan.

A. Proses

Langkah 1: Presentasi: Konsep, Proses dan Dokumen Kunci Penganggaran (30 menit)

Tujuan: Menyampaikan konsep penganggaran daerah serta kaitan penganggaran dan perencanaan

1. Paparkan konsep penganggaran daerah dan relasinya dengan proses perencanaan dan aktor-aktor kunci untuk setiap. Juga kerangka regulasinya
2. Beri waktu peserta untuk memberikan input

Langkah 2: Praktikum: Identifikasi Aktor Kunci dalam Penganggaran Daerah (30 menit)

Tujuan: Mengidentifikasi aktor kunci dalam proses penganggaran

1. Buatlah daftar aktor kunci pada proses penganggaran daerah.
2. Mintalah peserta mengisi matriks tentang kewenangan dan kuasa setiap aktor kunci dengan menggunakan template yang terlampir di bawah
3. Ulas paparan peserta dengan beberapa pertanyaan berikut ini:
 - Siapa sajakah aktor yang berpengaruh besar terhadap proses penganggaran daerah?
 - Bagaimanakah dinamika relasi antarpihak di daerah? Apakah variabel yang mempengaruhi relasi ini?

Langkah 3: Pameran Dokumen-dokumen Kunci Penganggaran Daerah (30 menit)

Tujuan: Mencermati Dokumen-dokumen kunci penganggaran daerah

1. Tempelkan tabel tentang dokumen-dokumen kunci penganggaran, format dan contohnya di dinding
2. Berilah kesempatan kepada peserta untuk mencermati dokumen-dokumen kunci anggaran.
3. Mintalah pendapat sekilas dari peserta tentang penerapan format-format dokumen ini di daerah. Apakah sama atukah ada modifikasi? Bila ada, beri penjelasan dengan menempelkan di *sticky notes*.

B. Alat Bantu

I. Presentasi

1. Konsep, Proses dan Dokumen Kunci Penganggaran

a. Konsep Anggaran dan Penganggaran

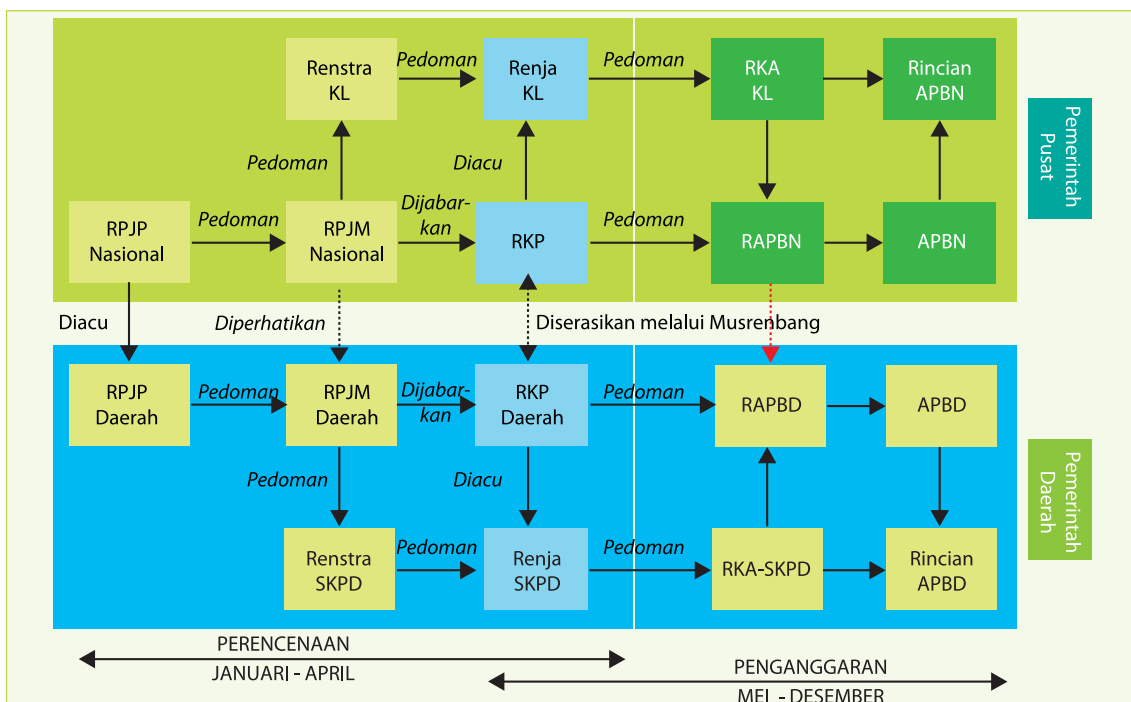
- **Anggaran:** pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial.
- **Penganggaran:** Proses/metode untuk mempersiapkan suatu anggaran.
- **APBD:** Rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
- **Anggaran Kinerja:** Anggaran Kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan pada upaya pencapaian hasil kerja atau *output* dari rencana alokasi biaya atau *input* yang ditetapkan. Artinya setiap anggaran yang dialokasikan harus dapat diukur dan ditentukan *outcome* dan *output* yang ingin dicapai.

b. Tujuan Penyusunan Anggaran Kinerja

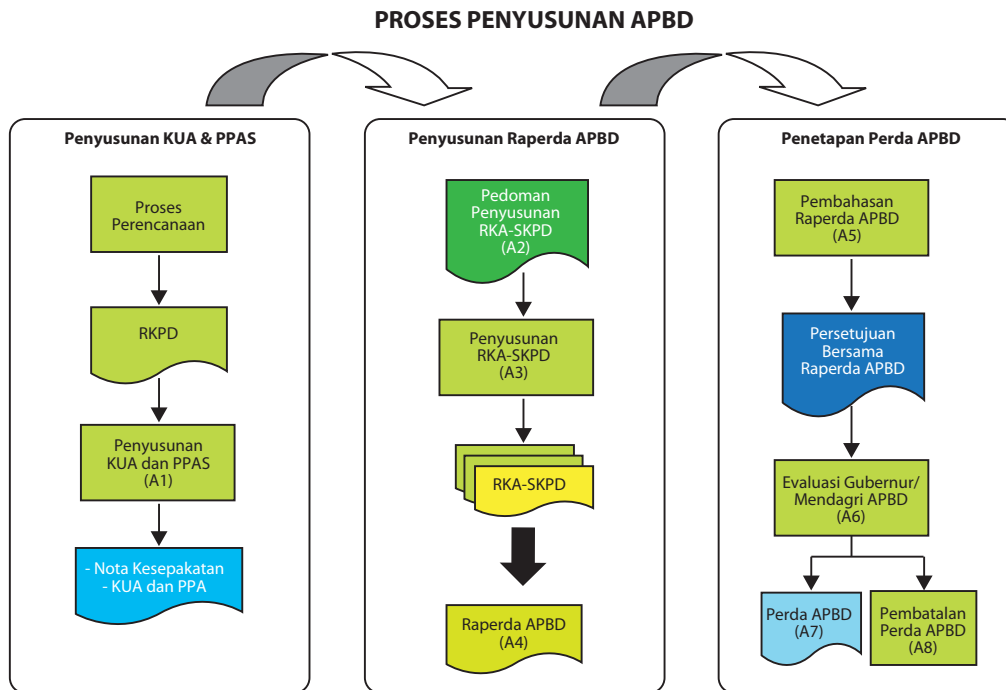
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik
- Meningkatkan efisiensi pelaksanaan anggaran dengan menghubungkan kerja dan kegiatan terhadap biaya.
- Mendukung alokasi anggaran terhadap prioritas program dan kegiatan
- Penilaian pencapaian kinerja yang diukur dengan indikator yang ditetapkan secara substantif (efisien, efektif dan ekonomis,3E)

c. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran

- Proses perencanaan dan penganggaran merupakan dua proses yang saling terkait.
- Keterkaitan ini nampak dalam Undang-undang terkait:
 - o UU 17 pasal 12 (2) disebutkan bahwa: "Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman kepada rencana kerja pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara".
 - o UU No. 25 /2004 pasal 25 (2): "Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjadi pedoman penyusunan APBD."



d. Proses Penganggaran



- KUA-PPAS menentukan alokasi anggaran untuk program dan kegiatan tertentu untuk periode satu tahun melalui kesepakatan antara kepala daerah dengan DPRD
- Nota kesepakatan KUA-PPAS tersebut menjadi dasar penyusunan pedoman penyusunan RKA bagi setiap SKPD.
- Usulan SKPD ditinjau ulang oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan dikompilasi menjadi RAPBD.
- RAPBD diajukan kepada DPRD dan dibahas melalui serangkaian sidang, dan akan disahkan menjadi Perda APBD, setelah dievaluasi oleh Mendagri/ Gubernur.
- Perda APBD ini menjadi panduan bagi SKPD untuk menyusun DPA SKPD yang mengacu kepada RKA yang sudah disusun.
- Dalam tahapan pelaksanaan, perubahan APBD dimungkinkan karena beberapa alasan berikut:
 - o Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi dalam KUA
 - o Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja
 - o Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk kegiatan tahun berjalan
 - o Keadaan darurat
 - o Keadaan luar biasa

e. Dokumen Kunci dalam Penganggaran Daerah

1. Kebijakan Umum Anggaran (KUA)
 - KUA merupakan dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun.
 - Ditetapkan bersama dengan PPAS melalui nota kesepakatan antara Kepala Daerah dengan DPRD.
2. Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
 - PPAS menjelaskan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran untuk setiap program ditentukan bersama oleh kepala daerah dan DPRD.
 - Kesepakatan ini diikuti dengan pedoman penyusunan RKA-SKPD dan akan dipakai oleh SKPD sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.

3. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD)

- RKA-SKPD merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan APBD

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir RKA-SKPD 2.2.1			
Provinsi/Kab/Kota:					
Tahun Anggaran:					
Urusan pemerintahan				
Organisasi				
Program				
Kegiatan				
Lokasi Kegiatan				
Jumlah tahun n-1	Rp(.....)				
Jumlah tahun n	Rp(.....)				
Jumlah tahun n+1	Rp(.....)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja			
Capaian program					
Masukan					
Keluaran					
Hasil					
Kelompok Sasaran Kegiatan					
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan SKPD					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			
		Volume	Satuan	Harga satuan	Jumlah (Rp)
x.x.x.xx.xx					
x.x.x.xx.xx					
x.x.x.xx.xx					
Jumlah					

4. DPA-SKPD

- DPA-SKPD disusun oleh masing-masing SKPD yang merinci sasaran yang hendak dicapai, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, serta rencana penarikan dana tiap-tiap SKPD serta pendapatan yang diperkirakan
- Dokumen ini merupakan penyesuaian dari RKA SKPD setelah penetapan APBD yang menjadi dasar pelaksanaan dan penggunaan anggaran
- Mengingat dinamika proses penetapan anggaran, perlu pengecekan kembali indikator dan tolok ukur kinerja, khususnya pada target kinerja: apakah perubahan alokasi anggaran ini signifikan, dan apakah target kinerja yang ditetapkan cukup realistis dan rasional?

Referensi Lanjutan: Lihat referensi lanjutan untuk Sesi 12 tentang “Penganggaran di Daerah” dan “Anggaran Responsif Gender dan Anggaran Berbasis Kinerja” di CD-Rom yang terlampir Modul ini.

II. Panduan Praktikum

1. Identifikasi Aktor Kunci dalam Penganggaran Daerah

- Dalam kelompok identifikasilah aktor kunci dalam penganggaran daerah, peran dan kewenangan mereka. Dokumentasikan hasil dalam format berikut pada papan *pinboard*.

	Aktor Kunci	Peran	Kewenangan/ Kuasa
1			
2			
<i>dst nya</i>			

III. Bahan Bacaan

1. Muatan Dokumen Penganggaran Daerah

Dokumen	Level, Durasi	Dokumen	Muatan/outline
Format KUA	Daerah; satu tahun	Lampiran A.X.a Permendagri No. 59 tahun 2007	<ol style="list-style-type: none"> I. Pendahuluan: latar belakang penyusunan KUA, tujuan penyusunan KUA dan dasar hukum penyusunan KUA II. Kerangka Ekonomi Makro Daerah: perkembangan indikator ekonomi makro daerah tahun sebelumnya, rencana target ekonomi makro pada tahun perencanaan, III. Asumsi Dasar dalam Penyusunan RAPBD: asumsi dasar dalam APBN, laju inflasi, pertumbuhan PDRB, lain-lain asumsi IV. Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah: <ol style="list-style-type: none"> a. Pendapatan daerah: kebijakan perencanaan pendapatan, target pendapatan daerah, upaya mencapai target, b. Belanja Daerah: total perkiraan belanja, kebijakan belanja, kebijakan pembangunan daerah dan prioritas pembangunan nasional yang akan dilaksanakan di daerah, kebijakan belanja berdasar urusan dan SKPD c. Pembiayaan Daerah: kebijakan penerimaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan V. Penutup
Format PPAS	Daerah; satu tahun	Lampiran A.XI.3 Permendagri No. 59 tahun 2007	<ol style="list-style-type: none"> I. Pendahuluan: latar belakang, tujuan, dan dasar penyusunan PPAS II. Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah: target pendapatan dan penerimaan pembiayaan III. Prioritas Belanja Daerah: prioritas pembangunan, sasaran, SKPD yang melaksanakan dan nama program. Prioritas disusun berdasarkan urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan IV. Plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan dan program/kegiatan: plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan secara deskriptif dalam bentuk tabel V. Plafon anggaran sementara berdasarkan program kegiatan: berisikan plafon anggaran sementara berdasarkan program kegiatan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi VI. Plafon anggaran sementara untuk belanja pegawai, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, secara deskriptif dalam bentuk tabulasi VII. Rincian pembiayaan daerah: berisi target penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah
RKA-SKPD	Sektor/SKPD; satu tahun	Formulir RKA-SKPD 2.2.1 untuk belanja langsung Permendagri No. 59 tahun 2007	<ol style="list-style-type: none"> I. Urusan pemerintahan II. Organisasi III. Program IV. Kegiatan V. Lokasi Kegiatan VI. Jumlah tahun VII. Indikator VIII. Capaian program IX. Masukan X. Keluaran XI. Hasil XII. Kelompok Sasaran Kegiatan XIII. Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan SKPD

Dokumen	Level, Durasi	Dokumen	Muatan/outline
DPA-SKPD	Sektor/SKPD; satu tahun	Formulir DPA-SKPD 2.2.1 untuk belanja langsung Permendagri No. 59 tahun 2007	I. Urusan pemerintahan II. Organisasi III. Program IV. Kegiatan V. Lokasi Kegiatan VI. Jumlah tahun VII. Indikator VIII. Capaian program IX. Masukan X. Keluaran XI. Hasil XII. Kelompok Sasaran Kegiatan XIII. Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan SKPD XIV. XIV.Rencana Penarikan Dana Triwulan

2. Muatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Nomor DPA SKPD						FORMULIR DPA-SKPD 2.2.1
		x.xx	xx	xx	xx	5	2	
Provinsi/Kab/Kota:								
Tahun Anggaran:								
Urusan pemerintahan	x.xx						
Organisasi	x.xx.xx						
Program	x.xx.xx.xx						
Kegiatan	x.xx.xx.xx.xx						
Waktu Pelaksanaan							
Lokasi kegiatan							
Sumber Dana							
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung								
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja				
Capaian program								
Masukan								
Keluaran								
Hasil								
Kelompok Sasaran Kegiatan								
Rincian Anggaran Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah								
Kode Rekening		Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)		
			Volume	Satuan	Harga satuan			
1		2	3	4	5	6 = 3 x 5		
xx	xx	xx	xx	xx				
xx	xx	xx	xx	xx				
xx	xx	xx	xx	xx				
xx	xx	xx	xx	xx				
Jumlah								
Rencana Penarikan Dana per Triwulan								
Triwulan I	Rp.....		, tanggal				
Triwulan II	Rp.....			Mengesahkan,				
Triwulan III	Rp.....			Pejabat Pengelola Keuangan Daerah				
Triwulan IV	Rp.....			(tanda tangan)				
Jumlah Rp.....			(nama lengkap)					
			NIP					

SESI 13

Konsep Anggaran Responsif Gender

Tujuan	Memberikan pemahaman mengenai konsep ARG
Output	Peserta memahami konsep ARG, jenis-jenis anggaran dari perspektif ARG, mempraktekkan konsep klasifikasi anggaran
Metode	Permainan, presentasi, diskusi interaktif, praktikum
Waktu	75 menit
Alat Bantu	I. Presentasi 1. Anggaran Kinerja, Anggaran Responsif Gender (ARG) dan Kategori ARG II. Panduan Praktikum 1. <i>Choose Your Spot</i> 2. Identifikasi Kegiatan Responsif Gender III. Bahan Bacaan 1. Kategori Anggaran Responsif Gender 2. Contoh Klasifikasi ARG dalam Beberapa Urusan Pemerintah Daerah
Perlengkapan	<i>Pinboard, LCD projector, spidol, sticky notes, kartu-kartu metaplan</i>
Urgensi Sesi	Membekali peserta dengan kerangka konseptual anggaran responsif gender, mengingat terdapat dinamika dalam konsep anggaran responsif gender di dalam kebijakan. Konsep ini juga dieksplorasi dengan mempertimbangkan struktur pemerintahan di daerah, utamanya pembagian urusan dan kewenangan antarSKPD dan antara provinsi dengan kabupaten/kota

A. Proses

Langkah 1: Permainan: *Choose Your Spot* (15 menit)

Tujuan: Mengenali beberapa konsep dan istilah kunci dalam ARG

1. Siapkan sekitar 5-6 pernyataan terkait dengan ARG untuk pengantar dan sekaligus menguji pemahaman peserta. Pernyataan ini terkait dengan konsep anggaran responsif gender. Daftar pernyataan terlampir dalam alat bantu.
2. Juga siapkan tiga kartu bertuliskan 'setuju', 'tidak setuju', dan 'ragu-ragu'.
3. Tempelkan ketiga kartu sikap di tempat yang agak berjauhan.
4. Fasilitator akan membacakan pernyataan dan peserta diminta berlari ke salah satu di antara tiga kartu sikap untuk menjelaskan pilihan sikapnya. Setelah itu, beri kesempatan setiap kelompok untuk memberikan alasan dan juga memberikan tanggapan balik atas alasan kelompok lain.
5. Lanjutkan dengan pernyataan kedua, dan seterusnya sampai selesai.

Langkah 2: Presentasi: Anggaran Kinerja, Anggaran Responsif Gender (ARG) dan Kategori ARG (15 menit)

Tujuan: Menyampaikan informasi mengenai regulasi dan praktek ARG

1. Paparkan sekilas tentang regulasi dan praktek anggaran responsif gender. Tekankan pada penjelasan tentang deskripsi dan fungsi tiga belanja responsif gender (spesifik, afirmasi dan peningkatan kapasitas, serta belanja secara umum).
2. Bagikan bahan bacaan kepada peserta, persilakan mereka untuk membacanya beberapa saat.
3. Beri kesempatan peserta untuk memberi tanggapan dan masukan, beri tanggapan balik.

Langkah 3: Pratikum: Identifikasi Kegiatan Responsif Gender (30 menit)

Tujuan: Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan klasifikasi belanja ARG

1. Fasilitator menyiapkan matriks untuk kerja kelompok sebagaimana terlampir dalam alat bantu di bawah ini.
2. Mintalah mereka melihat ulang isu strategis gender, urusan dan SKPD yang telah ditetapkan pada sesi sebelumnya relevan dan menentukan sejumlah kegiatan yang relevan untuk mengatasi isu strategis tersebut dalam rangka program yang telah diusulkan.
3. Kemudian kelompok mengidentifikasi ketiga kategori belanja responsif gender untuk masing-masing kegiatan yang telah dirumuskan dengan format matriks yang dapat dilihat di Alat Bantu.

Langkah 4: Presentasi dengan Metode Cross-Check Antarkelompok (15 menit)

Tujuan: Melakukan review terhadap hasil praktikum setiap kelompok

1. Mintalah kelompok yang satu menjadi peninjau ulang bagi kelompok yang lain, dan sebaliknya. Peninjau ulangan dilakukan atas identifikasi kegiatan yang sudah dilakukan pada tahapan sebelumnya, dan dipersilakan bilamana akan menambahkan usulan kegiatan.
2. Beri kesempatan kepada satu atau dua kelompok membacakan hasilnya, termasuk hasil tinjauan dari kelompok pasangannya.
3. Ulas dan simpulkan.

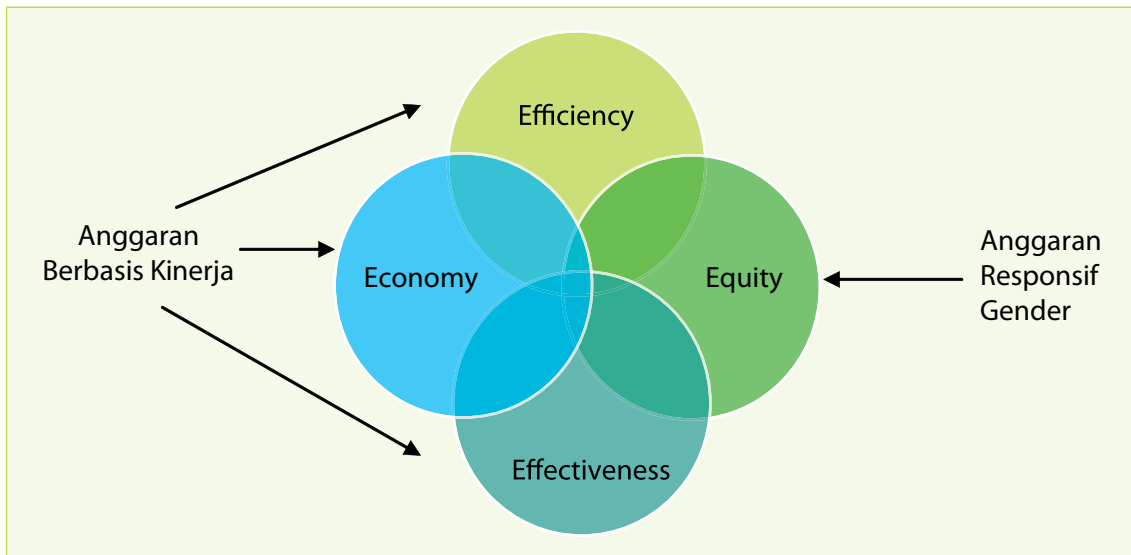
B. Alat Bantu

I. Presentasi

1. Anggaran Kinerja, Anggaran Responsif Gender (ARG) dan Kategori ARG

a. Anggaran Kinerja dan Anggaran Responsif Gender (ARG)

- Konsep dan praktek ARG bisa diletakkan di dalam anggaran kinerja yang berorientasi pada hasil. Ini berbeda dengan anggaran tradisional yang berfokus pada *input*.
- Orientasi hasil pada anggaran kinerja memberi peluang untuk memasukkan konsep dan pendekatan ARG di rumusan indikator kinerja
- ARG adalah: penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender (Permendagri No. 15 tahun 2008).
- Anggaran kinerja berbasis pada tiga prinsip yang dikenal sebagai 3E, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.
- ARG menyumbang satu prinsip lagi, yaitu kesetaraan atau *equity*.



- Kesetaraan bisa dimasukkan dalam perumusan indikator kinerja yang menjadi pilar dari anggaran berbasis kinerja.
- Beberapa hal kunci tentang ARG:
 - o ARG bukanlah anggaran terpisah untuk laki-laki dan perempuan, dan tidak sama dengan anggaran untuk perempuan
 - o Tidak selalu berarti penambahan alokasi
 - o ARG menekankan pada masalah kesetaraan dalam penganggaran. Kesetaraan tersebut berupa proses maupun dampak alokasi anggaran dalam program/kegiatan yang bertujuan menurunkan tingkat kesenjangan gender
 - o ARG bekerja dengan cara menelaah dampak dari belanja suatu kegiatan terhadap perempuan dan laki-laki, dan kemudian menganalisis apakah alokasi anggaran tersebut telah menjawab kebutuhan perempuan serta kebutuhan lelaki secara memadai

b. Kategori ARG

- Terdapat tiga kategori belanja pemerintah responsif gender:
 1. Anggaran Spesifik Gender: menasar kelompok gender tertentu di dalam masyarakat
 2. Anggaran untuk Tindakan Afiriasi dan Kelembagaan PUG: anggaran untuk mendorong kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam jabatan publik; anggaran untuk memperkuat prasyarat PUG termasuk pengembangan kapasitas staf pemerintah, pengadaan data pilah, koordinasi lintas sektor
 3. Anggaran untuk Kesetaraan Gender: pengarusutamaan gender dalam anggaran di semua sektor, yang berdampak baik bagi laki-laki maupun perempuan

II. Panduan Praktikum

1. Permainan: Choose Your Spot

- Pilih pernyataan yang berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dan perdebatan di antara peserta, sekaligus sebagai pintu masuk ke materi konsep anggaran responsif gender. Beberapa pernyataan yang bisa dipakai untuk permainan ini antara lain adalah:
 - o Anggaran untuk perempuan secara otomatis akan responsif gender.
 - o Anggaran responsif gender merupakan pengganti terhadap sistem anggaran berbasis kinerja.
 - o Apabila anggaran sudah berpihak pada orang miskin, maka bisa dipastikan anggaran ini juga akan responsif gender.
 - o Manfaat penerapan anggaran responsif gender jauh lebih sedikit daripada biaya dan upaya yang harus dikeluarkan.
 - o Sebuah anggaran dikatakan responsif gender bilamana indikatornya secara eksplisit mencantumkan indikator gender.
 - o Tidak semua anggaran harus dibuat responsif gender.

2. Identifikasi Kegiatan Responsif Gender

Pergunakan matriks ini untuk kerja kelompok identifikasi kegiatan responsif gender

Isu Strategis Gender :

Hasil (mengacu kepada rumusan hasil sebelumnya)	SKPD (isilah dengan SKPD yang relevan dengan hasil yang akan dicapai)	Kegiatan Belanja Responsif Gender*		
		Kegiatan Spesifik gender	Kegiatan Afirmasi & Kelembagaan PUG	Kegiatan Kesetaraan Gender

* contoh kegiatan bisa mengacu kepada lampiran A.VIII Permendagri No. 13 tahun 2006, atau bisa juga mengusulkan kegiatan baru yang relevan dengan isu gender tersebut

III. Bahan Bacaan

1. Kategori Anggaran Responsif Gender

Kategori Karakter	Pengeluaran Spesifik Gender	Pengeluaran untuk Tindakan Afirmasi dan Kelembagaan PUG	Pengeluaran Kesetaraan Gender
Tujuan	Untuk memberikan perlindungan khusus terhadap perempuan rentan	Untuk memberikan insentif bagi perempuan di ranah publik, dan percepatan implementasi PUG	<ul style="list-style-type: none"> Memastikan manfaat pembangunan di semua sektor bisa diakses baik oleh laki-laki maupun perempuan Memperbaiki kualitas pelayanan publik yang lebih adil bagi laki-laki-laki maupun perempuan
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> Mengurangi kerentanan perempuan Mengurangi Kemiskinan 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan GEM Mempekuat prasyarat PUG 	<ul style="list-style-type: none"> Mengurangi kesenjangan HDI dan GDI Memenuhi SPM
Kelompok Sasaran (penerima manfaat)	Perempuan dan kelompok rentan (korban kekerasan, difable, miskin), Organisasi nonpemerintah yang melakukan pendampingan perempuan rentan	Perempuan pejabat, aparat pemerintah, organisasi nonpemerintah, ormas	Perempuan dan laki-laki
SKPD Pengampu	Utamanya bagian Pemberdayaan Perempuan	Utamanya bagian Pemberdayaan Perempuan, Bappeda, Badan Kepegawaian Daerah	Semua SKPD
Contoh	<ul style="list-style-type: none"> Anggaran untuk program dan kegiatan pemberdayaan perempuan yang menasar langsung perempuan Anggaran untuk penguatan layanan terpadu bagi perempuan korban kekerasan Anggaran untuk Women Crisis Centre atau LBH perempuan 	<ul style="list-style-type: none"> Anggaran untuk pelatihan-pelatihan bagi kelompok perempuan yang menduduki jabatan publik/ di dunia politik Anggaran untuk perbaikan mekanisme kerja, termasuk koordinasi PUG Anggaran untuk melahirkan regulasi yang mendorong kesetaraan gender Anggaran untuk data pilah, alat analisis dan lain-lain 	<ul style="list-style-type: none"> Anggaran pemberian beasiswa bagi RT miskin Anggaran pelatihan tenaga kerja Migran Anggaran penyusunan guideline integrasi gender di sektor tertentu
Contoh Program dan Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan Pelatihan bagi staf WCC Klinik KB keliling untuk laki-laki Bantuan permodalan bagi kelompok perempuan miskin dan difable 	<ul style="list-style-type: none"> Pelatihan politik bagi perempuan Pelatihan PUG bagi para kepala dan perencana SKPD Penyusunan pedoman ARG Penyusunan RAD PUG dan kerangka hukumnya Pengadaan data pilah sektor 	<ul style="list-style-type: none"> Beasiswa pendidikan menengah untuk anak perempuan di RT miskin Pelatihan bagi tenaga kerja migran laki-laki dan perempuan

2. Contoh Klasifikasi ARG dalam Beberapa Urusan Pemerintah Daerah

- Jenis kegiatan bisa mengacu baik kepada lampiran A.VII Kepmendagri No.13 tahun 2006, atau mengusulkan kegiatan baru (dimungkinkan dalam Permendagri No. 59 tahun 2007).

Urusan: Pekerjaan Umum

Kategori Anggaran	Kegiatan	Kode Rekening	SKPD Pengampu
Spesifik	Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam bagi kelompok rentan	1.04.xx.18.01	Dinas PU
	Pengembangan ruang bersalin	1.02.xx.26.10	Dinas Kesehatan
	Pelatihan pengelolaan sungai bagi ibu rumah tangga di kawasan pinggir sungai	1.03.xx.26.08	Dinas PU
Afirmasi dan Pelembagaan PUG	Pelatihan untuk para arsitek mengenai desain yang responsif gender		Dinas PU
	Rapat koordinasi integrasi gender dalam pembangunan infrastruktur		Bappeda
	Training pemetaan kebutuhan infrastruktur dengan analisis gender bagi staf perempuan		Dinas PU
	Pelatihan penyusunan data pilah		Badan PM Bag. PP
Kesetaraan Gender	Sosialisasi mengenai pemeliharaan sarana publik bagi laki-laki dan perempuan	1.03.xx.28.12	Dinas PU
	Pembangunan reservoir dengan pelibatan laki-laki dan perempuan	1.03.xx.24.07	Dinas PU
	Pembangunan sarana dan prasarana pasar desa	2.01.xx.17.05	Dinas PU

SESI 14

Instrumen Anggaran Responsif Gender

Tujuan	Meningkatkan pemahaman dan kecakapan akan instrumen kunci anggaran responsif gender
Output	Peserta paham dan terampil mempraktekkan Pernyataan Anggaran Gender (PAG) dan Kerangka Acuan Kerja atau <i>Kerangka Acuan Kegiatan</i> (KAK)
Metode	Presentasi, pameran, <i>marketplace</i> , dan diskusi interaktif
Waktu	135 menit
Alat Bantu	I. Presentasi tentang: 1. Fungsi Pernyataan Anggaran Gender (PAG) dan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) II. Lembar Kerja 1. Penyusunan PAG dan KAK III. Bahan Bacaan 1. Contoh Aplikasi PAG 2. Contoh Aplikasi KAK
Perlengkapan	<i>LCD projector</i> , kartu metaplan, <i>pinboard</i> , spidol, <i>sticky notes</i>
Urgensi Sesi	Kecakapan menyusun PAG diperlukan untuk melihat konsistensi dari analisis gender hingga ke alokasi anggaran. Sebagai basis argumentasi alokasi, dokumen ini berperan dalam memberikan argumentasi akan alokasi untuk sebuah program/ kegiatan tertentu. Sementara untuk KAK, walaupun merupakan alat yang cukup populer, integrasi gender di dalamnya diperlukan dengan mempergunakan hasil analisis gender yang sudah dilakukan.

A. Proses

Langkah 1: Presentasi: Fungsi Pernyataan Anggaran Gender (PAG) dan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) (25 menit)

Tujuan: Peserta memahami fungsi PAG dan KAK

1. Presentasikan bahan tentang konsep Pernyataan Anggaran Gender (PAG) dan fungsinya sebagai basis KUA-PPAS. Kemudian lanjutkan dengan konsep dan fungsi KAK.
2. Paparkan juga langkah penyusunan PAG, dan keterkaitannya dengan KUA-PPAS. Setelah itu, paparkan langkah integrasi gender dalam KAK.

Langkah 2: Pameran Format PAG dan KAK (20 menit)

Tujuan: Peserta memahami format PAG dan KAK

1. Tempelkan format PAG, format dan contoh KAK yang responsif gender dan beberapa contohnya di dinding.
2. Mintalah peserta melihat dan mengkritisi beberapa contoh tersebut.
3. Gali juga informasi dari peserta apabila ada format yang berbeda dalam PAG atau KAK yang diterapkan di daerah, dan mintalah mereka menjelaskan.

Langkah 3: Praktikum: Penyusunan PAG dan KAK (60 menit)

Tujuan: Peserta terampil menyusun PAG dan KAK

1. Peserta akan bekerja secara berkelompok, dengan kelompok yang sama dengan sebelumnya.
2. Mintalah mereka menyusun PAG untuk satu program yang relevan dengan isu strategis gender yang telah dirumuskan.
3. Mintalah juga mereka menyusun KAK untuk satu kegiatan dalam program yang sama

Langkah 4: Presentasi Melalui *Marketplace* (30 menit)

Tujuan: Mempresentasi hasil kerja kelompok dan menggali input dari kelompok lain

1. Peserta melihat hasil kerja kelompok lain selama lima menit. Saatnya memberikan komentar dan tanggapan.
2. Setelah selesai, mintalah satu kelompok memaparkan hasil kerja.
3. Diskusikan dengan peserta, dari pengalaman menyusun PAG dan KAK: Apakah kesulitan/ kendala dalam penyusunan kedua alat ini, dan apakah solusi yang bisa dilakukan?

B. Alat Bantu

I. Presentasi

1. Fungsi Pernyataan Anggaran Gender (PAG) dan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK)

a. Fungsi Pernyataan Anggaran Gender (PAG)

- PAG adalah dokumen yang menginformasikan suatu kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang ada, dan apakah telah dialokasikan dana pada kegiatan bersangkutan untuk menangani permasalahan gender tersebut.
- PAG dalam praktek penganggaran daerah sampai sekarang ini biasanya disusun pada saat persiapan RKA-SKPD.
- Ada peluang integrasi perspektif gender dalam KUA-PPAS jika PAG dipersiapkan lebih awal sehingga integrasi ini akan memperkuat pengarusutamaan gender melalui PPRG.

b. Format Pernyataan Anggaran Gender (PAG)

- Format: Terdapat beberapa format PAG. Di tingkat nasional, format PAG juga sudah mengalami perubahan. Sebagian daerah menggunakan format yang lama, atau ada juga yang menyusun format baru.
- Contoh format PAG yang diusulkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak seperti berikut:

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER

Nama SKPD:

Tahun:

Program	Nama program yang ada pada SKPD Kolom 1 GAP	
Tujuan Program	Tujuan asli yang tertera dalam program diganti dengan hasil reformulasi tujuan program Kolom 1 GAP Kolom 6 GAP	
Capaian Program	Lihat Renstra/Renja SKPD. Merupakan hasil kinerja pada tingkatan hasil/ <i>outcome</i>	
Kegiatan	Nama kegiatan sebagai penjabaran program Kolom 1 GAP	
Tujuan Kegiatan	Tujuan yang melekat dalam kegiatan diganti dengan hasil reformulasi tujuan kegiatan Kolom 1 GAP Kolom 6 GAP	
Subkegiatan	Nama subkegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari kegiatan dan/atau bagian/ tahapan kegiatan	
Kode Rekening	Lihat dalam Ketentuan Permendagri 13/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (jo Permendagri 59/2008)	
Analisis Situasi	Uraian ringkas yang menggambarkan persoalan yang akan ditangani/dilaksanakan oleh program/ kegiatan, dengan menekankan uraian pada aspek gender dari persoalan tersebut. Kolom 2 GAP: Data Pembuka Wawasan Kolom 3-4 GAP: Faktor Kesenjangan Gender	
Perencanaan Kegiatan	Kegiatan dan subkegiatan	Berisikan kegiatan yang diharapkan dapat menangani persoalan gender yang telah teridentifikasi dalam analisis situasi. Kolom 7 GAP: Rencana Aksi
	Output per kegiatan	Minimal berisikan sebuah indikator <i>output</i> bagi kegiatan yang relevan dengan persoalan gender yang telah diidentifikasi. Kolom 9 GAP:
	Komponen input	Sumber daya yang diperlukan untuk melakukan kegiatan
Anggaran Kegiatan	Jumlah anggaran yang dialokasikan pada kegiatan secara menyeluruh	
Dampak/Manfaat	Indikator hasil yang relevan dengan aspek gender yang telah diidentifikasi. Kolom 9 GAP	

c. Yang Perlu Diperhatikan dalam Penyusunan PAG

- PAG dapat disusun berdasarkan hasil analisis gender atau GAP.
- Sebagai sebuah pernyataan untuk memastikan anggaran sudah responsif gender, berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan PAG.
 - o **Analisis situasi, yang berisikan:**
 1. Gambaran kesenjangan akses, partisipasi, manfaat, kontrol antara perempuan dan laki-laki,
 2. Gambaran adanya faktor penghambat di internal (organisasi pemerintah, kelompok sasaran) dan atau eksternal (masyarakat secara luas); yang keduanya dapat dihubungkan dengan bagian latar belakang dalam KAK.
 - o **Indikator *outcome* yang dapat dihubungkan dengan *outcome* SKPD.** Lihat rumusan *outcome* yang juga sudah dihasilkan untuk setiap isu strategis gender sebagaimana sudah dilakukan sebelumnya.
 - o **Indikator *input* atau *output* yang dapat dihubungkan dengan apa saja barang dan jasa/ pelayanan yang dihasilkan dari kegiatan dalam program tersebut.** Pergunakan rumusan *output* yang juga sudah dihasilkan dalam proses perumusan indikator kinerja.

d. Fungsi Kerangka Acuan Kegiatan (KAK)

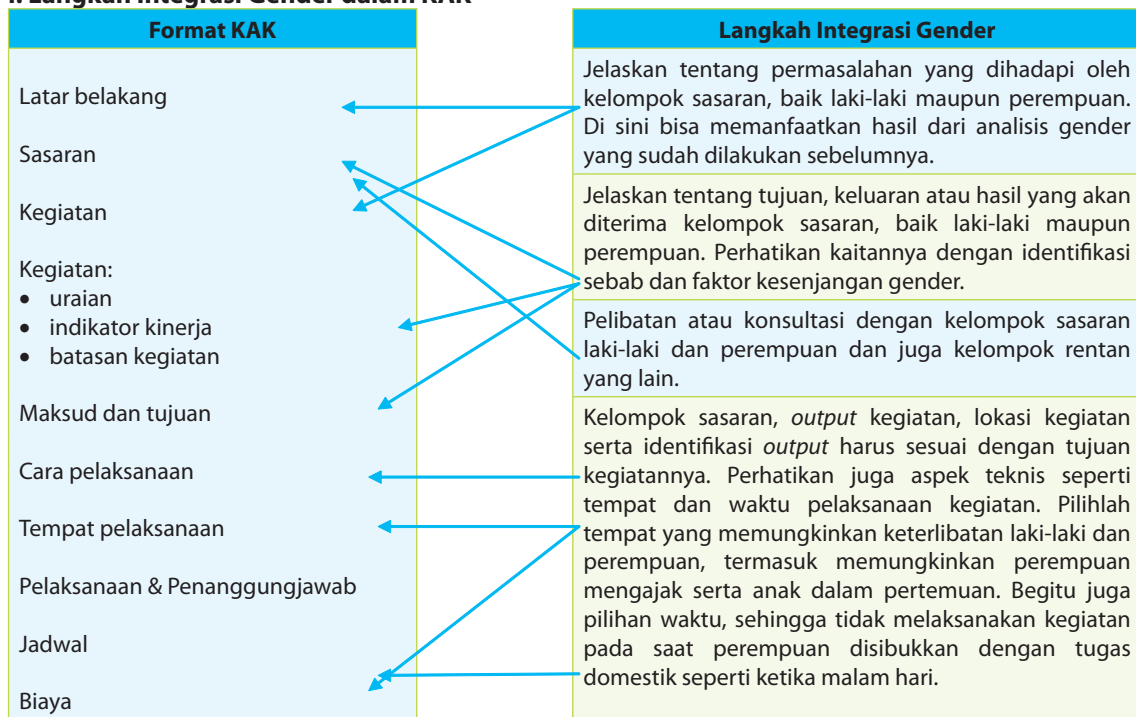
- KAK berfungsi sebagai pijakan atau kerangka acuan dalam sebuah program/ kegiatan.
- Dalam praktek penyelenggaraan penganggaran daerah, KAK biasanya dibuat dalam pelaksanaan kegiatan. Seharusnya dibuat pada saat persiapan RKA-SKPD
- Alat analisis ini melengkapi dengan aspek praktis untuk memastikan tercapainya tujuan dari sebuah program/kegiatan, karena itu akan sangat bermanfaat bila dibuat baik pada fase penyusunan anggaran maupun pada fase implementasinya.

e. Format Kerangka Acuan Kegiatan (KAK)

- Sebetulnya tidak terdapat format KAK yang diatur dalam regulasi tentang penganggaran. Namun demikian, biasanya KAK akan mencakup beberapa hal berikut ini:

Program	:	<i>diisi nama program</i>
Sasaran program	:	<i>apakah yang menjadi tujuan program</i>
Kegiatan	:	<i>diisi nama kegiatan</i>
Latar belakang	Dasar Hukum	<i>dasar hukum terkait dengan program/ kegiatan</i>
	Gambaran Umum	<i>gambaran situasi persoalan di daerah yang relevan dengan kegiatan yang dilakukan</i>
Kegiatan	Uraian Kegiatan	<i>rincian kegiatan atau aktivitas</i>
	Indikator Kinerja	<i>indikator untuk menilai keberhasilan sebuah kegiatan</i>
	Batasan Kegiatan	
Maksud dan tujuan	:	<i>tujuan yang ingin dicapai dari sebuah kegiatan</i>
Cara pelaksanaan kegiatan	:	<i>metode pelaksanaan kegiatan</i>
Tempat pelaksanaan kegiatan	:	<i>lokasi pelaksanaan kegiatan</i>
Pelaksana & penanggungjawab kegiatan	:	<i>pihak/aparat yang pelaksana dan yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan</i>
Jadwal	:	<i>waktu pelaksanaan</i>
Biaya	:	<i>kebutuhan dan rincian biaya untuk pelaksanaan kegiatan</i>

f. Langkah Integrasi Gender dalam KAK



II. Panduan Praktikum

1. Penyusunan PAG dan KAK

a. Praktikum Penyusunan PAG

- Susunlah PAG untuk kegiatan program yang relevan dengan isu gender yang sudah dirumuskan sebelumnya dengan menggunakan format PAG:

Program		
Tujuan Program		
Capaian Program		
Kegiatan		
Tujuan Kegiatan		
Subkegiatan		
Kode Rekening		
Analisis Situasi		
Perencanaan Kegiatan	Kegiatan dan subkegiatan	
	<i>Output per kegiatan</i>	
	<i>Komponen input</i>	
Anggaran Kegiatan		
Dampak/Manfaat		

b. Penyusunan KAK

- Susunlah KAK untuk kegiatan yang sama dengan penyusunan PAG. Gunakan format KAK yang ada:

Program		
Sasaran program		
Kegiatan		
Latar Belakang	Dasar Hukum	
	Gambaran Umum	
Kegiatan	Uraian Kegiatan	
	Indikator Kinerja	
	Batasan Kegiatan	
Maksud dan tujuan		
Cara pelaksanaan kegiatan		
Tempat pelaksanaan kegiatan		
Pelaksana & penanggungjawab kegiatan		
Jadwal		
Biaya		

III. Bahan Bacaan

1. Contoh Aplikasi Pernyataan Anggaran Gender (PAG)

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER

SKPD : Dinas Bina Marga
TAHUN ANGGARAN : 2011

Program	Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan
Tujuan Program	Tujuan Awal: Mendukung pengembangan perekonomian antarwilayah Reformulasi tujuan melalui GAP: Mendukung perekonomian antarwilayah melalui peningkatan mobilitas laki-laki dan perempuan pelaku ekonomi
Capaian Program	Jumlah dan luas jalan dan jembatan yang diperbarui yang dapat mendukung perekonomian masyarakat di wilayah selatan.
Kegiatan	Pembebasan tanah jaringan Jalan Lintas Selatan.
Tujuan Kegiatan	Tujuan awal: Tidak ada Reformulasi Tujuan melalui GAP: Melakukan pembebasan lahan secara adil dengan memperhatikan kepentingan laki-laki dan perempuan sebagai pemilik lahan dan pelaku usaha
Kode Rekening kegiatan	1 03 02 xx xx
Analisis Situasi	<p>1. Data Pembuka Wawasan</p> <ol style="list-style-type: none"> Data pemilik lahan (laki-laki dan perempuan) Jumlah laki-laki dan perempuan pelaku usaha Tingkat kepadatan lalu lintas antar kabupaten pada ruas jalan arteri yang ada saat ini semakin padat, sehingga dibutuhkan pembangunan jalan baru untuk menampung pertumbuhan lalu lintas ke depan. Kesempatan berusaha lintas kabupaten bisa terjalin, namun kendalanya adalah akses antarkabupaten belum semua mampu terjangkau oleh kendaraan umum yang banyak digunakan oleh pelaku UKM perempuan dan pelaku usaha lainnya. <p>2. Isu Gender dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <ol style="list-style-type: none"> Faktor Kesenjangan <ul style="list-style-type: none"> o Laki-laki lebih banyak dilibatkan dalam sosialisasi dan penetapan harga dibanding perempuan. o Pengambilan keputusan atas harga lahan tidak berada pada perempuan walaupun hak milik atas tanah ada pada perempuan. o Kegiatan masih dinikmati laki-laki karena penerima uang pembayaran pembebasan lahan selalu diserahkan kepada kepala keluarga yang sebagian besar adalah laki-laki. Penyebab Faktor Internal Kesenjangan Gender <ul style="list-style-type: none"> o Data awal kepemilikan berdasarkan jenis kelamin sesuai dengan nama yang tercantum dalam sertifikat belum pernah dimunculkan. Biasanya daftar nama kepala keluarga yang sebagian besar adalah laki-laki. o Masih ada anggapan di pemerintah bahwa pelaku usaha hanya laki-laki o Belum ada kajian sosial yang dapat mengetahui seberapa besar dampak yang ditimbulkan dari pembebasan lahan untuk perempuan. Penyebab Faktor Eksternal Kesenjangan Gender <ul style="list-style-type: none"> o Dalam masyarakat lelaki dominan mengambil keputusan terutama menyangkut sumber daya (tanah, lahan). o Perempuan merasa takut, malas mengurus pembebasan lahan walaupun hak milik tanah atas nama perempuan bahkan cenderung pasrah pada anggota keluarga yang laki-laki.

Perencanaan Kegiatan	Kegiatan	Pembebasan tanah jaringan Jalan Lintas Selatan
	Subkegiatan 1	Kompilasi dan pemutakhiran data kepemilikan lahan yang dipilah berdasarkan jenis kelamin pemilik
	Subkegiatan 2	Kajian mengenai dampak pembebasan lahan bagi laki-laki dan perempuan
	Subkegiatan 3	Sosialisasi mengenai proses pembebasan lahan dan penetapan harga kepada laki-laki dan perempuan
	Subkegiatan 4	Pembayaran ganti rugi lahan
	Indikator output	Luas tanah yang berhasil dibebaskan sesuai kesepakatan dengan pemilik lahan, laki-laki dan perempuan terkait pemanfaatan lahan dan nilai ganti rugi lahan
	Komponen Input	Dana untuk kegiatan dan pembebasan lahan, tenaga ahli
Sumber Dana	Rp 8,310 miliar dari APBD	
Dampak / Hasil / Manfaat	Menguatnya perekonomian antar wilayah melalui pengembangan akses laki-laki dan perempuan sebagai pemilik lahan maupun sebagai pelaku usaha terhadap peluang ekonomi	

Referensi Lanjutan: Lihat referensi lanjutan untuk Sesi 14 tentang “Pernyataan Anggaran Gender (PAG)” di CD-Rom yang terlampir Modul ini.

2. Contoh Aplikasi Kerangka Acuan Kegiatan (KAK)

Program		Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan
Sasaran program		Mendukung perekonomian antarwilayah melalui peningkatan mobilitas laki-laki dan perempuan pelaku ekonomi
Kegiatan		Pembebasan tanah jaringan Jalan Lintas Selatan
Latar Belakang	Dasar Hukum	Kebijakan tentang RPJMD dan kebijakan sektor terkait
	Gambaran Umum	<p>Tingkat kepadatan lalu lintas antar dua kabupaten di wilayah bagian selatan pada ruas jalan arteri yang ada saat ini semakin padat. Ini memunculkan kebutuhan akan pembangunan jalan baru untuk menampung pertumbuhan lalu lintas. Ini juga terkait dengan kesempatan berusaha lintas kabupaten yang penting untuk mendongkrak perekonomian, namun kendalanya adalah akses antarkabupaten belum semua terjangkau oleh kendaraan umum yang banyak digunakan oleh pelaku UKM laki-laki dan perempuan.</p> <p>Salah satu bagian penting dalam program pembangunan jalan ini adalah pembebasan tanah jaringan lintas selatan. Kegiatan yang dilakukan adalah sosialisasi mengenai program ini kepada pemilik lahan dan pelaku usaha, termasuk isu penetapan harga penggantian lahan. Namun dalam praktek, kegiatan ini lebih banyak melibatkan laki-laki dibandingkan perempuan. Ini juga diperkuat dengan proses pengambilan keputusan atas harga lahan yang selalu berada pada laki-laki walaupun hak milik atas tanah ada pada perempuan. Di masyarakat, lelaki dominan mengambil keputusan terutama menyangkut sumber daya (tanah, lahan). Sedangkan perempuan merasa takut, malas mengurus pembebasan lahan walaupun hak milik tanah atas nama perempuan. Belum ada kajian sosial yang dapat mengetahui seberapa besar dampak yang ditimbulkan dari pembebasan lahan untuk perempuan dan laki-laki pemilik lahan dan pelaku usaha di wilayah yang akan terkena dampak program dan kegiatan ini.</p>

Kegiatan	Uraian Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembebasan tanah jaringan Jalan Lintas Selatan 2. Kompilasi dan pemutakhiran data kepemilikan lahan yang dipilah berdasarkan jenis kelamin pemilik 3. Kajian mengenai dampak pembebasan lahan bagi laki-laki dan perempuan 4. Sosialisasi mengenai proses pembebasan lahan dan penetapan harga kepada laki-laki dan perempuan 5. Pembayaran ganti rugi lahan 6. Luas tanah yang berhasil dibebaskan sesuai kesepakatan dengan pemilik lahan, laki –laki dan perempuan terkait pemanfaatan lahan dan nilai ganti rugi lahan
	Indikator Kinerja	3.000 pemilik lahan dan pelaku usaha di dua Kabupaten, di mana 30% diantaranya perempuan
	Batasan Kegiatan	
Maksud dan tujuan	<p>Tujuan Umum: Melakukan pembebasan lahan untuk mendorong pembangunan ekonomi dan percepatan akses pembangunan</p> <p>Tujuan Khusus:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan penetapan harga pembebasan lahan bersama laki-laki dan perempuan pemilik lahan b. Mencari titik temu (kesepakatan) antara kebutuhan dan kepentingan pemerintah dan masyarakat yang terkena dampak program dan kegiatan tersebut, utamanya pemilik lahan dan pelaku usaha baik laki-laki maupun perempuan, tentang manfaat program dan kegiatan 	
Cara pelaksanaan kegiatan	<p>Cara Pelaksanaan Kegiatan: Kegiatan Pembebasan tanah jaringan Jalan Lintas Selatan akan dilakukan melalui beberapa aktivitas berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pendataan tanah beserta asset ekonomi yang ada didalamnya (pohon, bangunan, dll) yang terkena pembebasan lahan b. Sosialisasi kepada kelompok perempuan pemilik lahan dan pelaku usaha melalui pertemuan dasawisma atau posyandu: untuk menginformasikan rencana dan skema kegiatan, serta menggali pendapat dan aspirasi perempuan c. Sosialisasi kegiatan dibalai desa: akan dilakukan dengan mengundang wakil dari RT, tokoh masyarakat dan perwakilan kelompok dasawisma di wilayah yang akan terkena pembebasan lahan d. Pencairan dan distribusi ganti rugi kepada pemilik lahan, yang akan dilakukan dengan melibatkan laki-laki dan perempuan yang terkena pembebasan lahan 	
Tempat pelaksanaan kegiatan	Kegiatan ini akan dilakukan di 10 desa di 2 kabupaten yang akan dibebaskan	
Pelaksana & penanggungjawab kegiatan	Dinas Bina Marga	
Jadwal	Kegiatan ini dijadwalkan akan berlangsung selama 2 bulan (Maret-April 2011)	
Biaya	Rp 8,3 Miliar	

SESI 15

Integrasi Gender Dalam Dokumen KUA-PPAS

Tujuan	Mengembangkan keterampilan untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam dokumen KUA-PPAS
Output	Peserta memiliki ketrampilan untuk mengintegrasikan gender dalam dokumen KUA-PPAS dengan mendasarkan pada hasil PAG
Metode	<i>Role-play</i> tentang proses KUA dan PPAS, presentasi, curah gagasan
Waktu	90 menit
Alat Bantu	I. Panduan Praktikum 1. <i>Roleplay</i> tentang Penyusunan KUA-PPAS II. Presentasi 2. Integrasi Gender dalam Dokumen KUA-PPAS
Perlengkapan	<i>LCD projector</i> , kartu metaplan, <i>pinboard</i> , spidol, kursi untuk <i>roleplay</i>
Urgensi Sesi	Mendorong agar pertimbangan gender menjadi pijakan dalam penentuan kebijakan umum, dan juga alokasi anggaran. Fase penentuan alokasi anggaran ini sangat berperan sebagai kunci dalam anggaran responsif gender

A. Proses

Langkah 1: Identifikasi Aktor Kunci: *Roleplay* tentang Penyusunan KUA-PPAS (30 menit)

Tujuan: Mengidentifikasi aktor kunci dalam penyusunan KUA-PPAS

1. Siapkan daftar peran pihak-pihak kunci yang berpengaruh terhadap proses penentuan KUA-PPAS, baik yang memiliki peran langsung ataupun pengaruh tidak langsung
2. Perankan proses pembahasan KUA-PPAS sesuai dengan dua babak yang diperkenalkan di Alat Bantu sebagaimana terlampir.
3. Setelah selesai permainan, diskusikan beberapa pertanyaan kunci berikut ini:
 - a. Siapa sajakah pihak yang memiliki peran kunci dan langsung dalam proses KUA-PPAS? Apakah perannya?
 - b. Pihak-pihak mana sajakah yang memiliki peran secara tidak langsung? Dalam bentuk apa dan bagaimanakah peran ini dimainkan?

Langkah 2: Presentasi: Integrasi Gender dalam Dokumen KUA-PPAS (30 menit)

Tujuan: Peserta memahami peluang integrasi gender dalam dokumen KUA-PPAS

1. Fasilitator menjelaskan lagi secara singkat mengenai peran sentral dokumen KUA-PPAS dalam mekanisme pengelolaan keuangan daerah, serta formatnya.
2. Jelaskan bagaimana mengintegrasikan gender dengan memanfaatkan hasil PAG dalam penyusunan KUA-PPAS. Berilah contoh.
3. Beri kesempatan peserta untuk mengajukan pertanyaan dan konfirmasi

Langkah 3: Curah Gagasan: Integrasi Gender dalam KUA-PPAS (30 menit)

Tujuan: Peserta terampil mengintegrasikan gender dalam KUA-PPAS

1. Paparkan langkah-langkah integrasi gender dalam KUA PPAS dengan memanfaatkan hasil PAG.
2. Gali pengalaman dari peserta dalam mendorong KUA-PPAS yang responsif gender
3. Identifikasi bagaimanakah proses dan upaya yang bisa dilakukan untuk memasukkan gender dalam proses pembahasan KUA-PPAS ini? Siapa sajakah pihak kunci – seperti panitia Anggaran DPRD – yang bisa menjadi motor, dan apakah upaya yang dilakukan?

B. Alat Bantu

I. Panduan

1. Roleplay tentang Pemangku Kepentingan dalam Proses KUA-PPAS

- Mintalah tujuh peserta untuk memerankan adegan dua babak berikut ini:

Daerah X sedang menghadapi pemilu kepala daerah yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya. Walaupun selama kepemimpinan bupati kali ini, indikator ekonomi makro menunjukkan banyak perbaikan, seperti peningkatan nilai investasi dan peningkatan angka produk domestik bruto, namun angka kemiskinan justru menunjukkan trend kenaikan; begitu juga angka kematian ibu cenderung stagnan. Hanya angka kematian bayi yang relatif membaik. Isu lain terkait dengan alokasi anggaran adalah peningkatan gaji pegawai sebagaimana ketentuan pemerintah pusat sebanyak 15%. Daerah ini memiliki sebaran yang luas, dengan sepertiga diantaranya adalah kawasan terpencil.

Babak 1: Di Ruang Sidang DPRD

- Ketua DPRD sekaligus ketua Panitia Anggaran:** berasal dari partai besar, partai yang sama dengan kepala daerah. Di luar jabatannya sebagai ketua DPRD, ia memiliki pengalaman sebagai tokoh sebuah ormas. Terampil sebagai politisi, termasuk dalam membimbing isu pemangkasan anggaran untuk keperluan penyelenggaraan Pemilu pada tahun berikutnya.
- Bupati:** ini merupakan tahun terakhir jabatannya pada periode pertama menjabat sebagai bupati di daerah tersebut. Sebelum terpilih menjadi bupati, ia adalah pengusaha. Pada pemilu pada berikutnya, ia akan kembali mencalonkan diri. Kepentingannya yang utama adalah pembangunan infrastruktur fisik, mendorong investasi dan juga pertumbuhan ekonomi. Daerahnya cukup kaya sumber daya alam khususnya batubara, namun tingkat penduduk miskin masih relatif tinggi. Beberapa program unggulan dalam beberapa tahun terakhir antara lain adalah pembangunan jalan raya ke kawasan potensial pertambangan, penyederhanaan perizinan, dan perluasan kesempatan investasi.
- Anggota DPRD 1:** berasal dari partai yang sama dengan ketua DPRD dan kepala daerah. Walaupun cukup sering memberikan pernyataan kepada media, kepentingan yang selalu ia bawa adalah terkait dengan pembangunan infrastruktur fisik.
- Anggota DPRD 2:** anggota Panitia Anggaran DPRD dan komisi yang membidangi kesejahteraan. Berasal dari partai kecil, namun cukup progresif dalam menyuarakan isu-isu kemasyarakatan. Kali ini, ia mengangkat isu meningkatnya angka kematian ibu dan perluasan kesempatan kerja.
- Ketua Bappeda (selaku TAPD):** birokrat karir yang terampil dalam mengolah dan menerjemahkan visi misi kepala daerah dalam rumusan rancangan kebijakan. Walaupun begitu, ia tampil sebagai birokrat yang apolitis.

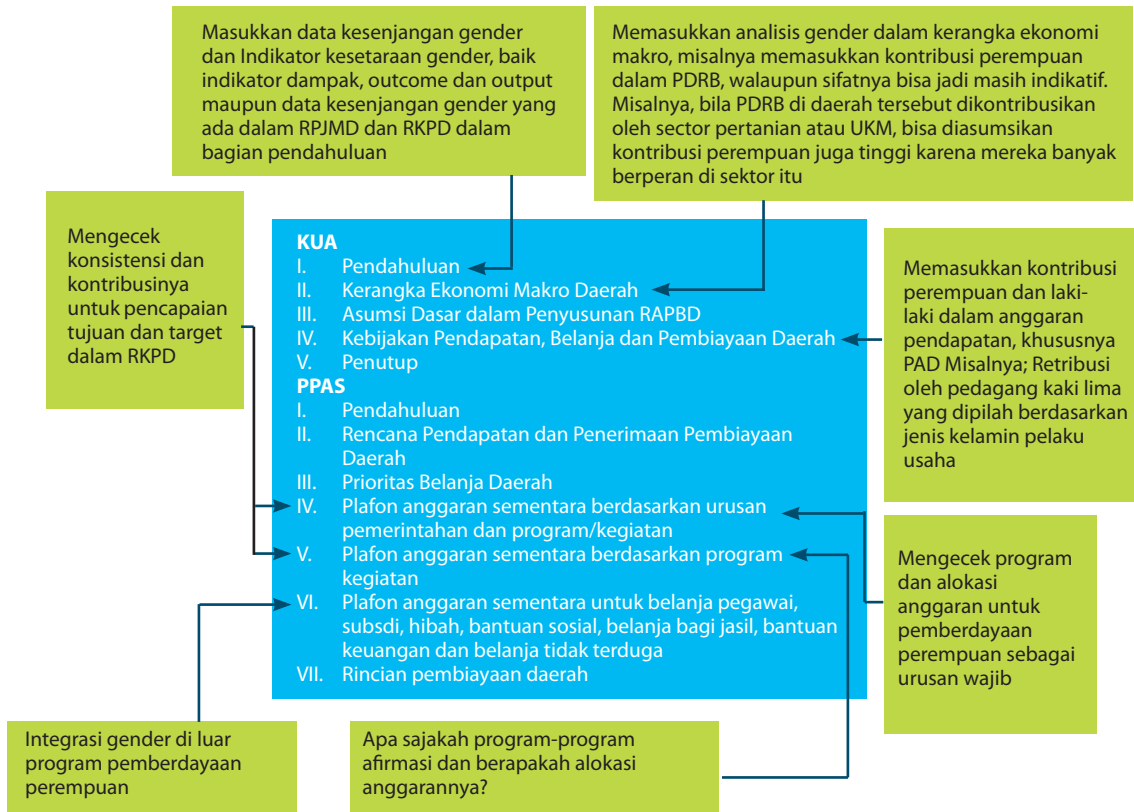
Babak 2: Di Dinas Kesehatan

- Kepala Dinas:** seorang dokter dan master lulusan ilmu kesehatan masyarakat. Puluhan tahun berkarir di pemerintah daerah membuatnya paham seluk-beluk perencanaan dan penganggaran di daerah. Sedang mencari bentuk, kebijakan dan sistem kesehatan yang diperlukan untuk merespons masalah utama kesehatan, terutama terkait dengan meningkatnya angka kematian ibu. Namun, ia cukup bingung karena anggaran untuk dinas kesehatan justru dipangkas karena ada momentum Pemilu yang akan diselenggarakan tahun depan.
- Staf perencana dinas kesehatan:** tugasnya adalah menyusun RKA-SKPD, dengan plafon anggaran yang turun sebanyak 8%. Ia sudah 12 tahun bekerja sebagai pegawai pemerintah daerah, setelah sebelumnya menjadi staf di bagian Kesra Bappeda.

II. Presentasi

1. Langkah Integrasi Gender dalam KUA-PPAS

a. Integrasi Hasil PAG dalam KUA-PPAS



- Proses penyusunan KUA-PPAS akan menentukan alokasi anggaran untuk program dan kegiatan tertentu untuk periode satu tahun melalui kesepakatan antara kepala daerah dengan DPRD.
- PAG yang sudah dipersiapkan sejak masa penyusunan KUA PPAS, dapat menjadi dasar mengapa program/kegiatan tersebut diperlukan yang dapat dilihat pada analisa situasi, tujuan program, capaian program, tujuan kegiatan, output dan dampak (outcome dan impact) dari kegiatan tersebut.
- Kejelasan terhadap alasan mengapa program/kegiatan tersebut diperlukan menjadi kekuatan bagi eksekutif untuk melakukan negosiasi dengan DPRD dalam mencapai persetujuan tentang pengalokasian anggaran.
- Disepakatinya pengalokasian anggaran bagi program /kegiatan dalam dokumen KUA-PPAS akan menjadi dasar yang kuat dalam penyusunan RKA-SKPD yang substansinya harus secara konsisten mengacu pada PAG.

SESI 16

Integrasi Gender dalam Dokumen RKA-SKPD

Tujuan	Memperkuat keterampilan memasukkan perspektif gender dalam dokumen RKA-SKPD
Output	Peserta mampu menyusun RKA-SKPD yang memuat <i>outcome</i> , <i>output</i> , program, kegiatan dan sasaran yang responsif gender
Metode	Presentasi, praktikum
Waktu	90 menit
Alat Bantu	I. Presentasi 1. RKA-SKPD dan Langkah Integrasi Gender II. Panduan Praktikum 1. Penyusunan RKA-SKPD III. Bahan Bacaan 1. Contoh Integrasi Gender dalam Dokumen RKA-SKPD
Perlengkapan	LCD projector, pinboard, spidol, kartu metaplan
Urgensi Sesi	Melanjutkan dan memanfaatkan hasil analisis gender, dan memasukkannya dalam dokumen RKA. Langkah ini akan terhubung dengan analisis gender dan PAG serta KAK sudah disusun

A. Proses

Langkah 1: Presentasi: RKA-SKPD dan Langkah Integrasi Gender (30 menit)

Tujuan: Peserta memahami format dan langkah integrasi gender dalam RKA

1. Fasilitator mengulas kembali secara singkat format RKA yang sudah disampaikan sebelumnya.
2. Kemudian, fasilitator menjelaskan langkah demi langkah integrasi gender dalam penyusunan dokumen RKA, serta check list untuk memastikan DPA yang responsif gender.
3. Beri kesempatan kalau peserta akan memberikan tanggapan.

Langkah 2: Praktikum: Penyusunan RKA-SKPD (40 menit)

Tujuan: Peserta terampil memasukkan gender dalam dokumen RKA-SKPD

1. Setiap kelompok melihat lagi hasil praktikum sebelumnya, yakni hasil GAP, PAG dan KAK serta hasil praktikum tersebut berdasar tiga kategori anggaran ARG, yakni anggaran spesifik gender, anggaran afirmasi dan kelembagaan PUG, dan anggaran kesetaraan gender.
2. Fasilitator memastikan bahwa kelompok kerja masing-masing memilih kategori anggaran ARG yang berbeda untuk praktikum mereka.
3. Pilihlah satu kegiatan dari salah satu kategori anggaran ARG dan kembangkanlah RKA-SKPD untuk kegiatan tersebut.
4. Masukkan informasi tersebut dalam format RKA-SKPD sebagaimana terdapat dalam form 2.2.1 Permendagri 13 tahun 2006.

Langkah 3: Presentasi: Hasil Kerja Kelompok (20 menit)

Tujuan: Presentasi hasil kerja dan menggali input dari peserta

1. Setiap kelompok mempresentasi hasil praktikum. Galilah hal-hal berikut dari peserta:
 - a. Apakah yang khas dari RKA ketiga jenis kegiatan/anggaran?
 - b. Apakah pendukung yang tersedia untuk penyusunan RKA responsif gender?
 - c. Kendala dan hambatan untuk penyusunan RKA responsif gender?

B. Alat Bantu

I. Presentasi

1. Langkah Integrasi Gender dalam RKA-SKPD

a. Integrasi Gender dalam RKA-SKPD

Apakah kegiatan spesifik, afirmasi, dan peningkatan kapasitas ataukah kegiatan secara umum? Apakah kegiatan ini dianggap memadai untuk menyelesaikan satu isu gender tertentu?

Kesesuaian program dan kegiatan dengan Renja SKPD

Mengecek konsistensi dan rumusan indikator dengan kerangka kinerja logis. Apakah kontribusinya untuk penyelesaian isu gender?

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir RKA-SKPD 2.2.1		
Provinsi/Kab/Kota:					
Tahun Anggaran:					
Urusan pemerintahan				
Organisasi				
Program				
Kegiatan				
Lokasi Kegiatan				
Jumlah tahun n-1	Rp	(.....)			
Jumlah tahun n	Rp	(.....)			
Jumlah tahun n+1	Rp	(.....)			
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja			
Capaian program					
Masukan					
Keluaran					
Hasil					
Kelompok Sasaran Kegiatan					
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan SKPD					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			
		Volume	Satuan	Harga satuan	Jumlah (Rp)
x.x.x.xx.xx					
x.x.x.xx.xx					
x.x.x.xx.xx					
Jumlah					

Lokasi kegiatan memungkinkan keterlibatan laki-laki dan perempuan. Juga wilayah dengan tingkat kesenjangan gender atau prevalensi kasus berbasis gender yang tinggi

Sejauh mana keterlibatan perempuan dan kelompok rentan? Dalam beberapa kasus seperti rendahnya keterlibatan laki-laki dalam program KB, apakah pelibatan mereka masuk secara eksplisit?

b. Integrasi Gender dalam DPA

- Merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
- Disesuaikan dari RKA setelah penetapan APBD
- Cek kembali rumusan indikator: Apakah rumusan indikator realistis bilamana terjadi pengurangan atau perubahan jumlah anggaran untuk satu kegiatan tertentu dari proses penetapan APBD?

II. Panduan Praktikum

1. Penyusunan RKA Responsif Gender

- Lihat kembali hasil-hasil praktikum sebelumnya yakni GAP, PAG dan KAK.
- Pilih salah satu kegiatan yang masuk dalam salah satu kategori anggaran ARG.
- Masukkan data dan informasi dalam instrumen-instrumen tersebut dalam format RKA-SKPD:

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir RKA-SKPD 2.2.1			
Provinsi/Kab/Kota:					
Tahun Anggaran:					
Urusan pemerintahan				
Organisasi				
Program				
Kegiatan				
Lokasi Kegiatan				
Jumlah tahun n-1	Rp(.....)				
Jumlah tahun n	Rp(.....)				
Jumlah tahun n+1	Rp(.....)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian program					
Masukan					
Keluaran					
Hasil					
Kelompok Sasaran Kegiatan					
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan SKPD					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			
		Volume	Satuan	Harga satuan	Jumlah (Rp)
x.x.x.xx.xx					
x.x.x.xx.xx					
x.x.x.xx.xx					
Jumlah					

III. Bahan Bacaan

1. Contoh Aplikasi Integrasi Gender dalam Dokumen RKA-SKPD

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir RKA-SKPD 2.2.1			
Provinsi/Kab/Kota: Provinsi X Tahun Anggaran: 2011					
Urusan pemerintahan	Pekerjaan Umum				
Organisasi	Dinas PU dan Bina Marga				
Program	Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan.				
Kegiatan	Pembebasan Tanah Jaringan Jalan Lintas Selatan.				
Lokasi Kegiatan	Wilayah Perbatasan Kab.A dan Kota B				
Jumlah tahun n-1	Rp(.....)				
Jumlah tahun n	Rp(.....)				
Jumlah tahun n+1	Rp(.....)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja			
Capaian program	Bertambahnya jumlah jalan dan jembatan	5 km jalan baru; 2 jembatan baru			
Masukan	Dana untuk pembayaran ganti rugi tanah/ lahan	Rp 8,310 Milyar			
Keluaran	Tanah yang dibebaskan sesuai kesepakatan dengan pemilik lahan laki-laki dan perempuan	100 hektar			
Hasil	Jumlah jalan dan jembatan yang akan mendukung perekonomian antarwilayah melalui peningkatan mobilitas laki-laki dan perempuan pelaku ekonomi	5 km jalan baru; 2 jembatan baru			
Kelompok Sasaran Kegiatan	Laki-laki dan perempuan pemilik lahan baik secara <i>de jura</i> maupun <i>de facto</i> serta pelaku usaha				
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan SKPD					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			
		Volume	Satuan	Harga satuan	Jumlah (Rp)
x.x.x.xx.xx					
x.x.x.xx.xx					
x.x.x.xx.xx					
Jumlah					

BAGIAN 4

Pemantauan dan Evaluasi, Advokasi PPRG, Kurikulum dan Evaluasi Pelatihan

Cakupan:

Sesi 17: Fungsi Pemantauan, Evaluasi dan Indikator

Sesi 18: Sistem Pemantauan dan Evaluasi PPRG di Daerah

Sesi 19: Strategi Advokasi dan Promosi PPRG

Sesi 20 : Penyusunan Kurikulum Pelatihan dan Evaluasi Pelatihan

SESI 17

Fungsi Pemantauan, Evaluasi dan Indikator

Tujuan	Memahami konsep pemantauan, evaluasi, dan indikator dalam rangka pelaksanaan program pembangunan
Output	Peserta memiliki pemahaman yang kuat mengenai konsep pemantauan dan evaluasi serta indikator kinerja
Metode	Curah gagasan, presentasi
Waktu	75 menit
Alat Bantu	I. Presentasi 1. Fungsi Pemantauan, Evaluasi dan Indikator
Perlengkapan	Kartu-kartu metaplan beberapa warna, LCD projector
Urgensi sesi	Sesi akan mengantarkan peserta mengenai konsep umum tentang pemantauan/pemantauan dan evaluasi yang menjadi rangkaian yang tidak terpisah dari proses manajemen berbasis kinerja. Diharapkan dengan sesi ini peserta kemudian memiliki pemahaman dasar yang kuat ketika masuk pada sesi selanjutnya yang lebih spesifik, yaitu pemantauan dan evaluasi PPRG.

A. Proses

Langkah 1: Curah gagasan: Pemantauan dan Evaluasi di Daerah (15 menit)

Tujuan: Membuka wawasan dan fasilitator dapat melihat tingkat pengetahuan peserta tentang pemantauan dan evaluasi

1. Fasilitator meminta peserta untuk menulis masing-masing di dua kartu tentang peran pemantauan dan peran evaluasi dalam pembangunan. Kartu bisa mengacu kepada aspek:
 - Apa tujuan/guna pemantauan dan evaluasi?
 - Siapa yang melaksanakan ?
 - Apa syaratnya?
 - Siapa yang mendapatkan manfaat dari pemantauan dan evaluasi?
2. Peserta menempelkan kartu ke *pinboard*; fasilitator mengelompokkan kartunya sesuai dengan aspek di atas. Bersama-sama fasilitator dan peserta melihat apakah semua kartu sudah ditempatkan dengan benar.
3. Hasil curah gagasan akan direfleksikan sekali lagi setelah presentasi.

Langkah 2: Presentasi: Fungsi Pemantauan, Evaluasi dan Indikator (60 menit)

Tujuan: Peserta dapat gambaran umum tentang fungsi dan pentingnya pemantauan dan evaluasi dalam siklus manajemen program berbasis kinerja

1. Fasilitator memberi presentasi dan menerima pertanyaan peserta.
2. Setelah pertanyaan yang terkait dengan presentasi dijawab, peserta akan melihat lagi hasil dari curah gagasan.
3. Peserta dan fasilitator membahas, apakah gambaran yang keluar dari dokumentasi curah gagasan sudah lengkap/ sesuai dengan isi presentasi. Di mana masih kurang/beda persepsi, fasilitator mengundang diskusi, dan berdasarkan diskusi melengkapi gambaran di kartu-kartu metaplan dengan kartu-kartu baru.

B. Alat Bantu

I. Presentasi

1. Presentasi tentang Fungsi Pemantauan, Evaluasi dan Indikator

a. Fungsi Pemantauan (Fokus terhadap Keberhasilan Proses)

- Melakukan kontrol terhadap proses dan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan
- Memastikan akuntabilitas program pembangunan terhadap pimpinan dan masyarakat
- Meningkatkan kinerja program tahun berikutnya
- Promosi hasil pembangunan kepada legislatif dan pemeritahan daerah untuk mengadvokasi anggaran tahun berikutnya

b. Fungsi Evaluasi (Fokus terhadap Efektivitas Hasil Jangka Menengah)

- Melihat efektivitas program dalam mewujudkan tujuan prioritas yang tercantum dalam RPJMD dan Renstra SKPD
- Mengidentifikasi faktor pengaruh yang memungkinkan atau menghalangi sukses suatu program/strategi
- Merefleksikan dampak positif dan negatif di tingkat sasaran
- Mendapatkan pembelajaran dari pengalaman: mengupas faktor pendukung/ kendala dalam pelaksanaan program
- Mengidentifikasi tindak lanjut untuk kembali ke arah yang benar atau untuk memperbaiki sasaran berdasarkan fakta dan pengalaman

c. Tingkatan Pemantauan dalam Pelaksanaan Pembangunan di Daerah

- Pemantauan pada tingkat daerah
 - Gubernur melakukan pemantauan terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup provinsi, antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi. Bupati/walikota melakukan pemantauan terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup kabupaten/kota.
 - Pemantauan oleh gubernur, bupati/walikota dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah
 - Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan supervisi rencana pembangunan kepada kepala daerah, disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan
- Pemantauan pada tingkat SKPD
 - Pemantauan pada tingkat SKPD dilaksanakan oleh Kepala SKPD untuk program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
 - Pemantauan oleh kepala daerah dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala SKPD untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD periode sebelumnya

d. Beberapa Pertanyaan Kunci untuk Pemantauan

- Apa status implementasi kegiatan? Apa yang menyebabkan keterlambatan atau hambatan dalam pelaksanaan?
- Apakah keluaran yang diharapkan (*output*) masih relevan dan diperlukan?
- Apakah aktivitas telah dapat mencapai keluaran yang diharapkan (*output*)?
- Jika kita tak dapat mencapai hasil yang diharapkan atau hasil ini tak relevan lagi, bagaimana sebaiknya kita menyesuaikan perjalanan kegiatan sehingga ada hasil yang diharapkan/ sesuai keperluan?

e. Evaluasi dalam Pelaksanaan Pembangunan di Tingkat Daerah

- Gubernur melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup provinsi, antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi. Bupati/walikota melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup kabupaten/kota.
- Evaluasi meliputi evaluasi terhadap:
 - kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
 - hasil rencana pembangunan daerah.

- Evaluasi oleh gubernur, bupati atau walikota dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD periode sebelumnya.
- Evaluasi oleh Bappeda meliputi:
 - o penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah, dan
 - o menghimpun, menganalisis, dan menyusun hasil evaluasi Kepala SKPD dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah.
- Hasil evaluasi ini menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

f. Beberapa Pertanyaan Kunci untuk Evaluasi Keberhasilan Pembangunan

- Se jauh mana Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam perencanaan jangka menengah telah dicapai?
- Faktor apa menyebabkan ketidakberhasilan?
- Apakah kerangka kebijakan telah memungkinkan pencapaian hasil pembangunan?
- Apakah instansi mempunyai mandat serta struktur yang tepat untuk mencapai hasil yang diharapkan terkait dengan IKU?
- Apakah kapasitas aparatur/ pemberi pelayanan sudah memungkinkan pencapaian hasil seperti direncanakan?
- Apakah hasil yang dicapai mendukung prioritas strategis serta perubahan yang diharapkan?
- Apakah pelayanan publik telah ditingkatkan?
- Apakah masyarakat merasa perbaikan tersebut mendapat akses dan kualitas pelayanan yang lebih tepat?

g. Indikator Kinerja

- Dalam tahap pemantauan dan evaluasi, indikator mengacu pada pertanyaan: "Data atau informasi apa yang dapat menunjukkan tingkat pencapaian hasil?"
- Indikator: merupakan alat untuk mengukur pencapaian hasil/kinerja yang memberikan informasi mengenai:
 - o Tingkat kemajuan proses mewujudkan *outcome* (*input-output-outcome*), dan/atau
 - o Tingkat ketercapaian dampak.
- Pengumpulan informasi terkait dengan tingkat ketercapaian hasil dirumuskan pada saat perencanaan dan menjadi rujukan dalam proses pemantauan dan evaluasi.

h. Menyusun Indikator Kinerja

- Untuk memastikan, bahwa indikator dapat dipantau, perlu menjawab pertanyaan ini:
 - o Apa nilai awal (*baseline*) dan nilai keberhasilan (*target*)?
 - o Data seperti apa yang diperlukan untuk memonitor indikator tersebut?
 - o Data bisa terdapat dari mana/ oleh siapa?
 - o Siapa yang akan mengumpulkan data tersebut?
 - o Kapan/ berapa seringnya data tersebut akan dikumpulkan?
 - o Sumber daya yang diperlukan untuk pemantauan?
- Pertanyaan tersebut harus dijawab waktu menyusun indikator, bukan pada saat Anda berencana untuk melaksanakan pemantauan!

i. Beberapa Syarat Utama Informasi Indikator Kinerja

Berdasarkan Modul Reformasi Perencanaan Bappenas, 2008

Aspek	Tujuan/ Fungsi
Penanggungjawab indikator	Mengidentifikasi unit organisasi penanggungjawab dalam pendefinisian, analisis data, interpretasi dan pelaporan indikator
Pengelola data indikator	Mengidentifikasi unit organisasi penanggungjawab dalam memastikan data indikator telah terkumpul dan tersedia sesuai jadwal
Waktu pelaksanaan pengumpulan data indikator	Tanggal yang ditetapkan untuk memulai pengumpulan data indikator
Jadwal pelaporan	Mengidentifikasi jadwal pelaporan indikator (apakah dilaporkan per tigabulan, per semester atau per tahun)
Sumber pengumpulan data	Menggambarkan dari mana data/informasi didapat dan bagaimana pengumpulannya
Hambatan pengumpulan data	Mengidentifikasi hambatan pengumpulan data/informasi terkait pengukuran kinerja

SESI 18

Sistem Pemantauan dan Evaluasi PPRG di Daerah

Tujuan	Memahami mengenai aspek/ fokus pemantauan dan evaluasi PPRG di daerah serta data yang diperlukan Mengidentifikasi peluang integrasi pemantauan PPRG dalam sistem pemantauan dan evaluasi dan pelaporan yang sudah ada Memahami pihak mana saja yang terlibat
Output	Peserta memahami fungsi pemantauan dan evaluasi terhadap proses dan hasil PPRG serta pentingnya dalam rangka mewujudkan strategi PUG di daerah
Metode	Presentasi dan praktikum
Waktu	90 menit
Alat Bantu	I. Presentasi 1. Pemantauan dan Evaluasi Keberhasilan PPRG II. Panduan Praktikum 1. Persiapan Rencana Pemantauan PPRG III. Bahan Bacaan 1. Dokumen Laporan Kinerja Daerah dan Relevansi dengan Pemantauan PPRG 2. Muatan Laporan: LKPJ dan LAKIP
Perlengkapan	Kartu-kartu metaplan beberapa warna, <i>LCD projector</i>
Urgensi sesi	Mengenal sistem pemantauan dan evaluasi di daerah, format dan skema perencanaan serta bagaimana mengintegrasikan gender di dalamnya. Dengan ini, proses pemantauan dan evaluasi PPRG akan dilakukan dalam sistem yang berjalan di daerah

A. Proses

Langkah 1: Presentasi: Pemantauan dan Evaluasi Keberhasilan PPRG (45 menit)

Tujuan: Peserta memahami konsep pemantauan dan evaluasi keberhasilan PPRG

1. Fasilitator memberi presentasi tentang aspek-aspek yang relevan dalam pemantauan dan evaluasi keberhasilan PPRG dan menjawab pertanyaan peserta.
2. Fasilitator mengundang peserta mengikuti diskusi interaktif tentang proses pemantauan dan evaluasi yang telah dilaksanakan secara rutin di tingkat daerah (SKPD, Bappeda dan lain-lain) dan tentang faktor yang dapat dimanfaatkan untuk pemantauan dan evaluasi PPRG.
3. Hasil pembahasan tersebut dicatat di *pinboard*.

Langkah 2: Praktikum: Persiapan Rencana Pemantauan PPRG (45 menit)

Tujuan: Peserta mengembangkan rencana aksi untuk pemantauan dan evaluasi keberhasilan PPRG.

1. Peserta bergabung dalam kelompok. Masing-masing kelompok diberikan dua aspek yang terkait dengan PPRG untuk mengembangkan rencana aksi. Aspek pertama terkait dengan pemantauan rutin, padahal yang kedua terkait dengan evaluasi.
2. Kelompok menentukan fasilitator proses diskusi dan presentator hasil.
3. Selama 30 menit, peserta mengembangkan rencana aksi. Terkait dengan aspek tersebut:
 - Apa yang akan dipantau/ dievaluasi secara spesifik?
 - Siapa yang akan melakukannya?
 - Bagaimana hal itu akan dipantau/ dievaluasi (metode)?
 - Data/ informasi seperti apa yang akan diperlukan?
 - Kapan pemantauan/ evaluasi sebaiknya dilakukan untuk memastikan hasil dapat menjadi masukan untuk perbaikan kinerja? Apakah dapat digabung dengan proses pemantauan dan pemantauan rutin?
 - Laporan seperti apa yang perlu dikembangkan?
4. Hasil akan didokumentasikan dalam bentuk tabel (lihat Alat Bantu).
5. Setelah 30 menit, akan dilaksanakan presentasi dengan metode *marketplace*.

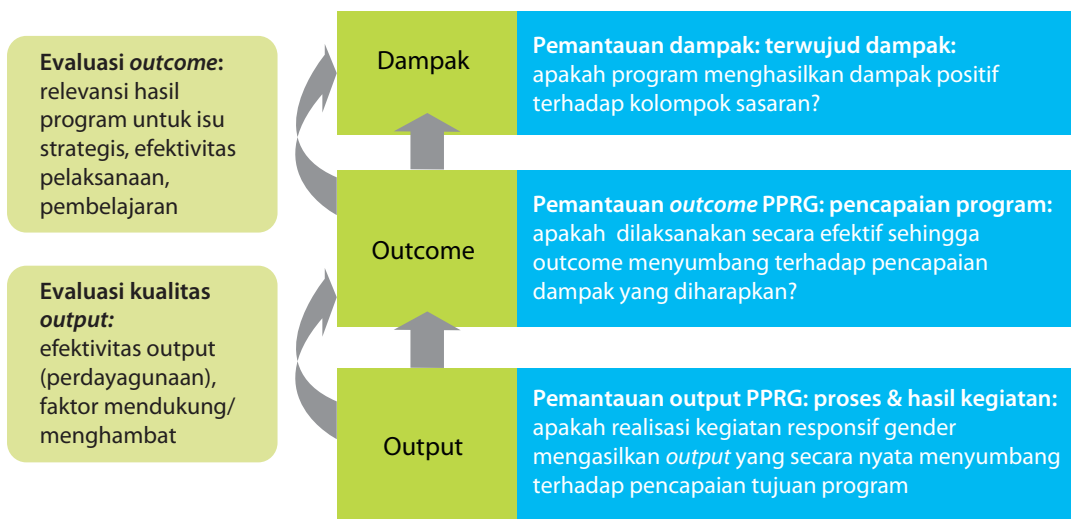
B. Alat Bantu

I. Presentasi

1. Pemantauan dan Evaluasi Keberhasilan PPRG

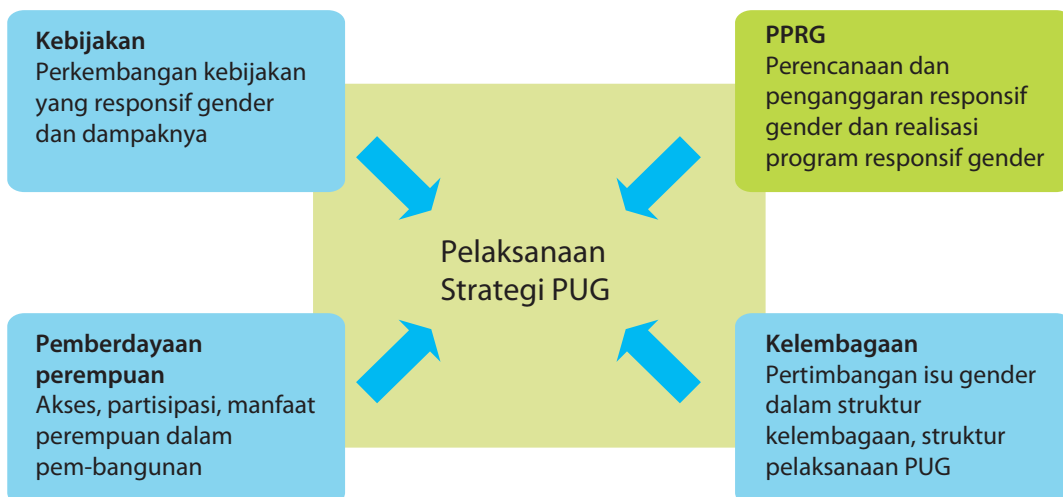
a. Mengapa Perlunya Pemantauan dan Evaluasi PPRG?

- Untuk melihat manfaat PPRG dalam pelaksanaan implementasi strategi PUG dalam pembangunan di daerah.
- Pertanyaan utamanya adalah "Apakah PPRG di tingkat daerah dilaksanakan secara efektif sehingga program dan kegiatan responsif gender dapat direalisasi dan menghasilkan dampak positif terhadap kelompok sasaran?". Dalam tingkatan kerangka kinerja dapat melihat

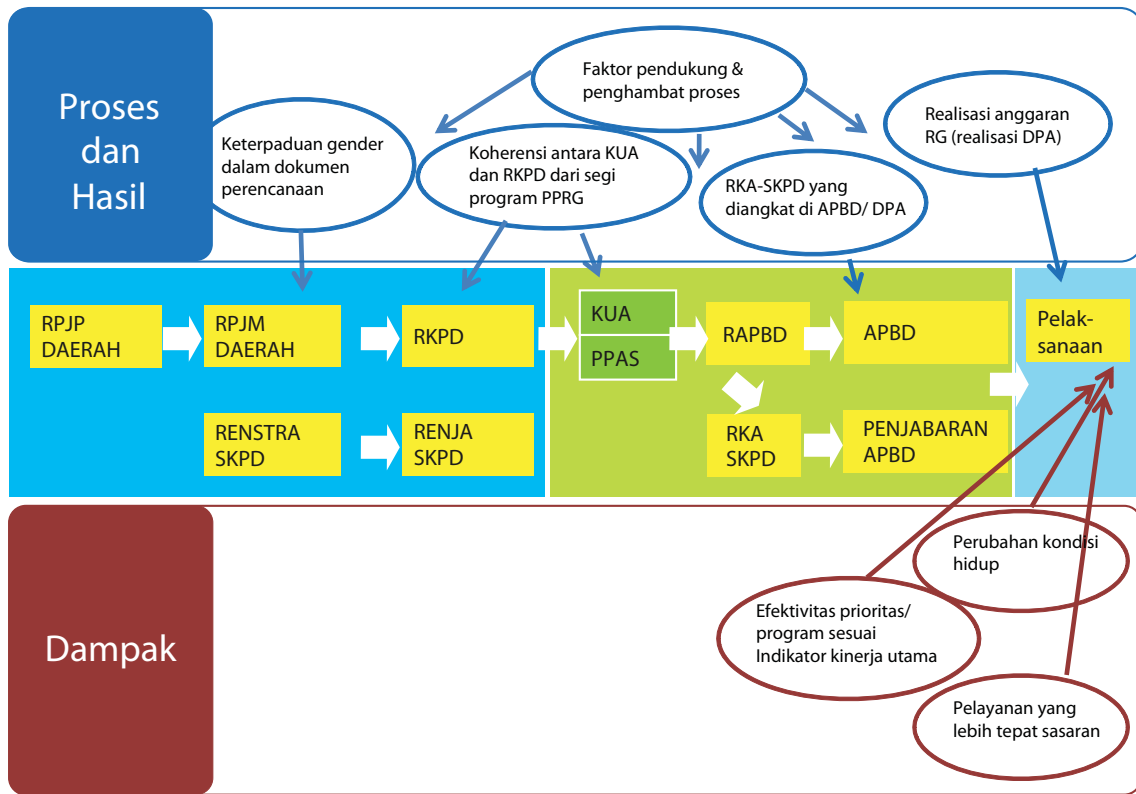


b. Pemantauan dan Evaluasi Keberhasilan Implementasi Strategi PUG

- PPRG merupakan salah satu instrumen dalam kerangka implementasi strategi PUG dalam pembangunan di daerah.
- Aspek lain yang merupakan bentuk implementasi strategi PUG:
 - o program dan kegiatan pemberdayaan perempuan sebagai salah satu urusan wajib daerah,
 - o kebijakan pendukung pada tingkat nasional dan daerah,
 - o aspek kelembagaan PUG prasyarat sebagai implementasi PUG.
- Pemantauan dan evaluasi PPRG terfokus pada PPRG sebagai bagian dari implementasi strategi PUG, bukan fokus pada implementasi PUG.



c. Aspek Pemantauan dan Evaluasi PPRG

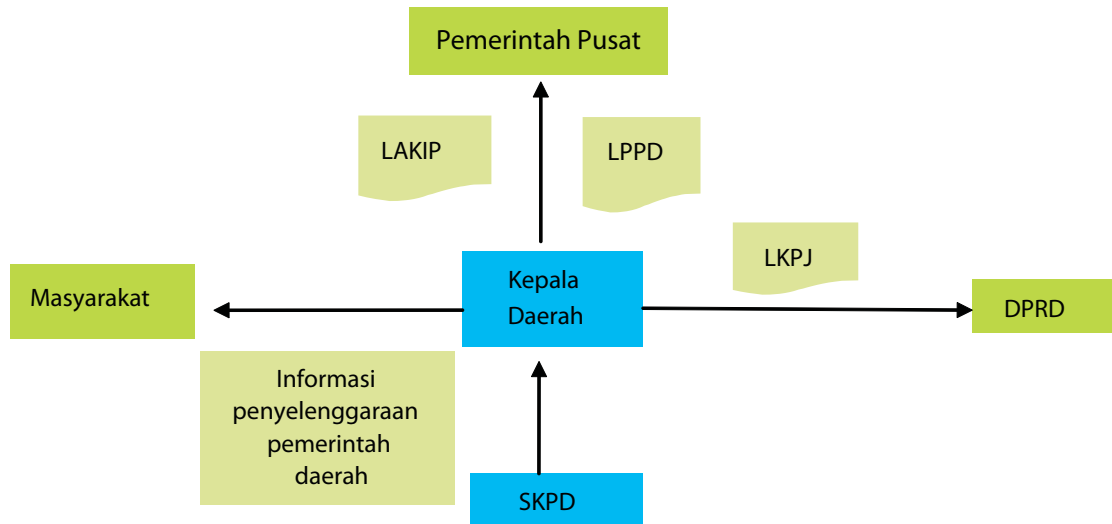


d. Aspek yang Dapat Dipantau dan Contoh Indikator

Aspek Kinerja	Pertanyaan	Contoh Indikator
Proses pelaksanaan PPRG	Apakah persiapan dan pelaksanaan PPRG berjalan dengan lancar (kegiatan)? Apa <i>output</i> pelaksanaan PPRG ?	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah/persentase dari program di RPJMD/ RKPD yang responsif gender (integrasi gender dalam perencanaan daerah) Jumlah/ persentase program Renstra dan Renja suatu SKPD yang responsif gender (integrasi gender dalam perencanaan SKPD) Dokumen KUA/PPAS telah responsif gender sesuai dengan analisis gender (integrasi gender dalam perencanaan anggaran) Jumlah RKA-SKPD di suatu SKPD yang memenuhi standar RKA yang responsif gender (kualitas RKA-SKPD)
Hasil pelaksanaan PPRG	Apakah PPRG menghasilkan anggaran daerah yang lebih responsif gender? Bagaimana status realisasi anggaran yang responsif gender? Apakah terjadi peningkatan koherensi antara perencanaan dan penganggaran untuk program yang responsif gender?	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah/persentase kegiatan responsif gender yang telah dilaksanakan sesuai dengan TOR (realisasi kegiatan) Jumlah dana yang telah direalisasikan berdasarkan TOR responsif gender (realisasi DPA) Keberhasilan realisasi kegiatan yang responsif gender dan kegiatan non-responsif gender (perbandingan efektivitas)
Dampak pelaksanaan PPRG	Apakah kontribusi PPRG pada implementasi Strategi PUG?	<ul style="list-style-type: none"> Pemantauan Indikator Kinerja Utama tentang: <ul style="list-style-type: none"> kemajuan kesetaraan gender perbaikan kondisi hidup untuk laki dan perempuan Peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih responsif gender

e. Integrasi Informasi tentang Hasil PPRG dalam Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah

- Dalam sistem pelaporan kinerja pemerintah daerah belum ada kerangka kebijakan untuk pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PPRG.
- Pemantauan dan evaluasi PPRG yang diperkenalkan dalam modul ini bersifat usulan dan mengacu kepada sistem pelaporan yang sudah ada.
- Pengalaman beberapa daerah yang telah memantau pelaksanaan PPRG diperhatikan dalam penyusunan usulan ini.



- Skema pelaporan kinerja rutin mencakup pelaporan vertikal dan horisontal:
 - o vertikal: dari kepala daerah kepada pemerintah pusat,
 - o horisontal: dari kepala daerah kepada DPRD,
 - o horisontal: informasi penyelenggaraan program kepada masyarakat.
- Dokumen laporan kinerja daerah terdiri dari:
 - o Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP),
 - o Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD),
 - o Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ).
- Pelaporan proses dan hasil pemantauan dan evaluasi PPRG sebaiknya terintegrasi dalam dokumen pelaporan kinerja rutin ini.

II. Panduan Praktikum

1. **Praktikum: Persiapan Rencana Pemantauan PPRG (45 menit)**

- Selama 30 menit, peserta mengembangkan rencana aksi.
- Hasil didokumentasikan dalam bentuk tabel, menggunakan kartu metaplan dan *pinboard*.
- Setelah 15 menit, presentasikan hasil dengan metode *marketplace*.

Rencana pemantauan/ evaluasi	Indikator pemantauan rutin tentang proses PPRG	Indikator evaluasi dampak pelaksanaan PPRG
a. Apa yang akan dipantau/ dievaluasi secara spesifik		
b. Siapa yang akan melakukannya?		
c. Bagaimana hal itu akan dipantau/ dievaluasi (metode)?		
d. Data/ informasi seperti apa yang akan diperlukan?		
e. Kapan pemantauan/ evaluasi sebaiknya dilakukan? Apakah dapat digabung dengan proses pemantauan dan pemantauan rutin?		
f. Laporan seperti apa yang perlu dikembangkan?		

III. Bahan Bacaan

1. Dokumen Laporan Kinerja Daerah dan Relevansi dengan Pemantauan PPRG

Dokumen	Deskripsi	Relevansi dengan PPRG
LPPD (PP No. 3 tahun 2007)	Laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh kepala daerah kepada Pemerintah yang berfokus pada aspek-aspek utama dari tata pemerintahan yang baik	Dapat digunakan untuk memperkenalkan gambaran secara makro tentang keberhasilan pelaksanaan PPRG di daerah kepada pemerintah pusat, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> • Informasi tentang komitmen pemerintah daerah terhadap implementasi PUG secara umum sebagai bagian dari aspek tata pemerintahan yang baik • Informasi tentang komitmen pemerintah daerah terhadap implementasi PPRG yang tercermin dalam ringkasan RKPD dan prioritas Pembangunan yang disampaikan dalam laporan tersebut. • Informasi tentang rencana kerja dan pendanaan yang telah ditujukan sebagai implementasi PPRG • Informasi pencapaian kinerja program urusan pemberdayaan perempuan sebagai salah satu urusan wajib daerah • Informasi tentang kapasitas SKPD yang secara khusus menangani urusan wajib Pemberdayaan Perempuan
LKPJ (PP No. 3 tahun 2007)	Laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD, yang terfokus pada implementasi program prioritas, anggaran secara umum, serta permasalahan dan solusi yang dihadapi	Gambaran pencapaian program prioritas yang sensitif gender, baik dalam penyelenggaraan urusan daerah maupun tugas pembantuan: <ul style="list-style-type: none"> • Informasi tentang jumlah program tahunan yang responsif gender • Informasi tentang komitmen pemerintah dan DPRD terhadap PPRG seperti yang tercantum dalam KUA PPAS • Informasi mengenai masalah dan solusi dalam implementasi
LAKIP (Inpres No. 7/1999 dan SK LAN 239/IX/6/8/2003)	Laporan tahunan yang berisi capaian kinerja instansi pemerintah dalam suatu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang telah disusun	Evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dengan mengacu kepada indikator kinerja utama: <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah/persentase program dan kegiatan responsif gender pada tahun yang dilaporkan, yang tercermin dalam RKPD dan Renja SKPD • Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut, yang tercermin dalam APBD dan DPA • Keterlibatan laki-laki dan perempuan sebagai sasaran dalam implementasi program dan kegiatan • Kendala dan strategi pemecahan terkait dengan upaya PUG dan PPRG di instansi
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat melalui media yang tersedia di daerah. Materinya merupakan ringkasan dari LPPD	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat terinformasi tentang program dan kegiatan sensitif gender • Masyarakat bisa memberikan masukan terkait dengan pencapaian keberhasilan PUG dan PPRG untuk berbagai bidang pembangunan

2. Muatan Laporan: LKPJ dan LAKIP

Dokumen	Level, Durasi	Kebijakan	Muatan
LKPJ	Daerah; satu tahun	PP No. 3 tahun 2007	<ul style="list-style-type: none"> I. Pendahuluan: dasar hukum, gambaran umum daerah II. Kebijakan Pemerintahan Daerah: Visi dan Misi, Strategi dan Arah Kebijakan Daerah (sesuai RPJMD), Prioritas Daerah III. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah: Pengelolaan Pendapatan Daerah & Pengelolaan Belanja Daerah IV. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah: pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan V. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan: tugas pembantuan yang diterima dan tugas pembantuan yang diberikan VI. Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan: Kerjasama antar daerah, kerjasama daerah dengan pihak ketiga, koordinasi dengan instansi vertikal di daerah pembinaan batas wilayah, pencegahan dan penanggulangan bencana, pengelolaan kawasan khusus, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum VII. Penutup
LPPD	Daerah; satu tahun	PP No. 3 tahun 2007	<ul style="list-style-type: none"> I. Pendahuluan: dasar hukum, gambaran umum daerah II. Rencana Pembangunan Jangka Menengah III. Urusana Desentralisasi :urusan wajib dan pilihan IV. Tugas Pembantuan V. Tugas Umum Pemerintahan: Kerjasama antar daerah, kerjasama daerah dengan pihak ketiga, koordinasi dengan instansi vertikal di daerah pembinaan batas wilayah, pencegahan dan penanggulangan bencana, pengelolaan kawasan khusus, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum VI. Penutup
LAKIP	Daerah; satu tahun	Inpres No. 7/1999 dan SK LAN 239/IX/6/8/2003	<ul style="list-style-type: none"> I. Ikhtisar Eksekutif: tujuan, sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapainya, dan kendala dalam pencapaiannya. Juga langkah untuk mengatasi kendala dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin terjadi di masa depan II. Pendahuluan: hal-hal umum tentang instansi serta gambaran umum tupoksi III. Rencana Strategis: gambaran singkat rencana strategis –visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan serta program. Juga rencana kinerja terutama kegiatan dalam mencapai sasaran sesuai program dan indikator keberhasilan pencapaiannya. IV. Akuntabilitas Kinerja: hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk uraian keberhasilan dan kegagalan, hambatan/ kendala dan langkah antisipatif. Juga laporan akuntabilitas keuangan dengan menyajikan alokasi dan realisasi anggaran untuk pelaksanaan tupoksi, termasuk analisis capaian indikator kinerja efisiensi V. Penutup: tinjauan umum keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama serta langkah antisipasi VI. Lampiran-lampiran

SESI 19

Strategi Advokasi dan Promosi PPRG

Tujuan	Mengidentifikasi langkah strategis untuk memastikan implementasi PPRG secara efektif
Output	Mengenal pihak-pihak kunci dalam PPRG Memahami strategi-strategi kunci advokasi PPRG Mengerti kekuatan, kelemahan dan faktor yang berpengaruh terhadap strategi PPRG
Metode	Curah gagasan, penulisan kasus
Waktu	90 menit
Alat Bantu	I. Presentasi 1. Skema Strategi Advokasi II. Panduan Praktikum 1. Identifikasi Langkah Promosi PPRG di dalam Pemerintahan Daerah
Perlengkapan	Pinboard, spidol, LCD projector, kartu-kartu metaplan, sticky notes
Urgensi Sesi	Mengidentifikasi isu kunci dalam advokasi PPRG dengan berdasarkan pengalaman peserta. Bagian ini menjadi penting untuk menemukan, apa sajakah konteks lokal yang berpengaruh, strategi yang tepat, dan siapa saja aktor kunci yang menentukan keberhasilan advokasi PPRG di daerah

A. Proses

Langkah 1: Presentasi: Skema Strategi Advokasi (45 menit)

Tujuan: Membagi pengalaman tentang desain dan pelaksanaan strategi advokasi

1. Fasilitator mempresentasikan skema strategi advokasi.
2. Peserta membahas skema itu dan mengidentifikasi dua peserta yang pernah melaksanakan advokasi untuk PPRG. Jika tidak ada yang berpengalaman, identifikasikan isu lain (misalnya pelaksanaan PUG) yang pernah diadvokasikan oleh peserta.
3. Dua peserta ini berdiri di depan dan ditanya oleh fasilitator tentang pengalaman mereka sesuai dengan pertanyaan kunci yang dapat ditemukan dalam skema segi tiga advokasi:
 - Apakah persoalan yang diadvokasi? Apa kebutuhan penguatan PPRG ke depan?
 - Siapa pihak yang diadvokasi?
 - Mana strategi yang efektif dan mana yang tidak? Apa kendalanya dan faktor yang berpengaruh?
 - Apakah pencapaian yang telah diraih?
 - Apakah pembelajaran yang didapat?
4. Berilah waktu 25 menit untuk mengerjakan kasus. Peserta dipersilakan menggunakan format yang paling menarik, termasuk penggunaan beragam model ilustrasi.

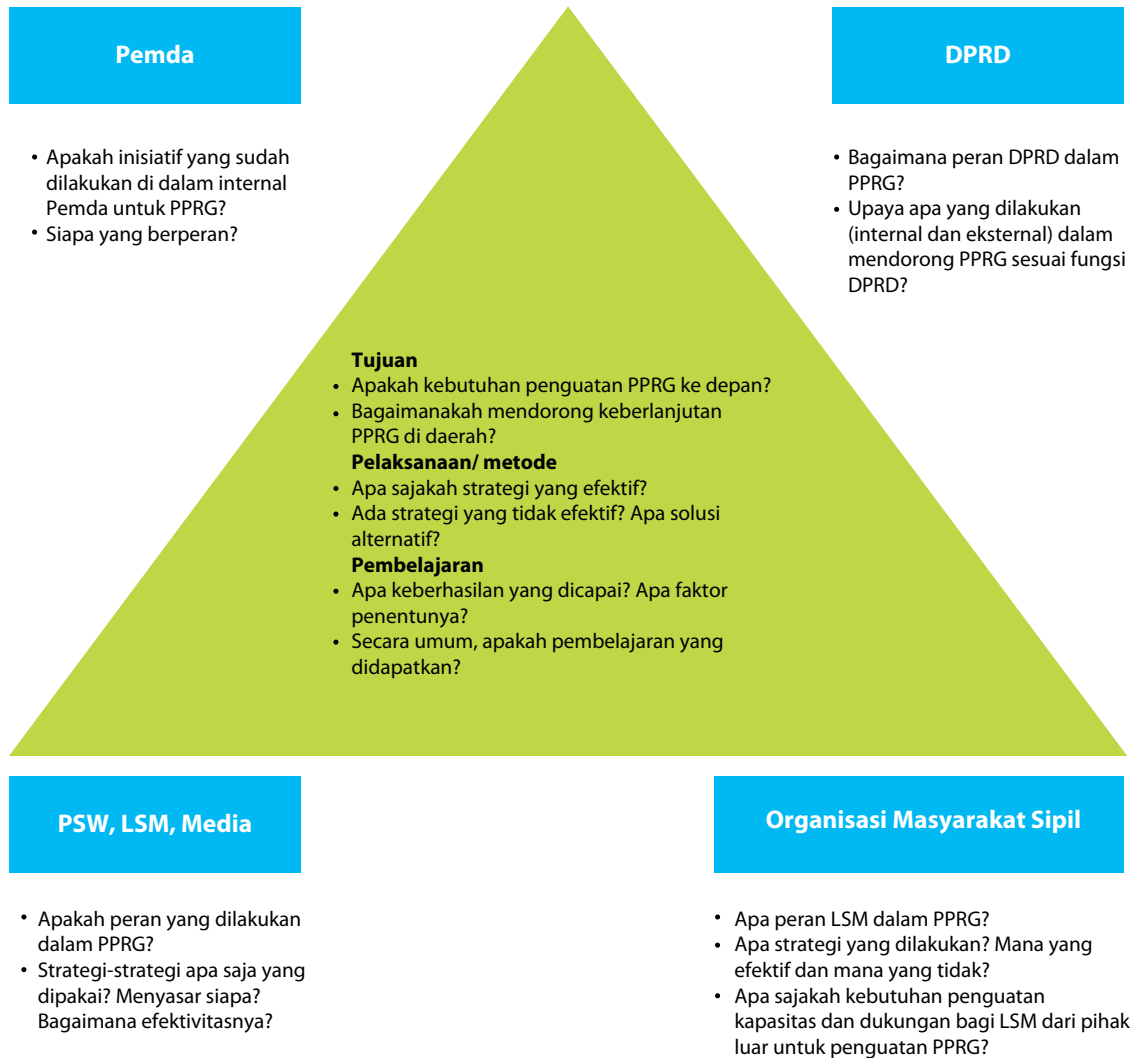
Langkah 2: Identifikasi Langkah Promosi PPRG di dalam Pemerintahan Daerah (45 menit)

Tujuan: Identifikasi langkah-langkah dan pihak kunci yang penting dilibatkan dalam promosi PPRG di daerah

1. Ajaklah peserta untuk mengidentifikasi langkah-langkah strategis untuk mempromosikan PPRG di kalangan pemerintahan daerah.
2. Galilah dari pengalaman peserta dengan beberapa pertanyaan panduan berikut ini:
 - Siapakah pihak kunci di dalam pemerintahan daerah yang paling penting untuk dipengaruhi?
 - Siapakah bagian dari DPRD yang strategis untuk dilibatkan dalam proses PPRG di daerah?
 - Apakah langkah kunci promosi di kalangan eksekutif dan birokrasi? Apakah langkah kunci promosi untuk kalangan legislative/DPRD?
3. Apakah hal-hal yang perlu diperhatikan –dihindari atau menjadi fokus- dalam upaya promosi PPRG di daerah?
4. Tempelkan kartu-kartu jawaban atas pertanyaan tersebut dalam matriks di bawah.

B. Alat Bantu

1) Presentasi: Skema Advokasi PPRG



II. Panduan Pratikum

1. Identifikasi Langkah Promosi PPRG di dalam Pemerintahan Daerah (45 menit)

- Diskusikan aspek-aspek promosi PPRG di tingkat eksekutif, DPRD, dan pihak lain-lain yang ingin didekati:
 - o Siapa aktor kunci dalam eksekutif, DPRD atau pihak lain yang terlibat dalam proses perencanaan dan penganggaran?
 - o Strategi/metode/langkah apa yang telah dilakukan untuk mempromosikan PPRG kepada pihak tersebut? Siapa pelaku advokasi untuk masing-masing langkah ini?
 - o Strategi/metode/langkah apa yang masih kurang dan harus dilakukan untuk mempromosikan PPRG kepada pihak ini agar berjalan efektif? Siapa pelakunya?
 - o Dukungan seperti apa yang diperlukan bagi promotor PPRG? Apakah perlu penguatan kapasitas, penyediaan bahan, dll?
- Dokumentasikan hasil praktikum dengan kartu metaplan pada *pinboard* dalam tabel berikut:

	Perencanaan			Penganggaran		
	Eksekutif	DPRD	Lain-lain	Eksekutif	DPRD	Lain-lain
Aktor kunci yang harus didekati						
Strategi/metode advokasi yang telah dilakukan Pelaku advokasi						
Strategi/metode advokasi yang perlu dikembangkan agar lebih efektif Pelaku advokasi						
Dukungan kepada promotor yang diperlukan						

SESI 20

Penyusunan Kurikulum Pelatihan dan Evaluasi Pelatihan

Tujuan	Menyusun rencana tindak lanjut untuk upaya PPRG yang akan dilakukan di masing-masing daerah; mengukur peningkatan pengetahuan setelah mengikuti pelatihan; dan memberikan <i>input</i> terhadap kualitas pelatihan
Output	Rencana tindak lanjut setiap peserta; hasil post test, input untuk kualitas pelatihan
Metode	Praktikum penyusunan kurikulum, pengisian lembar post tes, evaluasi pelaksanaan pelatihan
Waktu	90 menit
Alat Bantu	I. Panduan Praktikum 1. Penyusunan Kurikulum Pelatihan
Perlengkapan	<i>Pinboard</i> , <i>LCD projector</i> , spidol, kartu-kartu metaplan
Urgensi sesi	Bagian ini diperlukan karena memberi ruang kepada peserta untuk menyusun rencana tindak lanjut untuk pelaksanaan pelatihan di tingkat daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di setiap daerah. Pada akhir sesi, juga akan dilakukan evaluasi pelatihan secara umum.

A. Proses

Langkah 1: Penyusunan Kurikulum Pelatihan (60 menit)

Tujuan: Peserta mampu menyusun suatu kurikulum pelatihan sesuai dengan kebutuhan peserta pelatihan tersebut

1. Untuk pelatihan ini, peserta tidak bergabung dalam kelompok biasa, akan tetapi sesuai dengan daerah asalnya serta kebutuhan pelatihan yang ingin dikembangkan
2. Masing-masing kelompok memilih satu tujuan pelatihan yang akan dirancang serta kelompok peserta sebagai landasan untuk mengembangkan kurikulum pelatihan.
3. Peserta bersama-sama mengembangkan suatu kurikulum, memakai tabel pada Alat Bantu.
4. Fasilitator mengingatkan mereka, bahwa hasil pelatihan ini akan difoto dan dibagi dengan semua peserta sebagai pembelajaran dan referensi menyusun kurikulum ke depan.
5. Hasil dipaparkan di *pinboard*.

Langkah 2: Post Tes (15 menit)

Tujuan: Mengetahui peningkatan pengetahuan peserta setelah mengikuti pelatihan dibanding dengan dengan hasil Pre Tes

1. Fasilitator menjelaskan bahwa pst tes ini dilaksanakan secara anonim – tidak perlu mencatat nama di atas lembarnya.
2. Fasilitator membagi lembar post tes untuk diisi oleh peserta saat itu juga. Berilah kesempatan 10 menit kepada setiap peserta untuk menjawab pertanyaan.
3. Setelah selesai, mengumpulkan lembar post tes.

Langkah 3: Evaluasi terhadap Pelaksanaan Pelatihan (15 menit)

Tujuan: Mendapatkan input dari peserta mengenai kualitas pelatihan, baik dari sisi substansi, proses/metode, maupun kapasitas fasilitator; dan logistik pelatihan

1. Fasilitator meminta kepada setiap peserta untuk menuliskan komentar dan masukan mereka terhadap pelaksanaan pelatihan secara menyeluruh di atas empat kartu metaplan yang berbeda warna, misalnya:
 - Kartu warna biru: tentang substansi atau materi pelatihan,
 - Kartu warna merah: tentang proses atau dinamika pelatihan,
 - Kartu warna kuning: kapasitas fasilitator,
 - Kartu warna putih: tentang logistik pelatihan (akomodasi, konsumsi, transportasi dll).
2. Persilakan setiap peserta menempelkan kartu-kartu tersebut berdasarkan kesamaan warna kartu.
3. Fasilitator memetik beberapa kartu dari masing-masing kelompok komentar dan memberi tanggapan. Jika ada kartu yang tidak jelas, ajakkan peserta yang meulisnya untuk memperjelaskan masukan dia.
4. Fasilitator memberi tanggapan bagaimana usulan yang diberi akan ditanggapi ke depan.

B. Alat Bantu

I. Panduan Praktikum

1. Penyusunan Kurikulum Pelatihan PPRG

- Dalam kelompok kerja, rumuskanlah suatu kurikulum yang sesuai dengan tujuan pelatihan dan kebutuhan pelajaran kelompok peserta sehingga kurikulum benar-benar sesuai dengan kebutuhan pelatihan/pendampingan untuk PPRG di daerah
- Mulailah dengan menentukan kelompok sasaran pelatihan (misalnya: staf teknis dari SKPD atau pimpinan SKPD dan anggota DPRD, atau BPP dan PSW sebagai pendamping PPRG di daerah).
- Kembangkanlah beberapa asumsi tentang pengetahuan awal kelompok peserta tersebut sebagai titik berangkat perumusan tujuan pelatihan.
- Rumuskan tujuan pelatihan yang spesifik dan sesuai dengan kebutuhan kelompok peserta. Tujuan ini boleh mengandung beberapa poin supaya tidak terlalu umum.
- Menentukan durasi pelatihan/pendampingan sesuai dengan kebutuhan (bisa beberapa hari, atau beberapa jam).
- Menentukan topik utama yang akan dilatih, serta metode dan bahan yang akan diperkenalkan. Untuk pilihan Sesi/ Tujuan Sesi/ Metode/ Alat Bantu Anda dapat menarik inspirasi dari Modul PPRG di Daerah, atau langsung mengambil isi pelajaran/ metode/ praktikum dari modul. Ingatlah bahwa pelatihan orang dewasa harus mengandung cukup banyak waktu untuk diskusi dan praktikum.
- Dokumentasikan hasil rumusan itu dalam format berikut

1. Peserta Pelatihan:	
2. Pengetahuan awal peserta:	<ul style="list-style-type: none"> • xxx • xxx • xxx
3. Tujuan Pelatihan:	<ul style="list-style-type: none"> • xxx • xxx
4. Durasi Pelatihan:	<ul style="list-style-type: none"> • xx hari/ xx sesi

Hari	Waktu	Sesi	Tujuan sesi	Metode	Alat Bantu

Daftar Pustaka

- Bappenas (2009), *"Kerangka Pemikiran Reformasi Perencanaan dan Penganggaran: Modul I"*, Jakarta
- Budlender, Debbie (2008), *"Performance budgeting and indicators: How do we make them gender-sensitive?"*, handout pada Advanced Gender Budget Training, International Budget Partnership – BIGS
- Fatimah, D., Silawati, H., Budiharto, S. (2009), *"Draft Manual Anggaran Berbasis Gender dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah"*, GTZ-GLG dan Aksara, Yogyakarta
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (tanpa tahun) *"Modul Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender"*, Jakarta
- LGSP-USAID (2007), *"Bahan Pelatihan Fasilitator Forum SKPD dan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD): Panduan Pelatihan"*, seri Pelatihan Fasilitator Musrenbang Tahunan Daerah, Jakarta
- Sharp, Ronda (2003), *"Budgeting for Equity: Gender Budget Initiatives within a Framework of Performance Oriented Budgeting"*, UNIFEM
- Sundari, Eva K, dkk (2008), *"Modul Pelatihan Advokasi Penganggaran Berbasis Kinerja Responsif Gender"*, CIDA, Pattiro dan The Asia Foundation (TAF), Jakarta
- UNFPA and UNIFEM (2006), *"Gender Responsive Budgeting in Practice: a Training Manual"*, New York
- Bappenas dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2007), *"Gender Analysis Pathway (GAP): Alat Analisa Gender untuk Perencanaan Pembangunan"*, Jakarta

giz



Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

- German International Cooperation -

Decentralisation as Contribution to Good Governance (DeCGG)

Kementerian Dalam Negeri RI
Gd. Sasana Bhakti Praja Lt. 5
Jl. Medan Merdeka Utara No. 7
Jakarta 10110, Indonesia
T: +62-21-3511584
F: +62-21-3868167
I: www.giz.de

Strengthening Women's Rights (SWR)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Jl. Medan Merdeka Barat No. 15 Lt. 6
Jakarta 10110, Indonesia
T: + 62 21 3850281
F: + 62 21 3850280
I: www.giz.de